

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN**
(Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat)



Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2 pada
Program Studi Ilmu Lingkungan

SUNANTO
L4K007011

PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008

TESIS

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN**
(Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat)

Disusun oleh :

SUNANTO
L4K007011

Mengetahui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Ir. Bambang Suryanto, MS. PSL.

Dra. Sri Suryoko, M.Si.

Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN (Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat)

Disusun oleh :

SUNANTO
L4K007011

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
pada tanggal 28 Juli 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

Tanda tangan

Prof. Ir. Bambang Suryanto, MS. PSL.

.....

Anggota

1. Dra. Sri Suryoko, M.Si.

.....

2. Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

.....

3. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

.....

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh Magister dari Program Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Juli 2008

Sunanto

RIWAYAT HIDUP



SUNANTO, lahir di Plumbon (salah satu Kecamatan di Kabupaten Cirebon–Jawa Barat) tanggal 09 Desember 1974. Anak pertama dari lima bersaudara keluarga H. Rasita dan Hj. Tijem. Menamatkan pendidikan dasar di SDN Marikangen II tahun 1987, selanjutnya pada tahun 1990 tamat sekolah menengah pertama pada SMPN 1 Plumbon dan tahun 1993 tamat sekolah lanjutan atas pada SMAN 1 Cirebon. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Fakultas Kehutanan (Fahutan) Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan (KSH) dan lulus pada Pebruari 1998. Pada tahun 1999 diangkat sebagai CPNS Departemen Kehutanan dan Perkebunan, ditempatkan pada Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Barat dan dipekerjakan (DPK) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun itu pula ditugaskan pada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semitau di Semitau Kabupaten Kapuas Hulu. Sejak era otonomi daerah tahun 2001 dialitugaskan menjadi pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pada bulan Pebruari 2006 pindah tugas pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Sejak bulan Agustus 2007 mendapat kesempatan tugas belajar pada Program Magister Ilmu Lingkungan (MIL) Universitas Diponegoro Semarang dengan pembiayaan *cost-sharing* antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas.

PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini kupersembahkan untuk :

*Ayahanda H. Rasita dan ibunda Hj. Tijem yang selalu mendo'akan,
dan mencurahkan perhatian serta kasih sayang yang tiada henti.*

*Istriku tercinta Endang Yulia Lestari, S.H. yang selalu sabar dan
senantiasa berdo'a untuk kesuksesanku.*

*Putraku tersayang Muh. Thoriq Dzaki Adiprabowo dan Muh.
Akrom Haqqani Dwikuntoro, karena kerinduanmu memberikan
inspirasi dan kekuatan untuk terus melangkah maju.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang dengan judul "Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan : Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat".

Kami yakin penulisan tesis ini banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca. Namun terlepas dari itu, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan studi dan tesis ini. Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Ir. Bambang Suryanto, M.S., PSL. selaku Pembimbing Utama yang bermurah hati memberikan banyak masukan dan pengarahan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis dan studi tepat waktu sesuai program 13 bulan.
3. Ibu Dra. Sri Suryoko, M.Si. selaku Pembimbing Kedua yang penuh kesabaran membimbing dan memberi dorongan semangat pada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Lingkungan UNDIP yang telah memberikan ilmu dan membuka wawasan baru bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Pengelola Magister ilmu Lingkungan UNDIP yang banyak membantu kelancaran administrasi dan perkuliahan.

7. Rekan-rekan di Bapedalda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang banyak membantu penyediaan data dari masa perkuliahan hingga dalam penulisan tesis.
8. Sekretaris Camat Rasau Jaya, Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Sekretaris Desa Rasau Jaya 1, Kepala Desa Rasau Jaya 2, Sekretaris Desa Rasau Jaya 3, Kepala Desa Bintang Mas dan Kepala Desa Pematang Tujuh, serta masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya yang mengizinkan dan mendukung dilaksanakannya penelitian diwilayahnya.
9. Teman-teman satu angkatan 17 Kelas Kerjasama Bappenas, yang banyak memberikan motivasi, do'a dan keceriaan selama masa perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan moril maupun materi kepada penulis selama penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Semarang, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Mengenai Peran Serta Masyarakat	6
2.1.1. Pengertian Peran Serta Masyarakat	6
2.1.2. Bentuk dan Jenis Peran Serta Masyarakat ...	7
2.1.3. Tingkat Peran Serta Masyarakat	7
2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat	8
2.1.5. Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaa ... Pembangunan	10
2.2. Tinjauan Mengenai Kebakaran Lahan	16
2.2.1. Pengertian Lahan	16
2.2.2. Gambut dan Lahan Gambut	17
2.2.3. Pembakaran dan Kebakaran Lahan	18
2.2.4. Kebakaran Lahan Gambut	19
2.2.5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan	21
2.2.6. Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan .. dan Penanggulangan Kebakaran Lahan	22
2.2.7. Kelompok Peduli Api	23
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	26
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	26
3.3. Lokasi Penelitian	26
3.4. Jenis dan Sumber Data	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data	28

3.6. Teknik Analisa Data	29
3.7. Alur Pikir Penelitian	31

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	32
4.1.1. Letak Wilayah Penelitian	32
4.1.2. Curah Hujan	33
4.1.3. Kependudukan	33
4.1.4. Mata Pencaharian dan Tingkat Pendapatan ...	34
4.1.5. Jenis Tanah	35
4.1.6. Penggunaan Lahan	36
4.2. Sistem Pertanian di Rasau Jaya	38
4.2.1. Sistem Pertanian Padi di Kecamatan Rasau Jaya	38
4.2.2. Sistem Pertanian Jagung di Kecamatan Rasau Jaya	44
4.3. Pertanian Semusim, Asap dan Antisipasi	
Kebakaran Lahan	52
4.3.1. Asap di Kecamatan Rasau Jaya	53
4.3.2. Sistem Pembakaran Lahan Pertanian dan Antisipasinya di Kecamatan Rasau Jaya	56
4.3.3. Kesepakatan Masyarakat dan Aturan Desa Tentang Kebakaran Lahan Pertanian	59
4.3.4. Penanggulangan Kebakaran Lahan Pertanian di Kecamatan Rasau Jaya	62
4.4. Tanaman Tahunan dan Hortikultura Sebagai alterna tif Pencegahan Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya	64
4.5. Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya	69
4.5.1. Kebakaran di Lahan Tidur	69
4.5.2. Penanggulangan Kebakaran di Lahan Tidur ...	72
4.6. Persepsi Masyarakat Kecamatan Rasau Jaya	
terhadap Asap, Pembakaran dan Kebakaran Lahan ..	75
4.7. Program Pemerintah Terkait dengan Upaya Pence- gahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan	77
4.8. Pembentukan Kelompok Peduli Api (KPA) sebagai ... Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Keba- karan Lahan	79
4.8.1. Dasar Pembentukan KPA	79
4.8.2. Tujuan Pembentukan KPA	79
4.8.3. Tugas Pokok KPA	80
4.8.4. Pendanaan dan Pembinaan KPA	80
4.9. Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya	81
4.9.1. Proses Pembentukan KPA	81
4.9.2. Keanggotaan KPA	84

4.9.3. Rencana Kerja dan Kegiatan yang dilakukan... Kelompok Peduli Api	85
4.10. Analisis Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kecama- tan Rasau Jaya	86
4.10.1. Penyiapan Lahan dengan Cara Bakar masih Dilakukan dalam Bertani Tanaman Semusim di Kecamatan Rasau Jaya	86
4.10.2. Analisis Pencegahan dan Penanggulangan ... Kebakaran di Kecamatan Rasau Jaya	91
4.11. Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan. dan Penanggulangan Kebakaran Lahan melalui Pembentukan Kelompok Peduli Api (KPA) di Keca- ... matan Rasau Jaya	93
4.12. Usulan Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebaka- ran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya	100

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	115
5.2. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1.	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan	1
3.1.	Nara Sumber Penggali Informasi	23
4.1.	Luas Desa di Kecamatan Rasau Jaya	32
4.2.	Rata-rata Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan	33
4.3.	Kepadatan Penduduk menurut desa di Kecamatan Rasau Jaya	34
4.4.	Pola Penggunaan Lahan di Kecamatan Rasau Jaya	36
4.5.	Pertanian Padi di Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2007	38
4.6.	Analisis Usaha Tani Padi dengan Sistem Tanpa Olah Tanah ... untuk Luasan Tanam Satu Hektar di Desa Rasau Jaya 3	42
4.7.	Analisis Usaha Tani Padi dengan Sistem Olah dengan Cara ... dicangkul untuk Luasan Tanam Satu Hektar di Desa Rasau ... Jaya 3	43
4.8.	Pertanian Jagung di Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2007	44
4.9.	Analisa Usaha Tani Jagung Manis untuk Luasan Tanam Satu Hektar di Desa Rasau Jaya 1 (Tanam pada Areal Bekas ... Tanaman Padi)	46
4.10.	Analisis Usaha Tani Jagung Pipil untuk Luasan Tanam Satu Hektar di Desa Rasau Jaya 3	51
4.11.	Analisis Usaha Tani Jagung Pipil untuk Luasan Tanam Satu Hektar di Desa Rasau Jaya 3 (lahan bawas)	52
4.12.	Luas Tanaman Tahunan di Kecamatan Rasau Jaya	64
4.13.	Luas Tanaman Buah-buahan di Kecamatan Rasau Jaya	66
4.14.	Luas Tanaman Hortikultura di Kecamatan Rasau Jaya	68
4.15.	Luas Lahan Terlantar di Kecamatan Rasau Jaya	70
4.16.	Luas Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya	75
4.17.	Daftar Program Kerja/ Kegiatan Dinas/ Intansi Terkait Pengen- dalian Kebakaran Lahan	78
4.18.	Matrik SWOT Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Dampak Asap di Kecamatan Rasau Jaya	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
2.1.	Eight rungs on The Ledger of Citizen Paticipation	7
3.1.	Diagram Alir / Kerangka Penelitian	31
4.1.	Peta Lokasi Penelitian	37
4.2.	Petani di Desa Rasau Jaya 1 sedang Menanam Jagung	47
4.3.	Tanaman Jagung di Desa Pematang Tujuh	47
4.4.	Tanaman Jagung Pipil pada Lahan yang Dipersiapkan dengan.. Cara Dibakar di Desa Rasau Jaya Umum	50
4.5.	Tanaman Jagung Pipil pada Lahan yang Dipersiapkan dengan Cara Tidak Dibakar di Desa Rasau Jaya 3.....	50
4.6.	Penyiapan Lahan dengan Cara Dibakar	55
4.7.	Kebakaran Pada Lahan Tidur	55
4.8.	Tanaman Karet Sudah Menghasilkan	65
4.9.	Tanaman Kelapa di Desa Bintang Mas	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Wawancara dengan Sekretaris Camat Rasau Jaya dan Sekretris Desa Rasau Jaya 1.
2. Wawancara dengan Ketua KPA Desa Rasau Jaya 1 dan Anggota KPA Bintang Mas.
3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rasau Jaya 3 dan Masyarakat Desa Rasau Jaya 1.
4. Wawancara dengan Masyarakat Desa Rasau Jaya 3 dan Masyarakat Desa Rasau Jaya Umum.
5. Daftar Nama-Nama Anggota Kelompok Peduli Api (KPA) di Kecamatan Rasau Jaya.
6. Pedoman Wawancara untuk Pengambilan Data Lapangan di Kecamatan Rasau Jaya.
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tk I Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 164 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah (PUSDALKARHUTLADA) Provinsi Kalimantan Barat
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 267 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Action Plan Sterilisasi Kawasan Bandara Supadio Pontianak dari Asap Akibat Kebakaran Lahan

ABSTRAK

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN

(Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat)

Setiap tahun terutama pada saat musim kemarau Kalimantan Barat selalu diselubungi kabut asap akibat pembakaran atau kebakaran hutan dan lahan. Sejak tahun 2004 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan khususnya pada 9 kecamatan rawan kebakaran lahan yang menjadi penyebab utama terjadinya kabut asap di sekitar kawasan Bandara Supadio Pontianak, namun jumlah titik api dan kasus kebakaran di lahan-lahan pertanian masih signifikan dan belum membuahkan hasil yang optimal. Berpijak pada kenyataan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mencari akar permasalahan dan faktor penyebab belum efektifnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April 2008.

Tipe penelitian adalah deskriptif. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang mengetahui dan terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan serta didukung data hasil kegiatan observasi lapangan. Data yang terhimpun kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi. Pemilihan alternatif kebijakan dalam upaya penanganan kebakaran lahan menggunakan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) sering terjadinya kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya disebabkan masih dilakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar terutama untuk kegiatan pertanian tanaman pangan semusim; kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya adalah kebakaran pada lahan-lahan pertanian yang dibiarkan kosong, (2) pencegahan kebakaran lahan telah diupayakan melalui pembakaran terkendali, penetapan aturan desa dan kesepakatan masyarakat yang terbukti efektif mencegah kebakaran lahan; upaya penanggulangan kebakaran lahan telah dilaksanakan masyarakat secara spontan dan bergotong royong dengan memprioritaskan lahan yang memiliki potensi ekonomi; pelibatan masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui pembentukan Kelompok Peduli Api hingga saat ini belum efektif karena masih bersifat formalitas, (3) masih sering terjadinya kebakaran lahan bukan dikarenakan kurangnya peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan namun lebih karena adanya perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat memandang bahwa kebakaran yang saat ini terjadi adalah kebakaran pada lahan pertanian yang dibiarkan kosong sehingga tidak perlu dipadamkan karena tidak adanya aset ekonomi yang perlu diselamatkan, selain itu lahan pertanian yang dibiarkan kosong juga merupakan sumber bersarangnya hama pertanian yang sangat merugikan masyarakat. Bagi pemerintah semua kebakaran perlu diupayakan untuk dipadamkan sehingga kebakaran di lahan pertanian yang dibiarkan kosong pun haruslah menjadi fokus penanganan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diusulkan : mengintegrasikan kebijakan pemerintah dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan masyarakat dengan melakukan revitalisasi pembentukan Kelompok Peduli Api, peningkatan keterampilan masyarakat dan sarana penanggulangan kebakaran lahan, peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian tanpa bakar, pengintegrasian antara pertanian dan peternakan serta penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya pertanian.

Kata kunci : *peran serta masyarakat, pembakaran dan kebakaran lahan, bentuk peran serta, usulan pengelolaan.*

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN PREVENTING AND OVERCOMING LAND FIRE

(A Case Study of *Kelompok Peduli Api* in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency,
West Kalimantan Province)

Every year especially at dry season West Kalimantan is always covered by haze fog, caused by forest and land fires. Since 2004 the government of West Kalimantan Province has been encouraging community participatory to prevent and overcome land fire, especially at nine sub-districts which have potential for land fire and that would be the main cause of haze fog disaster at around Supadio Airport of Pontianak. However the number of hot spot and land clearing on agricultural lands are still significant and has not given optimal result. Based on the reality, the aims of this research are to indentify causes of land fire and effectivity of community participatory to prevent and overcome land fire. The research was held from March to April 2008.

Type of this research is descriptive. Interviews with the key persons and field observation method are employed. These data were analyzed by a triangulation technique. The choice on alternative policies in the effort of land fire prevention applied a SWOT analysis.

The results of research shows : (1) Local people have been doing land preparation with burning method, especially for a season food plant farming; The land fire at Rasau Jaya sub-district was firing on empty land farming, (2) The prevention of land fire has been using controlled land burning, village rule and community agreement that approved effective to prevent land fire; The effort to deal with land fire has been done by local people with spontaneous and mutual co-operation which had priority for economic potential land; Community participatory has been sponcored by the government by forming *Kelompok Peduli Api*, Which has not been effective because of its formality status, (3) Land fire still occurs very often and mostly is not caused by low community participatory to prevent and overcome land fire but caused by the difference point of view between the local people and the government. The Local people see the fire on empty land farming doesn't need to be extinguished because they don't have economic asset to secure. Beside the empty land farming is a breeding place of farming disease which are very detriment for the local people. For the government, every fire cases should be overcome, therefore fire even on empty land farming also become focus to overcome.

To deal with the problems it is recommended : integration government policy and local people environmental management by revitalizing *Kelompok Peduli Api*, skilled improvement society to overcome land fire, upgrading ability of agricultural farm without burning, integration between ranch and agriculture, and zoning system in peatland for farming.

Keywords : *community participation on land fire, fire and land burning, forms of participatory, planed management.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Barat secara geografis berada pada 2°08 LU – 3°05 LS dan 108°30 BT – 114°10 BT memiliki luas wilayah 146.807 km² yang terdiri dari 2 Kota dan 12 Kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 3.722.172 jiwa. Setiap tahun pada saat musim kemarau sebagian besar wilayah Kalimantan Barat selalu diselimuti kabut asap yang berasal dari kegiatan pembakaran lahan atau kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap yang ditimbulkan tidak hanya mengakibatkan penurunan kualitas udara di tingkat lokal. Kalimantan Barat juga ikut memberikan andil dalam penurunan kualitas udara di tingkat nasional dan bahkan regional ASEAN.

Data luas lahan dan hutan terbakar yang dihimpun Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, selama 4 tahun (2003 – 2006) menunjukkan adanya peningkatan luasan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1. Tahun 2006 peningkatan luasan bahkan hampir empat kali lipat dibandingkan Tahun 2003.

Tabel 1.1. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Tahun	Luas (ha)
1	2003	967,75
2	2004	1.027,00
3	2005	1.686,00
4	2006	3.489,96

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2006

Jika dibandingkan dengan bencana besar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 yang mencapai luasan 45.954,46 ha untuk Provinsi Kalimantan Barat (di seluruh Indonesia sampai dengan 10 juta ha dengan volume satu Giga ton karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer), luasan sebagaimana

tersebut di atas tidaklah seberapa, namun demikian amat perlu diwaspadai kecenderungan peningkatannya.

Berdasarkan data rekapitulasi titik api (*hotspot*) Provinsi Kalimantan Barat per Kabupaten diketahui bahwa pada tahun 2004 terdapat sejumlah 4.784 titik dengan sebaran *hotspot* sebanyak 65% terjadi pada non kawasan hutan dan 35% pada kawasan hutan. Pada tahun 2005 jumlah *hotspot* adalah 143 titik dengan sebaran 81% pada non kawasan hutan dan 19% kawasan hutan. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah *hotspot* meningkat yaitu sejumlah 11.517 titik (lebih dari dua kali dibandingkan Tahun 2004) dengan sebaran 48% terjadi pada non kawasan hutan dan 52% pada kawasan hutan. *Hotspot* yang terjadi pada fungsi kawasan hutan sebagian juga merupakan akibat dari kegiatan pertanian. *Hotspot* yang tercatat menerangkan bahwa telah terjadi kebakaran yang disebabkan antara lain karena kesengajaan yaitu oleh pengusaha untuk kegiatan pembersihan lahan dan oleh masyarakat untuk kegiatan perladangan atau pun karena unsur ketidaksengajaan.

Hotspot yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan kebakaran yang luas dan dapat menurunkan kualitas lingkungan termasuk menimbulkan dampak asap yang tentunya harus ditanggulangi. Penanggulangan harus dilakukan secara tepat dan cepat untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Mengingat kerusakan dan dampak yang diakibatkan sangat merugikan baik dari sisi ekonomi maupun ekologi yang mengganggu peranan dalam keseimbangan lingkungan di Kalimantan Barat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, di antaranya melalui kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning policy*). Kebijakan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan

Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan serta Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal perusahaan perkebunan/ kehutanan relatif lebih mudah. Aturan pelaksanaan telah jelas sehingga segala bentuk penyimpangan akan relatif lebih mudah dikontrol dan pemberian sanksi dapat diterapkan dengan lebih tegas dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi di lahan milik penduduk dan lahan pertanian masyarakat yang terlantar. Hal mana akan lain bagi masyarakat/ peladang berpindah yang telah terbiasa membuka lahan dengan cara membakar, mereka tidak memiliki alternatif lain dalam membuka lahannya, sehingga masyarakat/ peladang berpindah akan tetap menggunakan api dalam setiap penyiapan lahan untuk kegiatan pertaniannya. Melihat kondisi tersebut karenanya peran serta masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat sejak akhir tahun 2004 telah mendorong peran serta masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui pembentukan Kelompok Peduli Api khususnya pada 9 Kecamatan rawan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi penyebab utama terjadinya kabut asap di sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dengan harapan kegiatan pembukaan lahan yang akan diusahakan masyarakat dapat dilakukan tanpa bakar, atau setidaknya pembakaran lahan yang dilakukan terkendali dengan baik serta munculnya kontrol dari masyarakat sendiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Urgensi lain atas peran serta masyarakat adalah karena keberadaan mereka yang banyak tersebar di daerah yang

berdekatan dengan daerah rawan kebakaran sehingga berpotensi untuk melakukan pemadaman awal dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas.

1.2. Perumusan Masalah

Sejak akhir tahun 2004 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mendorong peran serta masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui pembentukan Kelompok Peduli Api, namun jumlah titik api terus mengalami peningkatan (bahkan pada Tahun 2006 data *hot spot* menunjukkan adanya peningkatan sebanyak dua kali lipat lebih yaitu 11.517 titik dibandingkan Tahun 2004 yang hanya sebanyak 4.784 titik) dan kasus kebakaran di lahan-lahan pertanian masih signifikan dan belum membuahkan hasil optimal, termasuk di Kecamatan Rasau Jaya. Berdasarkan uraian latar belakang, fokus penelitian dan permasalahan tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa di Kecamatan Rasau Jaya sampai dengan saat ini masih terjadi kebakaran lahan ?
2. Bagaimana peran serta masyarakat dan Kelompok Peduli Api dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tentang peranserta masyarakat dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, adalah :

1. Menggali informasi lapangan tentang kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya.

2. Menggali informasi upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang telah dilakukan masyarakat dan Kelompok Peduli Api.
3. Menemukan dan menganalisa faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dan Kelompok Peduli Api dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya.
4. Memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan yang telah dilakukan masyarakat, sehingga akan menjadi bahan masukan dan alternatif pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan program pengelolaan lingkungan, khususnya dalam mencegah dan mengurangi kebakaran lahan yang selalu terjadi di Kalimantan Barat ;
2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan ; dan
3. Sebagai karya ilmiah, penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Serta Masyarakat

Tinjauan peran serta masyarakat pada bab ini akan menguraikan mengenai pengertian peran serta masyarakat, bentuk dan jenis peran serta masyarakat, tingkat peran serta masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

2.1.1. Pengertian Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat adalah suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat bedasar atas keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan (Syam, 2005). Sedangkan menurut Oetomo dalam Budiarti (2006) peran serta seseorang / masyarakat diartikan sebagai bentuk penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari suatu pihak ke pihak lain.

Keith Davis dalam Harthayasa (2002) menyebutkan bahwa dalam peran serta masyarakat terdapat adanya keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan pada kelompok dalam upaya mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan. Selanjutnya Sastropoetro dalam Hardiati (2007) menambahkan bahwa keterlibatan diri / ego masyarakat yang terlibat dalam peran serta memiliki sifatnya lebih dari sekedar keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, namun juga keterlibatan tersebut meliputi pikiran dan perasaannya.

2.1.2. Bentuk dan Jenis Peran Serta Masyarakat

Menurut Parwoto dalam Irawan (2005), bentuk kontribusi peran serta dapat berbentuk gagasan, tenaga dan materi. Adapun jenis-jenis peran serta menurut Sastropetro dalam Hardiati (2007) meliputi : (a) pikiran (psychological participation), (b) tenaga (physical participation), (c) pikiran dan tenaga (psychological and Physical participation), (d) keahlian (participation with skill), (e) barang (material participation) dan (f) uang (money participation).

2.1.3. Tingkat Peran Serta Masyarakat

Arnstein dalam Hadi (1999) menggolongkan tingkat peran serta masyarakat dalam program pembangunan menjadi delapan tingkatan berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan atau yang lebih dikenal dengan delapan jenjang peran serta masyarakat (*eight rungs on the ladder of citizen participation*), yaitu : (a) *manipulation* atau manipulasi, (b) *therapy* atau penyembuhan, (c) *informing* atau pemberian informasi, (d) *consultation* atau konsultasi, (e) *placation* atau penunjukan, (f) *partnership* atau kemitraan, (g) *delegated power* atau pelimpahan kekuasaan dan (h) *citizen control* atau masyarakat yang mengontrol, sebagaimana gambar 2.1. dibawah ini.

8	Citizen Control/ Kontrol Masyarakat	Degree of citizen power/ Derajat kekuasaan
7	Delegated Power/ Delegasi Kekuatan	
6	Partnership/ Kemitraan	Masyarakat
5	Placation/ Plakasi/ Penunjukan	Degree of tokenisme/ Derajat tokenisme
4	Consultation/ Konsultasi	
3	Informing/ Penginformasian	Non Participation/ Bukan Partisipasi
2	Therapy/ Terapi	
1	Manipulation/ Manipulasi	

Gambar 2.1. Eight rungs on The Ledder of Citizen Paticipation (Arnstein, 1969 dalam Hadi, 1999)

Selanjutnya Hadi (1999) menerangkan bahwa pada tingkat paling bawah (1) manipulation dan (2) therapy disimpulkan sebagai tingkat bukan peran serta. Tujuan pada tingkat ini untuk “mendidik” dan “mengobati” peserta dalam peran serta. Tingkat (3) informing dan (4) consultation disebut tokeinisme atau sekedar formalitas yang menungkinkan masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, namun pendapat mereka belum tentu menjadi bahan pengambilan keputusan. Tingkat (5) placation dipandang sebagai tokeinisme yang lebih tinggi dimana masyarakat memiliki hak memberikan advice tetapi kekuasaan pengambilan keputusan tetap ditangan pemrakarsa kegiatan. Pada tingkat (6) partnership masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat trade-off para pemegang kekuasaan. Pada tingkat (7) delegated power dan (8) citizen control, masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

2.1.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat menurut Slamet dalam Sihono (2003) dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor internal tersebut menurut Liwin dalam Adriansyah (2004) adalah : (a) jenis kelamin, (b) usia, (c) tingkat pendidikan, (d) tingkat penghasilan, (e) mata pencaharian, dan (f) status kepemilikan lahan.

Selain faktor internal yang disebutkan diatas, menurut Thoha (2002) faktor internal lain yang mempengaruhi peran serta masyarakat adalah : (a) persepsi, (b) ikatan fikologis dan (c) kepemimpinan. Persepsi pada hakikatnya merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Informasi

tersebut dapat melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi akan melandasi tindakan dan interaksi seseorang dalam berperan serta atau terlibat dalam suatu kegiatan. Peran serta juga dipengaruhi oleh seringnya seseorang berinteraksi yang membawa konsekuensi semakin kuatnya ikatan psikologis dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini hubungan yang didasarkan kesamaan kepentingan antar masyarakat terhadap suatu obyek yang perlu diselamatkan dari ancaman bahaya kebakaran lahan maka makin tinggi ikatan psikologis dengan lingkungan yang berpengaruh pada besarnya keinginan dan dorongan untuk terlibat dalam kegiatan bersama. Selain itu yang menggerakkan keaktifan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan bersama adalah pengaruh kepemimpinan. Hal ini dapat dimengerti karena pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain yang dipimpinnya.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peran serta menurut Sunarti dalam Hardiati (2007) adalah semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan mempunyai pengaruh terhadap program. Pengaruh disini adalah kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh *stakeholder* atas program, berupa kekuatan untuk mengendalikan keputusan yang dibuat dan memfasilitasi pelaksanaan program. *Stakeholder* tersebut antara lain : lembaga pendampingan (LSM), instansi pemerintah ataupun lembaga keuangan.

Berkaitan dengan faktor eksternal instansi pemerintah, Kurniawan (2004) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa komitmen pemerintah yang belum optimal menyebabkan koordinasi antar dinas / instansi tidak optimal yang

mengakibatkan menyebabkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan program dan kurangnya komitmen dalam pengalokasian dana berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan.

2.1.5. Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Menurut Keraf (2002) paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Sedangkan Purba (2002) menyatakan untuk menciptakan *clean environmental management* dan *good environmental governance*, menuntut persyarat adanya keterbukaan, kesetaraan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta akuntabilitas.

Lahirnya pembangunan partisipasi khususnya dalam pengelolaan lingkungan dilatarbelakangi oleh program, proyek dan kegiatan pembangunan yang selama ini dilakukan sering gagal. Pengelolaan lingkungan yang selama ini dikembangkan dan dipraktekan cenderung mengarah pada dua pendekatan yang bertolak belakang yakni *state-based* dan *community-based*. Kedua pendekatan ini, cenderung merupakan pendekatan pengelolaan lingkungan yang berbasis pada aktor-aktor tunggal.

Model *state-based* seringkali mengalami kegagalan atau hambatan hal tersebut dikarenakan model tidak fleksibel, lemah dalam kapasitas kelembagaan, kurang tepatnya disain dan implementasi serta kurangnya partisipasi masyarakat (Oetomo, 1997 dalam Budiarti 2006). Hal ini dikarenakan pendekatan *state based* cenderung bersifat *top-down* (sentralistis) dan beranggapan bahwa penduduk lokal tidak

punya kemampuan dalam sumberdaya dan pengetahuan yang dibutuhkan, untuk memberikan kontribusi efektif dalam proses perencanaan.

Pendekatan *state-based* yang cenderung *top-down* ini umumnya digunakan dalam program-program yang relative cepat : menciptakan sentralitas dari sedikit “agen” pembangunan sehingga menghasilkan kemudahan koordinasi yang dipandang akan membuat efisiensi sumberdaya manusia dan tenaga. Namun demikian dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala, khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat.

Munggoro dan Bien (1999) dalam Budiarti (2006), menyatakan bahwa kegagalan dan ketidakefektifan pendekatan *state-based* dikarenakan keterbatasan birokrasi dalam pemenuhan kebutuhan standar pengelolaan lingkungan seperti : (1) keterbatasan pengetahuan, (2) keterbatasan informasi, (3) rendahnya kualitas sumberdaya manusia, (4) buruknya kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan dan pengaturan sumberdaya alam dan (5) kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pengelolaan yang berimplikasi pada tidak adanya dukungan masyarakat lokal.

Sedangkan pendekatan *community based* menekankan pada pemberian kewenangan dan otoritas pada komunitas untuk lebih berperan di dalam pengelolaan lingkungan. Pendekatan ini bersifat *bottom up* karena aspirasi, kewenangan, dan otoritas pengelolaan lingkungan lebih bersumber dari bawah atau masyarakat, tidak sebagaimana *state based* yang cenderung dari atas. Pendekatan *community based*, menekankan masyarakat berperan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam manajemen, sedang

pemerintah dan swasta berpartisipasi secara tidak langsung. Pemerintah berperan sebagai koordinator dan pemberi bantuan dalam proses konsultasi, sedangkan kelompok masyarakat sebagai pelaku/pelaksana yang berperan sangat dominan dan LSM sebagai pemberi masukan dalam pelaksanaannya (Oetomo 1997 dalam Budiarti 2006).

Namun demikian, pendekatan *community based* juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu : (1) lemahnya institusi lokal (terutama kurangnya mekanisme resolusi konflik), (2) keterbatasan informasi dan teknologi, (3) kurangnya sistem pendukung seperti informasi pasar, peningkatan kapasitas, *technical assistance*, fasilitas kredit dan kebijakan.

Atas kelemahan kedua pendekatan tersebut, muncul pendekatan kemitraan dan partisipasi. Pendekatan ini mempunyai fungsi penting karena ; (1) saling melengkapi, menutup kekurangan masing-masing aktor serta memberdayakan aktor yang kurang diuntungkan, (2) sebagai pendekatan yang fleksibel untuk mengurangi kegagalan pencapaian tujuan; dan (3) efisiensi. Oleh karena itu perlu dilakukan reorientasi terhadap strategi pembangunan masyarakat yang lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (Hikmat, 2004).

Tjokroamijoyo (1998) menguraikan kaitan partisipasi dengan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses sosial hubungan antar kelompok kepentingan dalam masyarakat.

- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.
- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Dalam hal partisipasi menurut Suparjan dan Suyatno (2003) masyarakat hendaknya perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan, yaitu : (1) identifikasi permasalahan, dimana masyarakat bersama perencana ataupun pemegang otoritas kebijakan tersebut mengidentifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, identifikasi peluang, potensi dan hambatan, (2) proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi dengan berdasar pada hasil identifikasi, (3) pelaksanaan proyek pembangunan, (4) evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, apakah pembangunan memberikan hasil guna bagi masyarakat ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, (5) mitigasi, yakni kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pembangunan, (6) monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan. Dalam tahap ini juga dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan situasi dan

informasi terakhir dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pendekatan partisipatif memberikan perhatian pada proses pengembangan pola pikir dan pola sikap, pengkayaan pengalaman dan pengetahuan serta proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperkuat asosiasi masyarakat dan mekanisme baru sehingga dengan mekanisme ini lembaga pemerintah dapat mempertanggung jawabkan aksinya. Pendekatan partisipatif memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan (*sharing idea*), jalin kepentingan (*knitting interest*) dan pepaduan karya (*synergy of action*) diantara stakeholders, terutama pemberian kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan (Thompson, 1999 dalam Budiarti 2006). Pendekatan partisipatif dapat digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan terjadinya kegagalan/ hambatan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Hal ini disebabkan pendekatan partisipatif mendorong munculnya partisipasi yang lebih besar dalam masyarakat mulai dari perencanaan sampai implementasi. Selain tentunya, partisipasi juga dapat mengembangkan kemandirian, mengurangi ketergantungan serta mewujudkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (Glaser & Joseph, 1997 dalam Budiarti 2006).

Salah satu teknik upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah *Participatory Rural Appraisal* (Hikmat, 2004). Tujuan utama *Participatory Rural Appraisal* adalah menghasilkan rancangan program yang relevan dengan aspirasi dan keadaan masyarakat (Purba, 2002). Orientasi *Participatory Rural Appraisal* adalah untuk memfasilitasi atau meningkatkan

kesadaran masyarakat dan kemampuan mereka untuk menangkap isu dan persoalan. Perhatian khusus diberikan agar masyarakat lokal dapat melakukan analisis secara mandiri serta menyampaikan temuan-temuannya. Peran pihak luar atau peneliti hanya sebagai katalis, bukan sebagai ahli. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat lokal juga ditujukan untuk membantu memberdayakan masyarakat (Mitchel, et. all. 2007).

Adapun prinsip-prinsip *Participatory Rural Appraisal* yang harus dilakukan adalah :

- a. Masyarakat dipandang sebagai subyek bukan obyek;
- b. Praktisi berusaha menempatkan posisi sebagai “*insider*” bukan “*outsider*”;
- c. Dalam menentukan parameter yang standar, lebih baik mendekati benar dari pada benar-benar salah ;
- d. Masyarakat yang membuat peta, model, diagram, pengurutan, member angka atau nilai, mengkaji atau menganalisis, memberikan contoh, mengidentifikasi masalah, menyeleksi prioritas masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang dan merencanakan kegiatan aksi ;
- e. Pelaksanaan evaluasi, termasuk penentuan indikator keberhasilan dilakukan secara partisipatif.

Pendekatan terhadap kegunaan teknik-teknik *Participatory Rural Appraisal* tersebut dengan mudah dapat dikaji melalui pendekatan sistem sosial (Hikmat, 2004)

2.2. Tinjauan Mengenai Kebakaran Lahan

Tinjauan mengenai kebakaran lahan akan menguraikan tentang, pengertian lahan, gambut dan lahan gambut, pembakaran lahan dan kebakaran lahan, kebakaran lahan gambut, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan, peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan, dan kelompok peduli api.

2.2.1. Pengertian Lahan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, yang dimaksud dengan lahan adalah "suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat".

Sedangkan menurut Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, lahan adalah "suatu areal diluar kawasan hutan, baik yang bervegetasi (alang-alang, semak belukar, tanaman budidaya dan lain-lain) maupun yang tidak bervegetasi yang diperuntukan bagi pembangunan dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Transmigrasi, Pertambangan dan lain-lain". Berdasarkan material pembentukannya, lahan dibedakan menjadi dua yaitu: lahan kering (tanah mineral) dan lahan gambut (Limin, 2006).

Dari beberapa definisi tersebut maka yang dimaksud dengan lahan adalah suatu areal yang berada diluar kawasan hutan baik berupa tanah mineral maupun gambut yang diperuntukan untuk kegiatan budidaya.

2.2.2. Gambut dan Lahan Gambut

Menurut Depnakertrans (2007) gambut adalah tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 30 %, sedangkan lahan gambut adalah lahan yang ketebalan gambutnya lebih dari 50 cm. Lahan yang ketebalan gambutnya kurang dari 50 cm disebut lahan bergambut. Gambut terbentuk dari hasil dekomposisi bahan-bahan organik seperti daun, ranting, semak belukar dan lain-lain, yang berlangsung dalam kecepatan lambat dan dalam suasana anaerob.

Berdasarkan ketebalannya, gambut dibagi menjadi empat tipe, yaitu : (1) gambut dangkal dengan ketebalan 0,5-1 m, (2) gambut sedang dengan ketebalan 1-2 m, (3) gambut dalam dengan ketebalan 2-3 m dan (4) gambut sangat dalam dengan ketebalan > 3 m.

Berdasarkan kematangannya, gambut dibedakan menjadi tiga, yaitu : (1) fibrik, apabila bahan vegetatif aslinya masih dapat diidentifikasi atau sedikit mengalami dekomposisi, (2) hemik apabila tingkat dekomposisinya sedang dan (3) saprik apabila tingkat dekomposisinya telah lanjut.

Tanah gambut umumnya memiliki pH rendah, kapasitas tukar kation (KTK) tinggi, kejenuhan basa rendah, kandungan K, Ca, Mg, P rendah, kandungan unsur mikro (Cu, Zn, Mn, dan B) rendah. Tanah gambut memiliki sifat penurunan permukaan tanah yang besar setelah dilakukan drainase, memiliki daya hantar hidrolik horizontal yang sangat besar dan vertikal sangat kecil, memiliki daya tahan rendah sehingga tanaman mudah tumbang/robah, dan memiliki sifat mengering tak balik yang menurunkan daya retensi air dan membuat peka erosi. Gambut dapat dimanfaatkan sebagai penyangga ekologi terutama sebagai kawasan tampung hujan, karena

kemampuannya menahan air, sebagai lahan pertanian / hutan, sebagai medium pertanian / perkebunan / hortikultura dan sebagai sumberdaya energi.

2.2.3. Pembakaran dan Kebakaran Lahan

Pembakaran dalam pengertian ini didefinisikan sebagai tindakan kesengajaan membakar yang dilakukan masyarakat dalam mengelola lahan untuk kegiatan pertanian / perladangan mereka. Sedangkan kebakaran didefinisikan sebagai suatu proses pembakaran yang menyebar secara bebas, tidak tertekan yang mengkonsumsi bahan bakar seperti : serasah, rumput, humus, ranting-ranting kayu mati, tiang, gulma, semak, dedaunan serta pohon-pohon segar (Dharmawan, 2003). Kebakaran lahan menurut Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998, didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerugian obyek pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi dan atau ekologis/ lingkungan hidup”.

Departemen Pertanian (2007) mencatat bahwa pembukaan lahan dengan cara bakar sampai saat ini masih terus dilakukan. Kegiatan pembukaan lahan yang kurang bijaksana, yang dilakukan masyarakat lebih dikarenakan kondisi sosial ekonomi dan adanya anggapan bahwa abu sisa pembakaran bisa menjadi pupuk. Disamping itu belum adanya teknologi pembukaan lahan yang murah, mudah dan secepat api juga masyarakat melakukan pembakaran ketika mempersiapkan lahannya untuk usaha pertanian atau perkebunan.

Selain itu, adanya perusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan yang memanfaatkan masyarakat secara sembunyi-sembunyi melakukan pembukaan lahan dengan

cara membakar, agar biaya pembukaan lahan dapat ditekan, juga telah memicu terjadinya kebakaran lahan dan kebun. Atas hal tersebut diatas pada dasarnya masyarakat petani/ peladang, pengusaha hutan tanaman industri dan perkebunan besar meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan dan dampak buruk yang diakibatkannya termasuk terjadinya bencana asap.

2.2.4. Kebakaran Lahan Gambut

Kebakaran yang tidak terkendali menyebabkan api menjalar kemana-mana, terlebih lagi terjadi pada lahan gambut. Di Kabupaten Kubu Raya yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, setidaknya terdapat enam kecamatan yang patut diawasi karena berpotensi terjadi pembakaran hutan dan lahan yang akan berakibat menimbulkan kabut asap, yakni Kecamatan Sungai Raya, Terentang, Kubu, Rasau Jaya, Sungai Ambawang, dan Sungai Kakap. Enam kecamatan tersebut memiliki kondisi geografis berupa tanah gambut serta penduduk wilayah tersebut sebagian besar bekerja di sektor pertanian.

Kebakaran lahan gambut lebih berbahaya dibandingkan dengan kebakaran pada lahan kering (tanah mineral). Selain kebakaran vegetasi dipermukaan, lapisan gambut juga terbakar dan bertahan lama, sehingga menghasilkan asap tebal akibat pembakaran yang tidak sempurna.

Limin (2006) menyatakan bahwa kedalaman lapisan gambut terbakar rata-rata 22,03 cm (variasi antara 0 – 42,3 cm) namun pada titik tertentu kebakaran lapisan mencapai 100 cm. Oleh karena itu pemadaman kebakaran pada lahan gambut sangat sulit dan memerlukan banyak air. Untuk memadamkan total seluas satu meter persegi lahan gambut

diperlukan air sebanyak 200 – 400 liter. Terdapat sembilan ciri kebakaran pada lahan gambut : (1) kebakaran vegetasi di atas lapisan gambut, (2) lapisan gambut terbakar tergantung kedalaman air tanah, (3) kebakaran pada lapisan gambut sulit dipadamkan dan bertahan lama, (4) kebakaran menghasilkan asap tebal karena terjadi pembakaran tak sempurna, (5) api dapat merambat melalui lapisan bawah, walaupun vegetasi di atasnya belum terbakar atau masih segar, (6) banyak pohon tumbang dan pohon mati tetapi masih berdiri tegak, (7) terdapat vegetasi yang mudah terbakar, (8) bekas kebakaran gambut ditutupi arang, dan (9) penyemprotan air pada gambut yang sedang terbakar tidak hingga padam total, akan menyebabkan produk asap semakin tebal.

Dampak asap berikut unsur-unsur penyusunnya terhadap lingkungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat lokal, yaitu menghalangi pemandangan sampai dengan yang memungkinkan terjadinya pemanasan iklim global. Dampak buruk yang terjadi akibat kebakaran lahan meliputi berbagai sektor kehidupan, mulai dari gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, hambatan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan tingkat kunjungan pariwisata, dampak politik, ekonomi sampai pada gangguan terhadap kesehatan.

2.2.5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan

Pencegahan kebakaran telah diupayakan pemerintah melalui penetapan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar "*zero burning policy*" yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan serta Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Menurut Perda Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, adalah :

- a. Menetapkan lembaga PUSDALKARHUTLADA (Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah) Provinsi Kalimantan Barat, POSKOLAKDALKARHUTLADA (Pos Komando Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah) Kabupaten/ Kota, SATLAKDALKARHUTLA (Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) di tingkat Kecamatan;
- b. Membentuk Satuan Tugas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (SATGASDAMKARHUTLA);
- c. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan, pertanian, transmigrasi, kehutanan dan lain-lain baik yang dilakukan perusahaan dan masyarakat;

- d. Menginventarisik daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dan membuat peta kerawanan;
- e. Menyediakan peralatan pemadam kebakaran, baik peralatan perorangan maupun beregu;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga inti pemadam kebakaran hutan dan lahan terutama dari SATGASDAMKARHUTLA dan masyarakat;
- g. Melakukan kegiatan deteksi dini untuk mengetahui lebih awal kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Sedangkan upaya untuk mengatasi / menanggulangi kebakaran hutan dan lahan menurut Perda Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998, melalui usaha-usaha :

- a. Mengerahkan personil SATGASDAMKARHUTLA dan segenap upaya bantuan dalam bentuk tenaga baik dari masyarakat, aparat pemerintah baik sipil maupun TNI/Polri;
- b. Memobilisasi peralatan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pendukung lainnya pada lokasi kejadian;
- c. Mencari sumber penyebab terjadinya kebakarah hutan dan lahan;
- d. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

2.2.6. Peranserta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Guna mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan di areal pertanian masyarakat, maka sejak akhir tahun 2004 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mendorong peranserta masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui pembentukan Kelompok Peduli Api pada 9 Kecamatan rawan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi penyebab utama terjadinya kabut asap di sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak.

Sebagaimana disebutkan dalam Perda Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diperlukan adanya peranserta seluruh stakeholder termasuk masyarakat sekitar hutan dan lahan terutama pada daerah-daerah yang rawan kebakaran. Upaya pelibatan masyarakat secara aktif merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

2.2.7. Kelompok Peduli Api

Kelompok Peduli Api adalah suatu organisasi kelompok masyarakat yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kelompok Peduli Api berada di bawah kendali pihak kecamatan dan merupakan unit pelaksana yang berada di tingkat desa.

Kelompok peduli api terbentuk didasarkan atas keputusan hasil evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan Tahun 2003 yang mengakibatkan terganggunya transportasi udara khususnya di Bandara Supadio Pontianak dengan melibatkan seluruh anggota Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah (PUSDALKARHUTLA-DA). Hasil rapat memutuskan untuk membentuk Tim Action Plan Sterilisasi Bandara Supadio Pontianak dengan melibatkan para pihak yang terlibat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat. Atas dasar keputusan tersebut tim kemudian melakukan rapat kecil untuk merespon tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Rapat kecil kemudian memutuskan mengusulkan pembentukan Kelompok Peduli Api sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan yang sering terjadi. Usulan tersebut

kemudian diajukan ke PUSDALKARHUTLADA. Atas usulan tersebut PUSDALKARHUTLA kemudian menggelar rapat koordinasi dengan Pos Komando Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah (POSKOLAKDALKARHUTLADA) Kabupaten/ Kota yang diwakili instansi yang membidangi tugas pokok dan fungsi lingkungan hidup serta Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SATLAKDALKARHUTLA) yang diwakili oleh sembilan Camat daerah rawan kebakaran lahan di sekitar Bandara Supadio Pontianak. Rapat koordinasi membahas rencana upaya pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui pembentukan Kelompok Peduli Api. Para camat diminta untuk mendorong dan memfasilitasi para Kepala Desa yang berada di wilayahnya untuk membentuk Kelompok Peduli Api. Atas permintaan tersebut masing-masing Camat kemudian meminta para Kepala Desa untuk segera membentuk kelompok dan melaporkan nama-nama anggotanya ke pihak Kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan pada PUSDALKARHUTLADA.

Sejak Tahun 2004 telah terbentuk 33 (tiga puluh tiga) Kelompok Peduli Api yang tersebar pada sembilan kecamatan (enam kecamatan berada di Kabupaten Kubu Raya dan tiga kecamatan berada di Kota Pontianak) rawan kebakaran lahan dimana sebagian besar lokasinya adalah lahan gambut dengan rincian : (a) untuk di Kabupaten Kubu Raya adalah : Kecamatan Sei Ambawang (5 kelompok), Kecamatan Sei Raya (6 kelompok), Kecamatan Sei Kakap (6 kelompok), Kecamatan Kubu (7 kelompok), Kecamatan Terentang (6 kelompok) dan Kecamatan Rasau Jaya (10 kelompok), sedangkan (b) untuk Kota Pontianak adalah : Kecamatan

Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Selatan masing-masing satu kelompok.

Tugas dan fungsi Kelompok Peduli Api adalah : (1) membantu SATLAKDALKARHUTLA Kecamatan dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di Desa/Kelurahan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, (2) mengadakan pengawasan dan pemantauan terhadap hutan dan lahan di Desa/Kelurahan masing-masing pada musim kemarau, (3) melaporkan kepada SATLAKDALKARHUTLA Kecamatan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, baik yang sudah dapat ditanggulangi maupun yang belum ditanggulangi, (4) bersama-masa dengan masyarakat menanggulangi kebakaran kecil dan kebakaran besar, (5) mengadakan pendataan lahan yang akan dilakukan pembakaran dan memantau serta memerintahkan kepada pemilik lahan untuk menjaga selama pembakaran berlangsung, (6) membuat kesepakatan desa/adat dan sanksi-sanksinya kepada pelaku pembakaran yang tidak mengindahkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengkaji kenyataan lapangan guna mendapatkan gambaran faktual dan akurat tentang obyek yang akan diteliti. Menurut Arikunto (1998) penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati serta memanfaatkan informan untuk dapat mengungkapkan data yang dikaji.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan meliputi beberapa pokok, antara lain :

- a. Peran serta masyarakat dan Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan ;
- b. Kondisi sosial masyarakat dan Kelompok Peduli Api di Kecamatan rasau Jaya.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Alasan pemilihan lokasi adalah karena Kecamatan Rasau Jaya memiliki posisi strategis di samping karena pada wilayah tersebut setiap tahunnya selalu dilanda kebakaran lahan juga karena lokasinya berdekatan dengan Bandara Supadio Pontianak.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong (2002) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan jenis data dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumberdata tertulis, foto dan data statistik.

Pada penelitian ini digunakan 2 jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait: unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, LSM, masyarakat dan Akademisi serta observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan sumber tertulis atau dokumen yang berasal dari instansi terkait dan buku pustaka yang terkait dengan penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data diambil dari narasumber sebagai bahan penggalan informasi sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.
Narasumber Penggalan Informasi

No.	Narasumber	Jumlah (org)
	<u>Pemerintah</u>	
1.	Bapedalda Provinsi Kalimantan Barat	1
2.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	1
3.	Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat	1
4.	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	1
5.	Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Barat	1
6.	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kubu Raya	1
7.	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan ESDM Kab. Kubu Raya	1
8.	Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kab. Kubu Raya	1
9.	Kecamatan Rasau Jaya	1
	<u>Kelompok Peduli Api</u>	
10.	Ketua / Sekretaris Kelompok Peduli Api	10
11.	Anggota Kelompok Peduli Api	15
	<u>Tokoh Formal dan Informal/Masyarakat/Akademisi/LSM</u>	
12.	Kepala Desa / Sekretaris Desa di Kec Rasau Jaya	6
13.	Tokoh Masyarakat di Kec. Rasau Jaya	6
14.	Masyarakat non Anggota KPA	24
15.	Pemerhati Lingkungan/ Akademisi	1
16.	LSM	1
	Jumlah	72

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan berupa tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yaitu antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara ini berguna untuk : (1) mendapatkan data dari tangan pertama (*primer*), (2) pelengkap teknik pengumpulan data lainnya dan (3) sebagai penguji data yang didapat. Wawancara dilakukan terhadap sumber yang mengetahui secara lebih mendalam dengan permasalahan penelitian dengan berpedoman pada *interview guide*.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati di lapangan. Pertimbangan digunakannya teknik ini adalah bahwa apa yang orang katakan sering kali berbeda dengan apa yang dilakukan. Sehingga peneliti dapat menggali dan memperoleh masukan data, informasi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

3.6. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Lapangan

Analisa data adalah suatu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data yang digunakan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini adalah menggunakan analisis data secara induktif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dihimpun melalui wawancara dan observasi lapangan maupun dokumen resmi dari beberapa instansi terkait. Setelah ditelaah dan dipelajari kemudian digeneralisasikan kedalam suatu kesimpulan yang bersifat umum yang didasarkan pada fakta-fakta empiris di lokasi penelitian.

Tahap akhir dari analisa data ini adalah mengadakan keabsahan pemeriksaan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan berbagai narasumber.

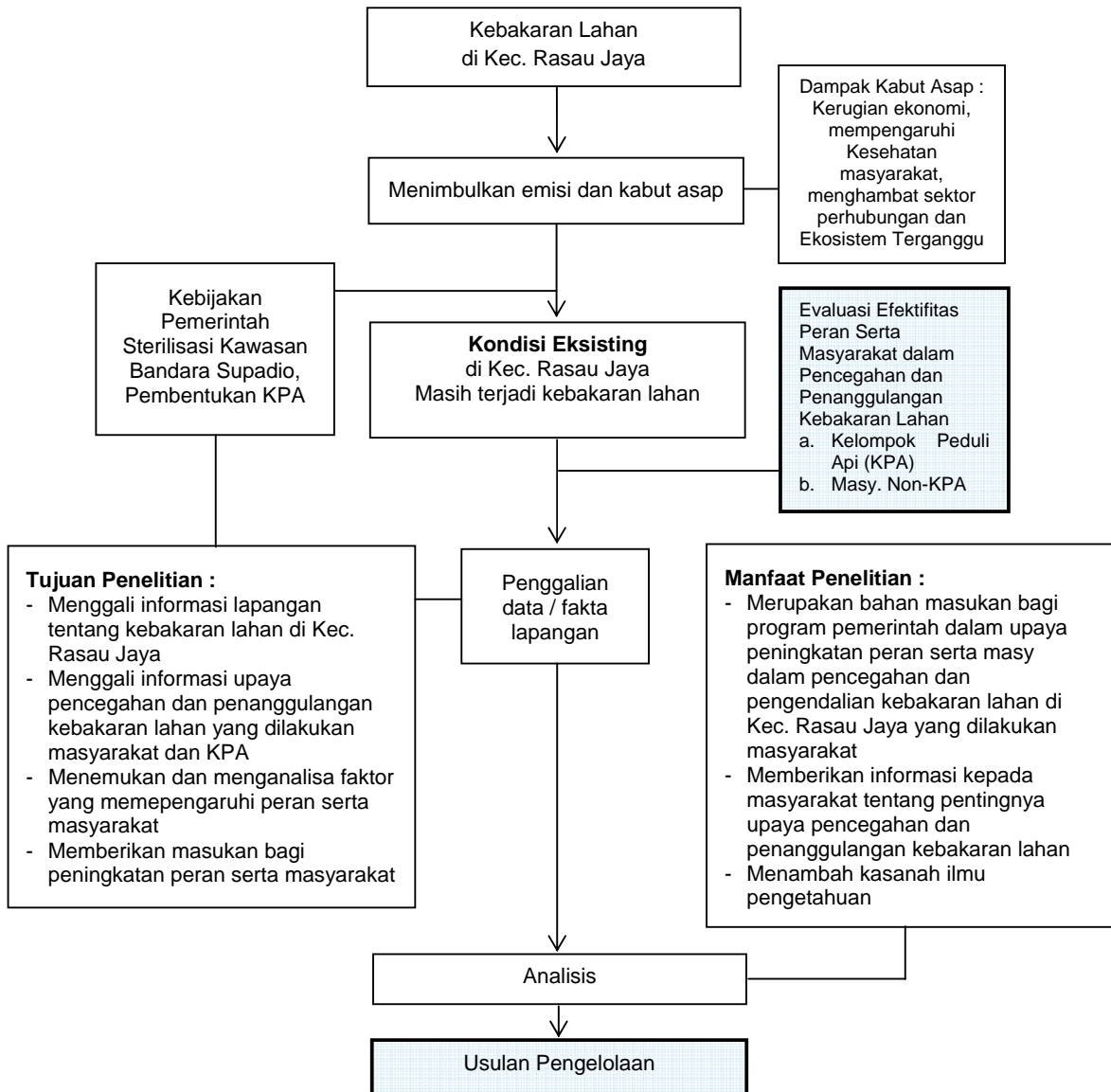
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Analisis Kondisi

Untuk penilaian kondisi, alat analisis yang digunakan adalah SWOT (*Strength – Weakness – Opportunity – Threats*). Pada tahap ini data dan informasi yang terkumpul kemudian diklasifikasikan menjadi data internal dan eksternal. Kondisi internal menggambarkan kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki, sedangkan kondisi eksternal menggambarkan peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threats*) yang ada. Selanjutnya data dan informasi tersebut disusun kedalam matrik faktor strategi internal (*Internal Strategy Factors Summary - IFAS*) dan matrik factor strategi eksternal (*External Strategy Factors Summary - EFAS*). Data kemudian dibuat kemungkinan strategi pengelolaan berdasarkan pertimbangan kombinasi empat set factor strategis tersebut. Faktor-faktor IFAS dan EFAS ditransfer ke dalam matrik digram silang SWOT. Berdasarkan pendekatan tersebut kemudian dibuat berbagai kemungkinan alternatif strategi (Rangkuti, 2006; Hinger, 2003). Startegi itu adalah :

- a. Strategi SO – strategi memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang sebesar-besarnya
- b. Strategi ST – strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman
- c. Strategi WO – strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
- d. Strategi WT – strategi mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman

3.7. Alur Pikir Penelitian



Gambar. 3.1. Diagram Alir / Kerangka Pikir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1. Letak Wilayah Penelitian

Kecamatan Rasau Jaya merupakan bagian Kabupaten Kubu Raya sejak 10 Agustus 2007 sesuai Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2007 hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Secara administrasi, Kecamatan Rasau Jaya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara Kecamatan Sungai Raya
- Sebelah Selatan Kec. Kubu dan Kec. Teluk Pakedai
- Sebelah Barat Kecamatan Sungai Kakap
- Sebelah Timur Kecamatan Sungai Raya

Luas wilayah Kecamatan Rasau Jaya adalah 28.147,50 hektar dengan luas masing-masing desa sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1.
Luas desa di Kecamatan Rasau Jaya

No.	Nama Desa	Luas (Ha)	Persen
1.	Rasau Jaya Umum	14.402,00	51,16
2.	Rasau Jaya 1	1.392,00	4,95
3.	Rasau Jaya 2	3.625,00	12,88
4.	Rasau Jaya 3	2.130,50	7,56
5.	Bintang Mas	2.500,00	8,88
6.	Pematang Tujuh	4.098,00	14,57

Jumlah Total		28.147,50	100,00

Sumber : Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2008

4.1.2. Curah Hujan

Data curah hujan diperlukan dalam kaitannya dengan aktifitas pembakaran lahan dan kejadian kebakaran di wilayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Data curah hujan diperoleh dari Kabupaten Pontianak dalam Angka, sehubungan belum diterbitkannya data Kabupaten Kubu Raya secara tersendiri. Data curah hujan dapat dilihat dalam tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2.

Rata-rata Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan

Bulan	2004		2005		2006	
	Curah Hujan	Hari	Curah Hujan	Hari	Curah Hujan	Hari
Januari	268	16	220	12	93	7
Februari	58	6	175	10	118	6
Maret	178	9	200	11	32	2
April	284	15	154	12	84	5
Mei	245	12	321	15	108	7
Juni	121	5	276	13	87	6
Juli	266	17	191	9	1	1
Agustus	10	2	166	8	14	1
September	304	16	265	12	129	5
Oktober	324	15	375	22	17	1
November	338	19	389	19	29	2
Desember	431	22	273	18	43	1
Rata-rata	236	13	250	13	63	4

Sumber : Kabupaten Pontianak dalam Angka 2005 dan 2007

Dari tabel diatas rata-rata curah hujan dan banyaknya hari hujan terlihat bahwa kondisi terendah terjadi pada bulan Agustus. Sedangkan untuk bulan Oktober, November, Desember dan Januari pada tahun 2004 dan 2005 merupakan bulan-bulan basah.

4.1.3. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kubu Raya berdasarkan data Kabupaten Pontianak dalam Angka 2007 berjumlah 480.938 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 245.271 jiwa (51%) dan penduduk perempuan 235.667 jiwa (49%).

Data kependudukan yang terutama diperlukan dalam penelitian ini adalah kepadatan penduduk, kepadatan penduduk di Kecamatan Rasau Jaya disajikan sebagaimana tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3.

Kepadatan Penduduk menurut desa di Kecamatan Rasau Jaya

Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan per (km ²)
Rasau Jaya Umum	4.683	144,020	32,51
Rasau Jaya 1	8.452	13,920	607,18
Rasau Jaya 2	4.473	36,250	123,39
Rasau Jaya 3	4.226	21,305	198,36
Bintang Mas	1.369	25,000	54,76
Pematang Tujuh	1.313	40,980	32,04

Jumlah	24.516	281,475	87,09
--------	--------	---------	-------

Sumber : Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2008

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui Desa Rasau Jaya 1 mempunyai kepadatan tertinggi, sedangkan Desa Pematang Tujuh sebaliknya.

4.1.4. Mata Pencaharian dan Tingkat Pendapatan Penduduk

Mata pencaharian penduduk diperlukan karena akan sangat terkait dengan kejadian pembakaran dan kebakaran lahan terutama mata pencaharian yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan. Adapun mata pencaharian penduduk di wilayah studi berdasarkan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang ada, terdiri atas pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, serta pengangkutan dan komunikasi.

Menurut data Kabupaten Pontianak dalam Angka 2007, mata pencaharian penduduk di Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya, terdiri atas :

1. Bidang pertanian, sebanyak 189.030 jiwa atau 65,79%.
2. Pertambangan dan penggalian, sebanyak 3.035 jiwa atau 1,06%.
3. Industri pengolahan, sebanyak 20.600 jiwa atau 7,17%.
4. Listrik, gas dan air, sebanyak 250 jiwa atau 0,09%.
5. Bangunan, sebanyak 16.165 jiwa atau 5,63%.
6. Perdagangan, hotel dan restoran, sebanyak 27.975 jiwa atau 9,74%.
7. Pengangkutan dan komunikasi, sebanyak 8.390 jiwa atau 2,92%.
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sebanyak 820 jiwa atau 0,29%.
9. Jasa-jasa, sebanyak 21.080 jiwa atau 7,34%.

Sedangkan menurut laporan tahunan Kecamatan Tahun 2006, mata pencaharian penduduk Kecamatan Rasau Jaya, terdiri atas :

1. Petani, sebanyak 7.753 jiwa atau 66,77%.
2. Nelayan, sebanyak 537 jiwa atau 4,62 %.
3. Tukang bangunan, sebanyak 65 jiwa atau 0,57%.

4. Pedagang, sebanyak 946 jiwa atau 8,15%.
5. Pegawai Negeri, sebanyak 404 jiwa atau 3,48%.
6. TNI/POLRI, sebanyak 48 jiwa atau 0,41%.
7. Buruh, sebanyak 1.858 jiwa atau 16,00%.

Berdasarkan data Kabupaten Pontianak dalam Angka 2007, besarnya pendapatan PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku tahun 2006 sebesar Rp. 9.651.525,84 dan besarnya PDRB perkapita berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 7.172.023,20.

4.1.5. Jenis Tanah

Berdasarkan data dari BPS dalam Kabupaten Pontianak dalam Angka 2007, secara garis besar keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya jenis tanahnya dapat dibagi sebagai berikut:

a. Tanah Alluvial

Umumnya tanah ini selalu dalam keadaan basah, secara berkala ada sebagian tanahnya dipengaruhi oleh genangan air. Jenis tanah ini terdapat sepanjang tepian sungai dan daerah pantai yang merupakan tanah endapan, terletak Teluk Pakedai dan Batu Ampar. Kondisi yang demikian diusahakan oleh petani sebagai sawah tadah hujan dan perkebunan.

b. Tanah Organosol

Jenis tanah ini mendominasi wilayah Kabupaten Kubu Raya. Tanah ini lebih dikenal dengan tanah *gambut*, tersebar hampir di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Kedalaman gambut bervariasi antara kurang dari 1 meter sampai \pm 3 meter. Tanah gambut merupakan tanah sisa tumbuh-tumbuhan yang masih kasar dan belum mengalami proses pelapukan.

4.1.6. Penggunaan Lahan

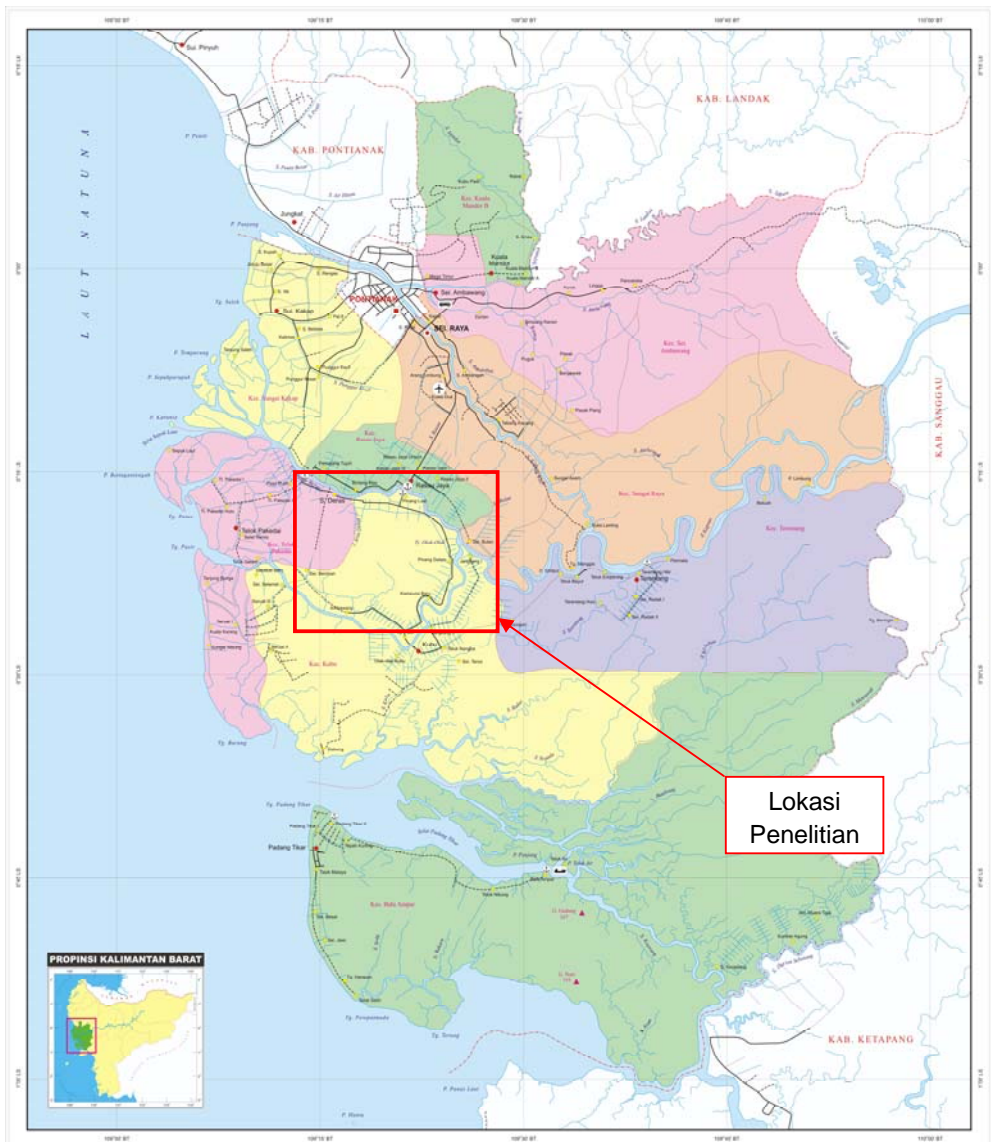
Kecamatan Rasau Jaya secara keseluruhan mempunyai luas 28.147,5 hektar, dengan penggunaan lahan antara lain : pemukiman, sawah, perkebunan, ladang, tegalan/ ladang, kebun campuran dan belukar. Kondisi lahan pada daerah perkampungan umumnya masih memungkinkan untuk dikembangkan karena lahan yang kosong masih

cukup luas. Pemanfaatan lahan sawah padi umumnya masih satu kali tanam, kecuali pada sedikit lokasi yang telah diusahakan dua kali setahun, tanam padi gadu. Penggunaan lahan di Kecamatan Rasau Jaya, secara rinci disajikan tabel 4.4. berikut ini.

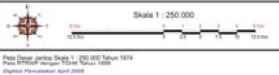
Tabel 4.4.
Pola Penggunaan Lahan di Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2008

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persen
1.	Pemukiman	1.670,00	5,93
2.	Sawah	2.615,00	9,32
3.	Perkebunan	9.470,00	33,64
4.	Tegalan/ Ladang	1.015,50	3,60
5.	Kebun Campuran	1.545,00	5,48
6.	Belukar	7.597,00	26,99
7.	Lain-lain	4.235,00	15,04
Jumlah Total		28.147,50	100,00

Sumber : Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2008



KAB. KUBU RAYA
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG
(BAPPEDA)



Peta Dasar Jember Sedy, L. 050.000 Tahun 1974
 Revisi 11/1985, 1988, 1993, 1998
 Diupdate Perencanaan April 2009

- Legenda :**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Kotamadya Pontianak
 - Kabupaten Pontianak
 - Kabupaten Kalimantan
 - Desa
 - Bandara Supada
 - Terminal antar Negeri
 - Jalan Aspal
 - Jalan Perkerasan
 - Jalan Tanah
 - Sungai
 - Gunung / Bukit
 - Dermaga
 - Pelabuhan Teluk Air

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KUBU RAYA

TABEL LUAS DAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KUBU RAYA

NO	KECAMATAN	LUAS (km ²)	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km ²)
1	Kubu Raya	2.002,70	62.768	31
2	Tanjung	788,44	5.688	7
3	Kubu Kalena	1.219,60	62.710	51
4	Kubu Bontol	241,90	46.441	192
5	Kubu Sungai	453,12	10.044	22
6	Kubu Dampit	111,97	21.023	188
7	Kubu Bontol Utara	608,26	146.210	240
8	Kubu Bontol Selatan	738,10	18.844	26
9	Kubu Bontol Tengah	473,03	21.442	45
Jumlah		6.006,15	404.986	67

Gambar 4.1. Peta Lokasi Penelitian. Sumber : Bappeda Kab. Kubu Raya, 2008.

4.2. Sistem Pertanian di Rasau Jaya

Terkait dengan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertanian tanaman semusim masyarakat itu sendiri. Hal tersebut mengingat pertanian di Kecamatan Rasau Jaya pada umumnya masih menggunakan sistem pertanian ekstensif, termasuk masih digunakannya penyiapan lahan dengan cara dibakar baik tanaman padi maupun jagung. Penanaman padi biasanya dilakukan pada saat musim penghujan dan tanaman jagung dilakukan pada saat musim kemarau. Berikut ini akan diuraikan tentang sistem pertanian padi dan jagung yang dilakukan masyarakat Kecamatan Rasau Jaya.

4.2.1 Sistem Pertanian Padi di Rasau Jaya

Padi biasanya ditanam pada lahan pasang surut dan sawah tadah hujan. Lahan tempat bertanam padi relatif sudah tetap karena selalu diusahakan pada lahan yang sama setiap tahunnya. Tanam padi dilakukan sekali setahun walaupun pada tempat tertentu dilakukan dua kali setahun, tanam gadu. Pertanian padi pada lahan pasang surut dan lahan kering dapat dilihat pada tabel 4.5. dibawah ini.

Tabel 4.5.
Pertanian Padi di Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2007

No.	Desa	Padi Pasang Surut (Ha)	Padi Ladang (Ha)
1.	Rasau Jaya Umum	0,00	715,00
2.	Rasau Jaya 1	338,00	15,00
3.	Rasau Jaya 2	0,00	467,00
4.	Rasau Jaya 3	39,80	53,00
5.	Bintang Mas	43,00	250,00
6.	Pematang Tujuh	0,00	50,00

Jumlah Total	420,80	1.550,00
--------------	--------	----------

Sumber : Profil Desa di Kecamatan Rasau Jaya, 2007

Tanam padi biasa dilakukan pada saat menjelang musim hujan, sekitar bulan September sedangkan penyiapan lahan dilakukan satu bulan sebelumnya. Penyiapan lahan untuk tanam padi di Kecamatan Rasau Jaya dilakukan melalui dua cara, penyiapan lahan dengan cara dibakar dan tidak dibakar.

Penyiapan lahan tanam padi dengan cara dibakar

Penyiapan lahan dengan cara dibakar, dimulai dengan kegiatan penebasan pada bulan Juli. Kegiatan penebasan selalu diikuti penyiapan persemaian padi, hal tersebut dilakukan dengan tujuan pada saat tebasan kering dan siap dibakar, semai padi juga sudah siap ditanam. Setelah tebasan kering, sekitar bulan Agustus dibakar. Pembakaran dilakukan dengan harapan, abu bakaran digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah selain dapat menetralkan keasaman tanah. Setelah dibakar lahan dapat langsung ditanami namun adapula yang dilakukan perlakuan lanjutan. Perlakuan lanjutan yaitu dengan membiarkan lahan sekitar 10 sampai dengan 20 hari, selama waktu itu diharapkan akan tumbuh rumput baru, setelah rumput baru tumbuh kemudian dilakukan penyemprotan dengan herbisida, setelah ditunggu sekitar tiga hari hingga seminggu kemudian padi ditanam.

Penyiapan lahan tanam padi dengan cara tidak dibakar

Cara kedua dilakukan dengan tidak dibakar atau dilapangan lebih dikenal dengan sebutan Tanpa Olah tanah (TOT) yang diperkenalkan pemerintah sejak tahun 2002, lahan bekas tanaman padi yang dipanen sekitar bulan Pebruari – Maret dibiarkan "bera". Lahan yang masih terdapat jerami karena masih melakukan sistem panen dengan ani-ani (ketam) dan ditumbuhi rerumputan sekitar bulan Juli disemprot herbisida, untuk satu hektar diperlukan sekitar 5 liter. Semprotan dibiarkan sekitar satu bulan, setelah kering dirolling dengan drum atau batang kelapa baru kemudian ditanam padi. Jerami dan rumput yang telah kering saat

terkena hujan akan lapuk dan bermanfaat sebagai kompos, selain itu batang jerami dan rumput juga berfungsi menutup lapisan tanah guna menekan tumbuhnya rumput baru sehingga akan mengurangi kegiatan penyiangan rumput. Namun demikian, kegiatan penyiapan lahan tanpa bakar selain dengan cara Tanpa Olah Tanah (TOT) yaitu penyiapan dengan cara dicangkul juga masih diterapkan oleh sebagian kecil masyarakat di Desa Rasau Jaya 2 dan Desa Rasau Jaya 3.

Kegiatan penanaman padi yang dilakukan tidak seperti yang dilakukan di sawah irigasi, tanam padi di Kecamatan Rasau Jaya dilakukan dengan cara ditugal/ dibuat lubang tanam dengan kayu yang diruncingkan ujungnya. Sebagian besar padi yang ditanam adalah jenis padi lokal, padi berumur 6 atau 7 bulan tetapi ada pula yang dilakukan dengan cara dicampur dengan padi unggul jenis Ciherang yang berumur 4 bulan.

Padi lokal dipilih karena lebih tahan terhadap hama, penyakit dan cocok dengan kondisi lahan yang ada. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang lebih menjadi dasar adalah karena jenis padi ini walaupun tanpa perlakuan penyiangan dan pemupukan tetap dapat dipanen. Penanaman padi dengan cara dicampur antara padi lokal dan unggul, dilakukan lebih karena keterbatasan tenaga. Cara yang dilakukan adalah dengan membagi petak sawah seluas satu hektar menjadi tiga bagian, sepertiga hektar pertama ditanam padi lokal yang berumur 6 atau 7 bulan, sepertiga hektar kedua ditanami padi lokal yang berumur 5 atau 6 bulan dan sepertiga hektar ketiga ditanami padi unggul Ciherang umur 4 bulan, dikerjakan secara bergantian sehingga waktu panen sama yaitu sekitar bulan Pebruari – Maret.

Tanam padi dilakukan serempak dimulai sekitar bulan Juli, Agustus, dan September dengan harapan panen bersamaan sekitar bulan Pebruari atau Maret. Terlalu awal atau terlambat tanam akan berpengaruh keberhasilan panen. Padi yang terlalu awal berbuah akan menjadi sasaran burung, belalang dan hama padi lainnya, begitu juga jika terlambat tanam. Masyarakat Kecamatan Rasau Jaya sebagian besar

menanam padi setahun sekali kecuali di Desa Bintang Mas dan sebagian wilayah Tanjung Wangi Desa Rasau Jaya Umum, hal inilah yang menyebabkan tanam padi dua kali kurang berhasil. Tanam padi kurang berhasil bukan dikarenakan lahan tidak bisa ditanami namun lebih karena masyarakat kurang kompak.

Penyiapan lahan tanam padi dengan dengan cara bakar masih dilakukan masyarakat Desa Rasau Jaya Umum, sedangkan sistem Tanpa Olah Tanah (TOT) hampir dilakukan oleh semua masyarakat desa lainnya termasuk masyarakat Desa Rasau Jaya Umum sendiri.

Sistem pertanian dengan Tanpa Olah Tanah, direspon dengan baik oleh masyarakat dengan pertimbangan antara lain :

- a. Hasil panen antara sistem tanam dengan dicangkul tradisional dan sistem Tanpa Olah Tanah tidak berbeda jauh, cara dicangkul sekitar 2 ton/hektar sedangkan sistem TOT sekitar 1,5 – 2 ton/hektar. Hasil perhitungan sederhana analisis usaha tani kedua cara tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 dan 4.7. dibawah ini.
- b. Tidak terlalu memerlukan banyak tenaga untuk mengusahakan padi sehingga tenaga dapat digunakan untuk menggarap lahan pertanian dan pekerjaan lainnya.
- c. Tidak menimbulkan emisi asap akibat kegiatan pembakaran lahan.
- d. Mulsa sisa tanaman padi dan rumput dapat dimanfaatkan sebagai kompos untuk membantu pupuk tanaman.

Tabel 4.6. Analisis Usaha Tani Padi dengan Sistem Tanpa Olah Tanah Untuk Luasan Tanam Satu Hektar di Desa Rasau Jaya 3

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Persemaian				
a. Penyiapan lahan persemaian (Laki-laki 1 org x 2 hr)	2	OH	30.000	60.000
b. Bibit	30	Kg	10.000	300.000
Penyiapan lahan				
a. Herbisida	5	Ltr	35.000	175.000
b. Tenaga semprot	1	OH	30.000	30.000
c. Tenaga rolling	4	OH	30.000	120.000
Penanaman				
a. Tenaga tanam				
- Tenaga laki-laki (3 org x 10 hr)	30	OH	30.000	900.000
- Tenaga perempuan (5 org x 10 hr)				
b. Penyiangan I				
- Tenaga laki-laki (1 org x 20 hr)	50	OH	24.000	1.200.000
- Tenaga perempuan (1 org x 20 hr)				
c. Penyiangan II				
- Tenaga laki-laki (1 org x 15 hr)	20	OH	30.000	600.000
- Tenaga perempuan (1 org x 15 hr)				
d. Pupuk				
- Urea (harga Rp. 61.000/50kg)	20	OH	24.000	480.000
- KCI (harga Rp. 100.000/50kg)				
- TSP (harga Rp. 75.000/50kg)				
e. Tenaga pemupukan				
- Pemupukan I (Tenaga laki-laki 1 org x 1 hr)	15	OH	30.000	450.000
- Pemupukan II (Tenaga laki-laki 1 org x 2 hr)	15	OH	24.000	360.000
- Pemupukan III (Tenaga laki-laki 1 org x 2 hr)	250	Kg	1.220	305.000
	100	Kg	2.000	200.000
	100	Kg	1.500	150.000

	1	OH	30.000	30.000
	2	OH	30.000	60.000
	2	OH	30.000	60.000
Panen				
a. Panen I				
- Tenaga laki-laki (1 org x 7 hr)	7	OH	30.000	210.000
- Tenaga perempuan (6 org x 7 hr)				
b. Panen II				
- Tenaga laki-laki (1 org x 6 hr)	42	OH	24.000	1.008.000
- Tenaga perempuan (1 org x 6 hr)				
	6	OH	30.000	180.000
	6	OH	24.000	144.000
Total Biaya				7.022.000
Hasil panen	2.000	Kg	2.200	4.400.000
Hasil panen – total biaya				- 2.622.000

Keterangan : Harga pupuk dihitung sesuai harga pada saat tanam tahun 2007

HOK dihitung sesuai harga berlaku di lokasi penelitian

Sumber : Hasil analisis, 2008

Tabel 4.7. Analisis Usaha Tani Padi dengan Sistem Olah dengan Cara dicangkul Untuk Luasan Tanam Satu Hektar di Desa Rasau Jaya 3

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Persemaian				
a. Penyiapan lahan persemaian (Laki-laki 1 org x 2 hr)	2	OH	30.000	60.000
b. Bibit	30	Kg	10.000	300.000
Penyiapan lahan				
a. Penebasan	2	OH	30.000	60.000
b. Pengolahan tanah dengan cara dicangkul	35	OH	30.000	1.050.000
Penanaman				
a. Tenaga tanam				
- Tenaga laki-laki (3 org x 10 hr)				
- Tenaga perempuan (5 org x 10 hr)	30	OH	30.000	900.000
b. Penyiangan I				
- Tenaga laki-laki (1 org x 20 hr)				
- Tenaga perempuan (1 org x 20 hr)	50	OH	24.000	1.200.000
c. Penyiangan II				
- Tenaga laki-laki (1 org x 15 hr)				
- Tenaga perempuan (1 org x 15 hr)	20	OH	30.000	600.000
d. Pupuk				
- Urea (harga Rp. 61.000/50kg)				
- KCl (harga Rp. 100.000/50kg)				
- TSP (harga Rp. 75.000/50kg)	20	OH	24.000	480.000
e. Tenaga pemupukan				
- Pemupukan I (Tenaga laki-laki 1 org x 1 hr)	15	OH	30.000	450.000
- Pemupukan II (Tenaga laki-laki 1 org x 2 hr)	15	OH	24.000	360.000
- Pemupukan III (Tenaga laki-laki 1 org x 2 hr)	250	Kg	1.220	305.000
	100	Kg	2.000	200.000
	100	Kg	1.500	150.000
	1	OH	30.000	30.000

	2	OH	30.000	60.000
	2	OH	30.000	60.000
Panen				
a. Panen I				
- Tenaga laki-laki (1 org x 7 hr)	7	OH	30.000	210.000
- Tenaga perempuan (6 org x 7 hr)				
b. Panen II				
- Tenaga laki-laki (1 org x 6 hr)	42	OH	24.000	1.008.000
- Tenaga perempuan (1 org x 6 hr)				
	6	OH	30.000	180.000
	6	OH	24.000	144.000
Total Biaya				7.777.000
Hasil panen	2.000	Kg	2.200	4.400.000
Hasil panen – total biaya				- 3.377.000

Keterangan : Harga pupuk dihitung sesuai harga pada saat tanam tahun 2007

HOK dihitung sesuai harga berlaku di lokasi penelitian

Sumber : Hasil analisis, 2008

Namun demikian cara bertani dengan sistem Tanpa Olah Tanah juga memiliki beberapa kelemahan seperti :

- a. Tanah gambut yang tidak pernah diolah akan mempunyai sifat yang sama seperti sebelumnya, tanah yang sering diolah lama-kelamaan akan baik untuk semua jenis tanaman.
- b. Hasil panen biasanya memiliki kualitas yang kurang baik, padi yang ditanam dengan diolah mempunyai produk lebih bersih, buliran padat dan panjang.

4.2.2 Sistem Pertanian Jagung di Rasau Jaya

Tanaman pangan semusim selain padi yang ditanam masyarakat Kecamatan Rasau Jaya adalah jagung. Ada dua macam jagung yang ditanam yaitu jagung manis dan jagung pipil. Jagung manis biasanya dipanen muda karena dikonsumsi langsung, sedangkan jagung pipil dipanen sampai tua. Kondisi luas tanaman jagung manis dan pipil di Kecamatan Rasau Jaya dapat dilihat pada tabel 4.8. dibawah ini.

Tabel 4.8.
Pertanian Jagung di Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2007

No.	Desa	Jagung Manis (Ha)	Jagung Pipil (Ha)
1.	Rasau Jaya Umum	0,00	270,00
2.	Rasau Jaya 1	160,00	166,00
3.	Rasau Jaya 2	0,00	146,50
4.	Rasau Jaya 3	0,00	127,00
5.	Bintang Mas	50,00	100,00
6.	Pematang Tujuh	55,00	40,00
Jumlah Total		265,00	894,50

Sumber : Profil Desa di Kecamatan Rasau Jaya, 2007

Jagung biasanya ditanam setelah panen padi atau pada saat musim kemarau. Umumnya ditanam dua kali setahun, namun dapat pula dikerjakan sepanjang tahun. Tanam jagung biasa ditanam di lahan sawah atau pekarangan sendiri, namun tidak sedikit dilakukan dengan sistem menumpang pada lahan milik orang lain. Lahan bawas yang terbakar di saat musim kemarau biasa juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertanam jagung. Penanaman jagung dilakukan sebagai upaya untuk menambah pendapatan disamping untuk mengoptimalkan manfaat lahan yang ada.

Cara bertanam jagung masyarakat Kecamatan Rasau Jaya ada perbedaan antara bertani jagung manis dengan jagung pipil. Menanam jagung manis memerlukan input tambahan seperti pupuk dan kegiatan penyiangan, sedangkan jagung pipil biasa dilakukan tanpa pemupukan.

Penyiapan lahan untuk tanam jagung manis

Jagung manis biasa ditanam pada lahan bekas padi, namun demikian tidak semua lahan bekas padi dapat ditanami jagung. Kondisi tersebut dikarenakan wilayah hamparan lahan terpengaruh pasang surut, walaupun musim kemarau lahan tetap basah. Lahan seperti tersebut tidak bisa ditanami jagung, yang dapat diupayakan masyarakat adalah mengoptimalkan lahan dengan cara tanam dua kali namun fakta dilapangan lahan dibiarkan bera sampai ditanami padi pada musim tanam tahun berikutnya.

Cara bertanam jagung manis pada lahan bekas padi biasa dilakukan dengan beberapa tahap, pertama batang jerami padi dan rumput dilokasi tanam ditebas, setelah kering jerami di"panduk" seperti gunung kemudian dibakar. Abu hasil pembakaran dikumpulkan sebagai bahan campuran kotoran ayam, dan digunakan untuk pupuk.

Tabel 4.9. Analisa Usaha Tani Jagung Manis untuk Luasan Tanam Satu Hektar di Desa Rasau Jaya 1 (Tanam pada Areal Bekas Tanaman Padi)

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Penyiapan lahan				
a. Penebasan (Laki-laki 1 org x 2 hr)	2	OH	30.000	60.000
b. Bibit jagung	4	Kg	20.000	80.000
Penanaman				
a. Tenaga tanam				
- Tenaga laki-laki (1 org x 7 hr)				
- Tenaga perempuan (3 org x 7 hr)	7	OH	30.000	210.000
b. Penyiangan I				
- Tenaga laki-laki (1 org x 10 hr)				
- Tenaga perempuan (1 org x 10 hr)	21	OH	24.000	336.000
c. Penyiangan II				
- Tenaga laki-laki (1 org x 10 hr)				
- Tenaga perempuan (1 org x 10 hr)	10	OH	30.000	300.000
d. Pupuk				
- Kotoran Ayam (harga Rp. 10.000/kg)	10	OH	24.000	240.000
- Urea (harga Rp. 61.000/50kg)				
- KCl (harga Rp. 100.000/50kg)				
- TSP (harga Rp. 75.000/50kg)				
- Dolomit (harga Rp. 25.000/kg)	10	OH	30.000	300.000
e. Tenaga pemupukan				
- Pemupukan I (Tenaga laki-laki 2 org x 1 hr)	10	OH	24.000	240.000
- Pemupukan II (Tenaga laki-laki 2 org x 2 hr)	40	Krg	10.000	400.000
- Pemupukan III (Tenaga laki-laki 2 org x 2 hr)	400	Kg	1.220	488.000
	150	Kg	2.000	300.000
	100	Kg	1.500	150.000
	4	Krg	25.000	100.000
	2	OH	30.000	60.000

	4	OH	30.000	120.000
	4	OH	30.000	120.000
Panen				
- Tenaga laki-laki (2 org x 3 hr)	6	OH	30.000	180.000
- Tenaga perempuan (6 org x 3 hr)	18	OH	24.000	432.000
Total Biaya				4.116.000
Hasil panen (harga normal)	80	Krg	75.000	6.000.000
(harga panen raya)	80	Krg	60.000	4.800.000
Hasil panen – total biaya				
(harga normal)				1.884.000
(harga panen raya)				684.000

Keterangan : Harga pupuk dihitung sesuai harga pada saat tanam tahun 2007

HOK dihitung sesuai harga berlaku di lokasi penelitian

Jagung manis dipanen pada umur 65-70 hari sejak tanam dan dijual dalam satuan karung (ukuran karung 50 kg)

Sumber : Hasil analisis, 2008



Gambar 4.2. Petani di Desa Rasau Jaya 1 sedang menanam jagung manis setelah panen padi.
Sumber : Rekaman Peneliti, April 2008.



Gambar 4.3. Tanaman jagung di Desa Pematang Tujuh.
Sumber : Rekaman Peneliti, April 2008.

Lahan yang telah dibersihkan kemudian dicangkul tipis-tipis sepanjang jalur yang akan ditanam dan diberi pupuk dasar dolomit. Setelah itu kemudian ditugal, dan ditanami jagung. Biji jagung yang telah ditanam ditutup dengan abu bakaran dan campuran kotoran ayam yang telah disiapkan diawal. Jagung manis ditanam dua kali yaitu, sekitar bulan Pebruari atau awal bulan Maret dan bulan Mei atau Juni. Saat mulai tumbuh daun sekitar umur 10 hari jagung diberi pupuk urea yang diulangi lagi saat berumur 40 hari. Selain pupuk urea, jagung juga diberi pupuk KCl dan TSP. Jagung manis dapat dipanen sekitar umur 65-70 hari setelah tanam. Untuk satu hektar hasil panen sekitar 80 karung. Jagung manis paling akhir dipanen pada bulan Agustus karena lahan sudah harus dipersiapkan lagi untuk tanam padi musim berikutnya. Hasil analisis untuk luas tanam satu hektar disajikan pada tabel 4.9. di atas.

Penyiapan lahan untuk tanam jagung pipil

Jagung pipil biasa ditanam di lahan khusus, yaitu lahan yang secara empiris tidak dapat ditanami padi, walaupun ada juga yang ditanam pada lahan bekas tanaman padi. Lahan yang tidak bisa ditanami padi merupakan lahan gambut yang tebal. Jagung pipil ditanam dua kali setahun, ada pula yang ditanam sepanjang tahun.

Cara bertanam jagung pipil, dimulai dengan kegiatan penebasan bawas. Setelah kering bawas dibakar, kemudian dibiarkan selama 3 hari sampai abu bakar dingin, setelah itu ditugal dan tanam. Semakin tebal bawas, maka semakin banyak abu bakarannya dan semakin subur tanaman jagungnya. Oleh karena itu, biasanya masyarakat akan mencari bawas-bawas baru sebagai lokasi bertanam jagung walaupun harus meminjam bawas milik tetangganya ataupun memanfaatkan lahan bawas tebal yang terbakar. Setelah ditanam, jagung dibiarkan tumbuh tanpa perawatan dan setelah berumur 110 hari petani datang kembali untuk memanen. Penanaman jagung pipil umumnya dilakukan pada bulan Januari dan Mei. Diluar kedua bulan tersebut, biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca. Kondisi cuaca terang lebih dari sepuluh hari saja, dapat dipastikan akan dijumpai penyiapan lahan dengan cara bakar untuk tanam jagung. Hasil panen jagung dengan cara ini sangat bervariasi berkisar antara 600 – 1.000 kg per hektar sesuai kondisi lahan dan gulmanya.

Namun demikian penanaman jagung pipil tidak semuanya menggunakan cara seperti diatas, adapula yang telah menggunakan teknik pertanian sebagaimana cara bertanam jagung manis. Penanaman jagung pipil dengan cara yang hampir sama dengan jagung manis dapat menghasilkan 3.000 kg. Hasil analisis tanaman jagung pipil untuk luas tanam satu hektar disajikan pada tabel 4.10. dan 4.11. di bawah ini.



Gambar 4.4. Tanaman jagung pipil pada lahan yang dipersiapkan dengan cara dibakar di Desa Rasau Jaya Umum, abu bakaran jelas terlihat. Sumber : Rekaman Peneliti, April 2008.



Gambar 4.5. Tanaman jagung pipil pada lahan yang dipersiapkan dengan cara tidak dibakar di Desa Rasau Jaya 3. Sumber : Rekaman Peneliti, April 2008.

Tabel 4.10. Analisis Usaha Tani Jagung Pipil untuk Luasan Tanam Satu Hektar di Desa Rasau Jaya 3 (tanam pada bekas areal tanam padi)

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Penyiapan lahan				
a. Penebasan (Laki-laki 1 org x 2 hr)	2	OH	30.000	60.000
b. Bibit jagung	4	Kg	10.000	40.000
Penanaman				
a. Tenaga tanam				
- Tenaga laki-laki (1 org x 7 hr)				
- Tenaga perempuan (3 org x 7 hr)	7	OH	30.000	210.000
b. Penyiangan I				
- Tenaga laki-laki (1 org x 10 hr)				
- Tenaga perempuan (1 org x 10 hr)	21	OH	24.000	336.000
c. Penyiangan II				
- Tenaga laki-laki (1 org x 10 hr)				
- Tenaga perempuan (1 org x 10 hr)	10	OH	30.000	300.000
d. Pupuk				
- Kotoran Ayam (harga Rp. 10.000/kg)	10	OH	24.000	240.000
- Urea (harga Rp. 61.000/50kg)				
- KCl (harga Rp. 100.000/50kg)				
- TSP (harga Rp. 75.000/50kg)				
- Dolomit (harga Rp. 25.000/kg)	10	OH	30.000	300.000
e. Tenaga pemupukan				
- Pemupukan I (Tenaga laki-laki 2 org x 1 hr)	10	OH	24.000	240.000
- Pemupukan II (Tenaga laki-laki 2 org x 2 hr)	40	Krg	10.000	400.000
- Pemupukan III (Tenaga laki-laki 2 org x 2 hr)	400	Kg	1.220	488.000
	150	Kg	2.000	300.000
	100	Kg	1.500	150.000
	4	Krg	25.000	100.000
	2	OH	30.000	60.000

	4	OH	30.000	120.000
	4	OH	30.000	120.000
Panen				
- Tenaga laki-laki (2 org x 3 hr)	6	OH	30.000	180.000
- Tenaga perempuan (6 org x 3 hr)	18	OH	24.000	432.000
Pemipilan dan Pengeringan				
- Tenaga laki-laki (1 org x 2 hr)	2	OH	30.000	60.000
- Tenaga perempuan (1 org x 7 hr)	7	OH	24.000	168.000
Total Biaya				4.304.000
Hasil panen	3.000	Kg	2.300	6.900.000
Hasil panen – total biaya				2.596.000

Keterangan : Harga pupuk dihitung sesuai harga pada saat tanam tahun 2007

HOK dihitung sesuai harga berlaku di lokasi penelitian

Jagung pipil dipanen pada umur 110 hari sejak tanam dan dijual dalam bentuk pipilan

Sumber : Hasil analisis, 2008

Tabel 4.11. Analisis Usaha Tani Jagung Pipil untuk Luasan Tanam Satu Hektar di Desa Rasau Jaya 3 (tanam pada areal bawah)

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Penyiapan lahan				
a. Penebasan (Laki-laki 2 org x 5 hr)	10	OH	30.000	300.000
b. Bibit jagung	4	Kg	10.000	40.000
c. Pembakaran (Laki-laki 4 org x 0,5 hr)	2	OH	30.000	60.000
Penanaman				
- Tenaga laki-laki (1 org x 7 hr)	7	OH	30.000	210.000
- Tenaga perempuan (3 org x 7 hr)	21	OH	24.000	336.000
Panen				
- Tenaga laki-laki (2 org x 3 hr)	6	OH	30.000	180.000
- Tenaga perempuan (6 org x 3 hr)	18	OH	24.000	432.000
Pemipilan dan Pengeringan				
- Tenaga laki-laki (1 org x 2 hr)	2	OH	30.000	60.000
- Tenaga perempuan (1 org x 7 hr)	7	OH	24.000	168.000
Total Biaya				1.786.000
Hasil panen	1.000	Kg	2.300	2.300.000
Hasil panen – total biaya				514.000

Keterangan : HOK dihitung sesuai harga berlaku di lokasi penelitian

Jagung manis dipanen pada umur 110 hari sejak tanam dan dijual dalam bentuk pipilan

Sumber : hasil analisis, 2008

4.3. Pertanian Semusim di Rasau Jaya, Asap dan Antisipasi Kebakaran Lahan

Hampir dapat dipastikan di Kecamatan Rasau Jaya setiap tahun memproduksi asap dan terjadi kebakaran lahan, kondisi tersebut sangat terkait dengan sistem pertanian masyarakat yang selama ini dipraktikan. Sistem pertanian masyarakat dengan cara bakar seringkali menjadi kambing hitam, terutama bagi masyarakat kota sekitarnya dan juga instansi pemerintah yang ada. Terkait dengan pertanian di Kecamatan Rasau Jaya, asap dan kebakaran lahan berikut kami sajikan informasi tentang asap, sistem pembakaran lahan dan antisipasinya, kesepakatan masyarakat dan aturan desa tentang kebakaran lahan dan penanggulangan kebakaran lahan pertanian di Kecamatan Rasau Jaya.

4.3.1. Asap di Rasau Jaya

Asap pada saat musim kemarau di Kecamatan Rasau Jaya dapat dipastikan selalu terjadi. Sumber asap di Kecamatan Rasau Jaya dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama asap yang bersumber dari kegiatan pertanian dan asap yang dihasilkan oleh kegiatan non-pertanian.

Asap dari kegiatan Pertanian

Asap yang bersumber dari kegiatan pertanian biasanya dihasilkan oleh kegiatan pembakaran pada saat penyiapan lahan. Namun demikian kegiatan penyiapan lahan dengan cara dibakar biasanya tidak menimbulkan asap tebal karena bahan yang akan dibakar biasanya telah kering, sehingga apabila dibakar bahan cepat habis dan menghasilkan sedikit asap.

Sistem pembakaran yang dilakukan masyarakat biasanya telah terkendali dan cepat padam karena bagaimanapun masyarakat ingin secepatnya mengusahakan lahannya. Lahan yang lama terbakar, apalagi sampai sehari-hari menyebabkan kegiatan penanaman tertunda dan sesungguhnya hal tersebut akan sangat merugikan petani itu sendiri.

Asap dari kegiatan Non-Pertanian

Sumber asap yang kedua adalah asap non-pertanian, asap semacam ini di Kecamatan Rasau Jaya dihasilkan oleh kegiatan pembersihan lahan pekarangan pada saat musim kemarau. Telah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa saat musim kemarau melakukan kegiatan pembersihan lahan pekarangan. Lahan pekarangan yang ditumbuhi rerumputan dibersihkan tebas, rumput tebasan kemudian dibuat gunungan "dipanduk" dan dibakar. Rumput hasil pembersihan lahan pekarangan biasanya masih belum kering namun langsung dibakar. Pembakaran rumput dalam keadaan masih belum kering akan menghasilkan asap yang tebal. Kegiatan semacam ini hampir dilakukan setiap rumah tangga di Kecamatan Rasau Jaya pada saat musim kemarau sehingga apabila dikumpulkan akan menghasilkan asap tebal, sehingga menyumbangkan asap yang dilepaskan ke lingkungan.

Sumber asap dari kegiatan non-pertanian dapat juga terjadi karena adanya bawas (semak belukar) yang terbakar. Kebakaran bawas pada saat musim kemarau akan menimbulkan kebakaran hebat, selain membakar vegetasi dan serasah dipermukaan juga berpotensi membakar "tanah" atau gambut sehingga akan menimbulkan kobaran api yang besar yang disertai kepulan asap tebal. Kebakaran semacam inilah yang merupakan penyumbang asap terbesar di Kecamatan Rasau Jaya.



Gambar 4.6. Sisa batang padi pada lahan untuk tanam padi yang sedang dibakar oleh petani salah satu penyumbang asap dari kegiatan pertanian. Sumber : Rekaman Peneliti, April 2008.



Gambar 4.7. Kebakaran pada lahan tidur (bawas) menghasilkan asap tebal salah satu penyumbang asap dari kegiatan non-pertanian. Lokasi Desa Rasau Jaya Umum. Sumber : Rekaman Peneliti, April 2008.

4.3.2. Sistem Pembakaran Lahan Pertanian dan Antisipasinya di Kecamatan Rasau Jaya

Penyiapan lahan pertanian dengan cara bakar sebagian besar masih digunakan masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya. Cara ini masih terus dilakukan karena cepat dan murah. Abu hasil pembakaran diyakini dapat menyuburkan tanah, bukti empiris menyatakan bahwa lahan yang dibakar tanaman pertaniannya lebih bagus dan subur jika dibandingkan dengan lahan pertanian yang tidak dibakar. Cara bakar masih dilakukan juga karena kondisi lahannya yang memang harus dibakar, lahan bawas atau lahan yang bersemak memang harus dibakar supaya bisa cepat dapat ditanami. Lahan yang telah ditumbuhi bawas apalagi yang tidak dikerjakan lebih dari tiga tahun banyak terdapat tanaman berkayu yang apabila hendak dikerjakan haruslah dibersihkan terlebih dahulu, cara yang paling cepat dan murah adalah dengan dibakar. Hal tersebut sesuai informasi yang disampaikan oleh seorang narasumber, sebagai berikut :

”Ya biar cepat selesai dan cepat tanam juga hasil bakaran akan menghasilkan abu sekaligus buat pupuk.”

Hal tersebut juga sesuai informasi yang disampaikan narasumber lain, sebagai berikut :

”Ya kalau dibakar kan tidak tunggu lama bisa langsung tanam, hasil bakaran akan menghasilkan abu sekaligus buat pupuk. Bisa dibandingkan antara lahan yang dibakar dan tidak dibakar, yang dibakar biasanya jagungnya lebih bagus tapi sekarang kalau tanam jagung sudah ditambah pupuk kandang kotoran ayam jadi tidak hanya mengandalkan abu bakaran saja.”

Kegiatan penyiapan lahan dengan cara dibakar biasanya dilakukan pada lahan untuk tanam jagung, sedangkan untuk tanam padi sudah memakai sistem Tanpa Olah Tanah (TOT) sehingga relatif tidak dilakukan dengan cara dibakar. Hal tersebut sesuai informasi seorang narasumber, sebagai berikut :

"Tidak semua dibakar, untuk tanaman jagung memang harus dibakar supaya subur, diambil abunya kalau abunya banyak semakin subur dia, tetapi untuk tanam padi bisa dibakar atau bisa tidak, dibakar apabila areal tanamannya sudah menjadi "bawas" besar tetapi jika hanya bekas tanam padi tahun yang lalu ya hanya disemprot saja."

Informasi sama juga tersebut juga diperoleh dari narasumber lain, sebagai berikut :

"Ya karena kalau tidak ada abunya tanahnya tidak subur, tapi biasanya yang dibakar hanya lahan untuk tanam jagung sedangkan lahan untuk tanam padi biasanya hanya disemprot saja dengan pertimbangan merumputnya akan berkurang."

walaupun demikian di lapangan masih ada sebagian kecil penyiapan lahan padi juga dilakukan dengan cara dibakar, hal ini sesuai informasi yang disampaikan seorang narasumber, sebagai berikut :

"Untuk tanam padi ada juga yang dibakar, rumput-rumput di lahan ditebas, setelah kering baru dibakar kemudian ditunggu sekitar sepuluh hari lahan akan tumbuh rumput-rumput halus kemudian disemprot, tunggu sekitar tiga hari baru ditanami. Rumput pada lahan padi yang ditanami setiap tahun biasanya hanya rumput tipis, sehingga kalau dibakarpun tidak akan menimbulkan api dan asap yang tebal."

Informasi tersebut juga diperkuat narasumber lain, sebagai berikut :

"..... rumput dilahan ditebas, dibiarkan sekitar 2 minggu setelah kering kemudian dibakar baru ditanami."

Berdasarkan informasi lapangan pada setiap desa di Kecamatan Rasau Jaya, lahan yang ada telah dimiliki oleh perorangan baik yang telah disertifikatkan maupun yang hanya berbentuk surat izin garap atau surat keterangan tanah (SKT), sehingga tidak dikenal adanya sistem

perladangan berpindah. Pertanian diusahakan pada lahan sendiri, numpang ataupun sistem sewa.

Pembakaran Terkendali

Kegiatan penyiapan lahan pertanian di Kecamatan Rasau Jaya telah menerapkan prinsip-prinsip pembakaran terkendali, berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi menjalarnya api saat pembakaran. Upaya-upaya yang telah dilakukan masyarakat guna mencegah merembetnya api ke lahan ataupun lahan lain yang sehingga tidak menimbulkan kebakaran, adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembersihan saluran air dan parit pembatas lahan secara gotong royong. Kondisi saluran air dan parit pembatas lahan yang bersih dari rerumputan akan mencegah menjalarnya api, api yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan akan akan mengecil disekitar parit sehingga api akan mudah dipadamkan.
Kegiatan pembersihan parit dan salurah air biasanya dilakukan sebelum musim kemarau karena menjelang dan saat musim kemarau adalah waktu rawan adanya kebakaran lahan.
- b. Pembuatan sekat bakar. Lahan yang telah ditebas dan akan dibakar dibuatkan sekat bakar terlebih dahulu, yaitu upaya pembersihan keliling lahan selebar 1 – 2 meter sehingga api diharapkan tidak akan bisa merembet ke lahan tetangganya.
- c. Sebelum melakukan pembakaran terlebih dahulu disiapkan alat-alat antisipasi kebakaran, seperti alat penyemprot, ember, garu, parang dan alat pemadaman api lainnya.
- d. Pembakaran dilakukan sore hari. Waktu pembakaran juga sangat diperhitungkan karena pembakaran saat sore hari relatif aman karena hembusan angin sudah sangat berkurang, masyarakat biasa melakukan pembakaran setelah jam 16.00 karena angin kurang dan cuaca sudah mulai sejuk.
- e. Memperhitungkan arah angin, saat pembakaran masyarakat juga memperhitungkan arah angin. Pembakaran haruslah dilakukan melawan arah angin, hal tersebut dilakukan agar api bakaran

merambat pelan dan kecil, api juga akan memakan serasah sampai lantai tanah. Pembakaran searah dengan arah angin akan menghasilkan api yang besar dan bagian bawah rumput dan serasah yang dibakar tidak dapat terbakar sampai lantai tanah sehingga diperlukan pengulangan pembakaran, disamping itu akan berpotensi menyebabkan kebakaran karena api cenderung tidak dapat dikendalikan. Apabila kondisi angin lengang atau tidak ada angin maka pembakaran dibuat melingkar sehingga api akan menuju dan mati ditengah lahan.

- f. Pembuatan kolam. Pembuatan kolam dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan air untuk menyiram api apabila terjadi kebakaran lahan.
- g. Sebelum membakar lahan, tetangga pemilik lahan yang bersebelahan terlebih dahulu diberi tahu sekaligus diminta bantuannya untuk bersama-sama menjaga api saat pembakaran, hal tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi merembetnya api ke lahan yang tidak diinginkan untuk dibakar.
- h. Api dijaga sampai padam, setelah selesai pembakaran sepanjang sekat bakar sisir kembali apakah ada api atau bara yang masih belum padam, kalau masih ada api atau bara maka langsung dipadamkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya dan merembetnya api ke lahan yang tidak diinginkan untuk dibakar.

4.3.3. Kesepakatan Masyarakat dan Aturan Desa tentang Kebakaran Lahan Pertanian

Kegiatan penyiapan lahan dengan cara dibakar merupakan kegiatan beresiko sehingga diperlukan banyak upaya pencegahan untuk mengantisipasi merembetnya api ke lahan yang tidak diinginkan untuk dibakar. Persipan pembakaran juga dilakukan sebagaimana disampaikan di atas, hal ini merupakan wujud kehati-hatian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam proses pembukaan lahan dengan cara dibakar terkadang meluasnya api tidak dapat dicegah, baik karena api loncat atau sumber api lain yang tidak diketahui sumbernya. Berdasarkan kejadian kebakaran lahan yang sering terjadi baik yang disebabkan oleh sumber api yang diketahui maupun tidak diketahui, maka di masyarakat sendiri

telah dibuat kesepakatan dan adapula yang telah disahkan menjadi peraturan desa. Dari enam desa yang ada di Kecamatan Rasau Jaya hanya Desa Bintang Mas yang telah membuat peraturan desanya, sedangkan pada lima desa lainnya baru dalam bentuk kesepakatan antar masyarakat petani dan belum dibukukan apalagi difasilitasi dalam bentuk aturan desa.

Peraturan desa di Desa Bintang Mas telah terbentuk setelah adanya kejadian terbakarnya kebun kelapa dan kebun karet pada tahun 1997 – 1998, atas kejadian tersebut maka dibuat keputusan desa sebagai antisipasi kebakaran lahan pada periode berikutnya. Keterangan tersebut sesuai informasi yang disampaikan seorang narasumber, sebagai berikut :

"Pada tahun 1997 – 1998 waktu itu pernah ada warga hendak menanam jagung lahannya dibakar dan disangka api padam, namun di tanah gambut hal ini tidak menjamin kalau api tersebut benar-benar padam dan kenyataannya beberapa hari kemudian api tersebut membakar lahan kawan. Kebakaran lahan tersebut menyebabkan kebun kelapa seluas satu hektar terbakar separuhnya, pemilik minta diganti rugi dan dibayar dengan lahan yang dibakar tersebut. Karena laporan tersebut sampai ke pihak desa, maka hal tersebut menjadi catatan desa sehingga dimunculkan dalam pertemuan masyarakat yang kemudian dijadikan kesepakatan dan ditetapkan menjadi peraturan desa."

hal tersebut dikuatkan dengan informasi yang disampaikan dua narasumber lain, sebagai berikut :

"Sampai dengan saat ini kejadian kebakaran lahan agak berkurang, karena lahan dikerjakan terus menerus maka otomatis parit batas lahan dikerjakan, tersier dikerjakan sehingga otomatis mengurangi merembetnya kebakaran dan disamping itu karena adanya peraturan desa yang menyebutkan siapa yang membakar baik disengaja maupun tidak disengaja apabila merugikan lahan tetangganya dikenakan ganti rugi, kalau lahan tetangganya ada kebun kopi maka ganti ruginya Rp. 25.000 tiap pohon dan pohon kelapa Rp. 50.000 per pohon dan kalau lahan tersebut lahan

kosong tetapi jika lahan telah disemprot maka ya ganti rugi obat semprotnya.”

”Pernah ada kejadian di RT saya, ada orang tua membakar kemudian merembat ke kebun kelapa tetangganya sehingga kebun kelapa tersebut terbakar sekitar 40 pohon dan pihak korban minta ganti kerugian yang kemudian diganti lahan seluas setengah hektar. Kejadian lain juga pernah dan itu juga membakar kebun kelapa namun skala lebih luas dan hal tersebut juga diselesaikan melalui kesepakatan ganti kerugian.”

Sedangkan untuk kesepakatan antar petani, biasanya masih belum dibukukan dan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui tokoh berpengaruh di masyarakat. Kesepakatan antar masyarakat tersebut juga memuat aspek ganti kerugian, hal tersebut sesuai keterangan yang disampaikan seorang narasumber, sebagai berikut :

”Kalau di sini jika ada kejadian tersebut ya masyarakat sendiri yang menyelesaikannya secara kekeluargaan, kalau sampai tidak bisa ya diselesaikan di tingkat RT jika belum bisa ya ke tingkat desa.”

Hal senada juga disampaikan beberapa narasumber, sebagai berikut :

”Aturan desa tidak ada, namun kesepakatan antar kelompok tani sih ada, dimana apabila ada petani yang membakar sampai merembet ke lahan tetangganya hingga menyebabkan kerugian maka dikenakan sanksi ganti rugi.”

”Kalau aturan desa belum ada, namun jika ada masyarakat yang membakar lahan dan merembet ke lahan tetangganya apalagi lahan tersebut sudah disemprot maka yang membakar tadi harus mengganti biaya obat karena kalau sudah terbakar maka rumput akan tumbuh subur yang akhirnya tidak bisa ditanami.”

"Tidak ada, tapi kalau sampai ada lahan kawan yang terbakar apalagi yang sudah disemprot ya harus ganti, itu hanya kesepakatan antar petani saja tidak ada aturan resminya."

"Kalau ada petani yang membakar lahan dan sempat merembet ke lahan petani lain maka, jika lahan yang terbakar itu adalah lahan yang sudah disemprot dan belum ditanami maka harus mengganti biaya semprot dan biaya obat herbisida namun kalau yang terbakar itu lahan yang sudah ada tanaman padinya maka harus ganti seperti diatas ditambah biaya tanam padi. Oleh karena itu kalau masyarakat mau membakar lahan mereka memang menjaga hati-hati sekali. Aturan mengenai hal tersebut tidak ada, yang ada sekarang hanya penyelesaian secara kekeluargaan saja." (Foto wawancara pada Lampiran 2).

"..... saya mengumpulkan warga kira-kira tahun 1990-an. Saya kumpulkan karena banyak warga masyarakat yang membakar lahan kemudian ditinggal sehingga sering merembet ke lahan tetangganya, saya pikir hal ini kalau dibiarkan saja akan menjadi masalah. Dari pertemuan itu warga sepakat kalau sampai membakar lahan kawan harus didenda, dendanya untuk 1 hanggar (ukuran 10 meter x 10 meter) yang terbakar dikenakan denda uang sebesar sepuluh ribu rupiah." (Foto wawancara pada Lampiran 4).

4.3.4. Penanggulangan Kebakaran Lahan Pertanian di Kecamatan Rasau Jaya

Kebakaran lahan pada setiap musim kemarau hampir dipastikan setiap tahun pasti terjadi di Kecamatan Rasau Jaya. Berdasarkan sumbernya, kebakaran lahan dibedakan menjadi dua, yaitu karena kegiatan pertanian masyarakat dan kegiatan non-pertanian. Sumber api yang berasal dari kegiatan pertanian relatif jarang terjadi, hal ini dikarenakan masyarakat telah menerapkan sistem pertanian Tanpa Olah Tanah untuk pertanian padi dan pembakaran terkendali. Namun demikian upaya pembakaran mempunyai resiko terjadinya kebakaran lahan, hal ini disebabkan karena adanya api loncat. Api loncat dapat

berasal dari loncatan api akibat terpelantingnya ranting kering yang terbakar atau dapat pula karena api terbang akibat terbakarnya sarang tikus ataupun burung yang terbawa angin dan jatuh ke tempat lain yang akhirnya menyebabkan kebakaran lahan yang tidak diinginkan.

Kebakaran lahan pertanian yang tidak diinginkan dilakukan pemadaman oleh masyarakat secara gotong royong, dilakukan secara spontan tanpa harus menunggu komondo. Semangat gotong-royong masih kental dijumpai dalam keseharian masyarakat Kecamatan Rasau Jaya. Penanggulangan kebakaran lahan lebih diutamakan pada lahan yang mempunyai potensi yaitu lahan yang telah ditumbuhi tanaman produktif, seperti kebun kelapa, kopi, karet dan perkebunan lainnya serta aset-aset berharga lain yang dimiliki masyarakat, sedangkan apabila kebakaran terjadi pada lahan yang tidak menghasilkan atau tidak terdapat aset berharga ataupun tanaman produktif masyarakat maka cenderung dibiarkan saja dengan harapan kebakaran akan padam dengan sendirinya ketika tidak ada bahan lagi yang terbakar, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi merembetnya api ke lahan pertanian produktif adalah dengan melokalisir menjalarnya api. Kebakaran pada lahan ini akan diuraikan tersendiri pada sub bagian lain. Hal tersebut sesuai keterangan yang disampaikan salah seorang narasumber sebagai berikut :

"Kalau ada kebakaran ya kita lokalisir saja dekat kebun atau lahan yang memang ada tanamannya. Caranya dengan membuat parit kira-kira jangan sampai merembet ketempat kita kalau memadamkan yang kebakaran tersebut ya tidak mungkin." (Foto wawancara pada Lampiran 3)

Hal senada juga disampaikan beberapa narasumber, sebagai berikut :

"Kalau kebakaran masih kecil dan bisa dikendalikan ya kita matikan dengan alat manual secara gotong royong, namun kalau lokasi kebakaran letaknya jauh apalagi sudah meluas dan sampai apinya besar hingga masuk ke bawah yang tidak ada tanamannya ya dibiarkan saja. Yang kita lakukan hanya antisipasi pada lahan yang dekat-dekat saja ya lahan milik kita sendiri itupun kalau di

lahan yang ada tanamannya baru disitu kita lokalisir untuk dipadamin.”

”Kalau ada kebakaran di lahan pertanian biasanya masyarakat ramai-ramai memadamkan api tidak perlu ada komando-komandoan.”

”Kalau lahan yang terbakar dekat pemukiman atau yang sampai mengancam warga ya gotong-royonglah untuk memadamkannya.”

”Kalau ada kebakaran kita padamkan secara gotong royong apalagi kalau sudah merembet lahan kita yang ada tanamannya.”

”Kalau kebakaran lahan dan kebetulan ada tanamannya maka bergotong-royong mematikan, namun kalau api sudah meluas biasanya kita minta bantuan regu pemadam Manggala Agni.”
(Foto wawancara pada Lampiran 1)

”Ya masyarakat akan mengamankan lokasi lahannya masing-masing terutama yang ada tanamannya, jika membakar lokasi yang tidak ada tanamannya masyarakat akan minta bantuan pemadaman dari regu pemadam Manggala Agni.”

4.4. Tanaman Tahunan dan Hortikultura Sebagai Alternatif Pencegahan Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya

Kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya yang setiap tahun terjadi lebih disebabkan karena kegiatan pertanian tanaman pangan semusim, seperti pertanian padi dan jagung. Pertanian pangan semusim cenderung membuka lahan dengan cara bakar dan akan diulang dan terus diulang setiap kali akan menyiapkan lahan. Hal tersebut berbeda dengan penyiapan lahan untuk kegiatan pertanian hortikultura dan tanaman tahunan yang relatif tidak dilakukan pembakaran setiap tahun.

Pertanian tanaman tahunan

Pertanian tanaman tahunan sangat efektif mencegah terjadinya kebakaran lahan karena kegiatan pembakaran hanya mungkin dilakukan sekali, yaitu pada saat penyiapan lahan awal sedangkan setelah tanaman tumbuh tidak lagi menggunakan cara bakar. Tanaman tahunan yang telah dikembangkan masyarakat Kecamatan Rasau Jaya diantaranya adalah : kelapa, karet, kopi, coklat, pinang dan gaharu serta berbagai jenis buah-buahan seperti rambutan, mangga, belimbing dan durian.

Tabel 4.12.
Luas Tanaman Tahunan di Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2007

No.	Desa	Kelapa	Kelapa sawit	Pinang	Kopi	Coklat	Karet	Gaharu
1.	Rasau Jaya Umum	50,00	10,00	3,00	10,00	1,00	0,00	0,00
2.	Rasau Jaya 1	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rasau Jaya 2	25,00	60,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
4.	Rasau Jaya 3	28,00	30,00	13,00	9,00	0,00	58,00	8,00
5.	Bintang Mas	97,50	30,00	15,00	7,50	3,00	7,00	0,00
6.	Pematang Tujuh	135,00	0,00	4,00	30,00	0,00	10,00	0,00
Jumlah Total		343,50	130,00	40,00	56,50	4,00	80,00	8,00

Sumber : Profil Desa di Kecamatan Rasau Jaya, 2007



Gambar 4.8. Tanaman karet sudah menghasilkan di Desa Rasau Jaya 3. Sumber : Rekaman Peneliti, April 2008.



Gambar 4.9. Tanaman Kelapa Desa Bintang Mas. Sumber : Rekaman Peneliti, April 2008.

Dilihat dari luasannya maka Desa Pematang Tujuh memiliki luas tanaman tahunan terbesar, disusul Desa Bintang Mas, Desa Rasau Jaya 3, Desa Rasau Jaya 2, Desa Rasau Jaya Umum dan Desa Rasau Jaya 1. Desa Rasau Jaya 1 memiliki luas lahan tanaman tahunan paling sedikit, hal tersebut dikarenakan di Desa Rasau Jaya 1 telah berkembang menjadi pusat perdagangan, jasa dan perkantoran. Luas tanaman tahunan dan buah-buahan di Kecamatan Rasau Jaya dapat dilihat pada tabel 4.12. dan 4.13.

Tabel 4.13.
Luas Tanaman Buah-buahan di Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2007

No.	Desa	Rambutan	Mangga	Belimbing	Durian
1.	Rasau Jaya Umum	10,00	2,00	2,00	1,00
2.	Rasau Jaya 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rasau Jaya 2	5,00	0,50	0,00	0,00
4.	Rasau Jaya 3	0,00	4,00	0,00	0,00
5.	Bintang Mas	5,00	0,50	0,50	0,50
6.	Pematang Tujuh	5,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Total		25,00	7,00	2,50	1,50

Sumber : Profil Desa di Kecamatan Rasau Jaya, 2007

Pertanian tanaman hortikultura

Selain jenis buah-buahan, tanaman yang dikembang adalah tanaman hortikultura. Salah satu jenis tanaman hortikultura yang saat ini sedang dikembangkan secara besar-besaran adalah, nanas. Nanas merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh di lahan gambut walaupun tanpa perlakuan khusus. Pengembangan jenis ini sangat bermanfaat sebagai upaya untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar. Jenis ini mulai bergairah

dikembangkan karena produksi yang dihasilkan petani rencananya akan ditampung oleh pabrik pengolahan konsentrat nanas yang saat dalam tahap pembangunan di Kecamatan Sungai Raya, kecamatan tetangga.

Bedasarkan informasi dari Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya kapasitas terpasang pabrik pengolahan nanas adalah 30 ton/ jam atau setara luasan lahan tanaman nanas 5 hektar/ hari sehingga potensi pengembangan nanas diperkirakan memerlukan luasan lebih kurang 15.000 hektar. Luasan kebun nanas rakyat di Kecamatan Rasau Jaya saat ini baru seluas lebih kurang 167 hektar dan kebun nanas bantuan program dari Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat seluas 500 hektar pada tahun 2007 dan untuk tahun 2008 direncanakan akan ditanam kembali seluas 250 hektar.

Nanas merupakan jenis yang mudah tumbuh, tidak memerlukan perawatan intensif dan apabila telah sampai panen sekali maka hampir setiap hari dapat dipastikan akan ada panen tergantung perawatan saja. Perawatannya pun tidak repot, yang dilakukan masyarakat selama ini adalah upaya penyiangan dan sedikit tambahan pupuk saja.

Selain tanaman nanas, tanaman hortikultura lain juga telah dikembangkan oleh di enam desa walaupun masih dalam skala yang masih kecil. Belum berkembangnya pertanian jenis ini dikarenakan keterbatasan petani baik permodalan maupun penguasaan pasar. Tanaman hortikultura yang telah dikembangkan antara lain cabai, tomat, sawi, mentimun, buncis, terong, semangka dan melon. Produk pertanian yang dihasilkan saat ini baru memenuhi sebagian kecil kebutuhan masyarakat. Saat ini, kebutuhan sayur mayur masih dipasok dari luar daerah, bahkan luar Kalimantan Barat. Kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat terhadap melon dan semangka saat ini sebagian kecil telah dipenuhi oleh petani di Kecamatan Rasau Jaya yang telah dikembangkan di dua desa yaitu Desa Rasau Jaya 3 dan Desa Pematang Tujuh.

Penyiapan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman hortikultura, telah menerapkan pengolahan tanah secara maksimal, penyiapan lahan dengan cara bakar hanya sekali dilakukan yaitu pada saat pertama kali membuka lahan sedangkan untuk selanjutnya tidak menggunakan cara bakar lagi karena tanah

telah diolah setiap tahun, bahkan serasah dan rerumputan yang ada telah dimanfaatkan oleh petani sebagai kompos sehingga praktis tidak ada lagi kegiatan pembakaran lahan. Hal tersebut sesuai keterangan yang disampaikan narasumber, sebagai berikut :

"... buka pertama lahan memang harus dibakar karena memang banyak semaknya, namun untuk selanjutnya tidak perlu bakar lagi kan sudah bertani menetap. Seperti yang kami lakukan hanya bakar sekali selanjutnya diolah dan di pupuk saja. Memang sekarang sudah tidak membakar lagi, lihat lahannya juga, sehingga memang sudah tidak membakar lagi."

"..... saat ini mengolahan tanah sesuai teori pertanian, karena kalau tanam sayur dan buah asal-asalan bisa tidak panen. Menerapkan sistem pengolahan tanah dan menggunakan pupuk." (Foto wawancara pada Lampiran 3).

Pertanian dilahan gambut pada kenyataannya dapat dilaksanakan tanpa pola bakar dan dapat dikerjakan secara terus menerus tanpa perlu adanya sistem bera. Gambut merupakan tanah organik yaitu tanah sisa tumbuh-tumbuhan yang masih kasar dan belum mengalami proses pelapukan. Gambut yang sering diolah akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tekstur tanahnya akan menjadi lebih kecil sehingga mampu mengikat air yang sangat dibutuhkan tanaman, sehingga tanah akan menjadi media tanam yang baik untuk tanaman.

Luas lahan yang tanami jenis hortikultura di Kecamatan Rasau Jaya dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.14.
Luas Tanaman Hortikultura di Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2007

No.	Desa	Melon	Semangka	Cabai	Tomat	Sawi	Mentimun	Buncis	Terung
1.	Rasau Jaya Umum	0,0	0,0	6,0	1,0	1,0	3,0	1,0	2,0

2.	Rasau Jaya 1	0,0	0,0	2,5	2,5	1,5	4,0	0,5	3,0
3.	Rasau Jaya 2	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0
4.	Rasau Jaya 3	4,0	4,0	6,0	3,0	0,0	2,0	0,0	3,0
5.	Bintang Mas	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	0,5	0,5
6.	Pematang Tujuh	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	5,0	0,0	1,0
Jumlah Total		4,0	6,0	16,0	10,0	2,5	16,0	2,0	9,5

Sumber : Profil Desa di Kecamatan Rasau Jaya, 2007

4.5. Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya

Kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya yang setiap tahun tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertanian tanaman pangan semusim masyarakat, hal tersebut terjadi karena pertanian yang dilakukan sampai saat ini masih menggunakan cara bakar dalam kegiatan penyiapan lahannya. Berbagai upaya pencegahan telah dilaksanakan, sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa masyarakat telah melakukan segenap upaya untuk mencegah timbulnya rembetan api pada saat kegiatan pembakaran lahan. Namun pada kenyataannya di Kecamatan Rasau Jaya masih saja terjadi kebakaran lahan. Terkait dengan masih adanya kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya, berikut diuraikan apa dan dimana kebakaran tersebut terjadi dan penyebab kebakaran tersebut masih terus terjadi serta penanggulangan yang dilakukan.

4.5.1. Kebakaran di Lahan Tidur

Kebakaran lahan yang sering terjadi adalah kebakaran pada lahan tidur. Lahan tidur atau yang oleh masyarakat sekitar lebih dikenal dengan sebutan "bawas" atau lahan bersemak merupakan lahan yang telah dimiliki seseorang namun tidak pernah dikerjakan untuk kegiatan pertanian sehingga bersemak. Lahan di Kecamatan Rasau Jaya yang bergambut sangat subur ditumbuhi rumput, lahan yang tidak dikerjakan selama satu tahun saja akan ditumbuhi rumput tebal dan pakis-pakisan, apalagi lahan yang tidak dikerjakan lebih dari satu tahun dapat dipastikan

akan ditumbuhi tumbuhan berkayu (seperti jenis akasisa) disamping semakin tebalnya semak yang ada. Lahan tersebut biasanya dimiliki oleh masyarakat kota, sebagai inventasi atau tabungan tanah yang luasannya mencapai 26,9 % dari luas wilayah Kecamatan Rasau Jaya. Luas lahan terlantar di Kecamatan Rasau Jaya dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15.
Luas Lahan Terlantar di Kecamatan Rasau Jaya

No.	Nama Desa	Luas Desa (Ha)	Luas Lahan Terlantar (Ha)
1.	Rasau Jaya Umum	14.402,00	3.580,00
2.	Rasau Jaya 1	1.392,00	15,00
3.	Rasau Jaya 2	3.625,00	300,00
4.	Rasau Jaya 3	2.130,50	833,00
5.	Bintang Mas	2.500,00	1.803,00
6.	Pematang Tujuh	4.098,00	1.000,00
Jumlah Total		28.147,50	7.585,00

Sumber : Profil Desa di Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2007

Pada saat musim kemarau lahan tidur sangat rawan kebakaran, hal ini dikarenakan menumpuknya serasah gulma terutama pakis-pakisan sehingga apabila ada api sedikit saja dapat dipastikan akan menimbulkan kebakaran hebat. Sumber api yang menimbulkan kebakaran lahan pada lahan tidur adalah api loncat dapat berasal dari loncatan api akibat terpelantingnya ranting kering yang terbakar atau karena api terbang akibat terbakarnya sarang tikus ataupun burung yang terbawa angin dan jatuh ke tempat lain yang akhirnya menyebabkan kebakaran lahan, disamping ada pula karena unsur kesengajaan. Bagi masyarakat kebakaran pada lahan bawas bukan merupakan target prioritas untuk dipadamkan, hal tersebut dikarenakan bawas merupakan sumber masalah masalah bagi petani. Sumber masalah karena bawas merupakan tempat bersarangnya segala jenis hama tanaman pertanian seperti tempat bersarang tikus, belalang, burung, babi hutan, kera (monyet) serta macan akar yang senantiasa mengganggu ternak

masyarakat, sehingga jika ada kebakaran masuk ke lahan tersebut maka cenderung dibiarkan saja oleh masyarakat.

Bahkan lahan bekas kebakaran bawas juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menanam jagung, namun demikian hal tersebut masih memerlukan sedikit tenaga untuk membersihkan lahan dan modal bibit. Hasil panen dapat ditunggu lebih kurang sekitar empat bulan kemudian. Jagung yang ditanam biasanya jagung pipil karena tidak memerlukan perawatan khusus seperti jagung manis. Hal tersebut sesuai informasi seorang narasumber, sebagai berikut:

"Kalau kebakaran lahan yang terjadi di Rasau Jaya 2 sebenarnya adalah kebakaran yang terjadi di lahan tidur, lahan seperti ini biasanya dimiliki oleh orang luar desa sehingga jarang digarap akibatnya lahan lama-kelamaan menjadi "bawas" semak namun kebakaran tersebut juga tidak disengaja. Kadang petani sebelahny menyiapkan lahan dengan cara dibakar kemudian ada api loncat ke "bawas", akibatnya akan membakar lahan tersebut. Api kalau sudah membakar bawas ya itu yang jadi masalah terutama asapnya"

Hal senada juga disampaikan beberapa narasumber, sebagai berikut:

"Kebakaran besar yang sampai menimbulkan asap besar itu adalah kebakaran di lahan tidur." (Foto wawancara pada Lampiran 3).

"Kebakaran yang menimbulkan asap besar itu biasanya kebakaran di lahan tidur, karena lahan kalau kebakaran siapa yang menjaganya, kan tidak ada yang mengerjakan." (Foto wawancara pada Lampiran 4)

"Namun yang paling sering terjadi ya di lahan tidur, lahan yang lama tidak dikerjakan dan bersemak tinggi. Bisa jadi ada orang iseng, karena mereka sehari-hari lewat jalan disitu ketika hendak berburu atau aktifitas lainnya dan pada saat musim kemarau mereka membakar semak tersebut supaya lapang yang akhirnya api merembet kemana-mana."

"Kebakaran yang paling sering adalah kebakaran di lahan kosong, lahan lama tidak dikerjakan. Jika ada orang yang membakar, kalau kena angin kemudian ada api loncat dan masuk ke lahan tidur tersebut akhirnya kebakaran besar. Kalau api sudah masuk kesitu ya dibiarkan saja, yang punya juga tidak peduli. Apalagi lahan seperti itu merupakan sumber penyakit padi sebagai tempat hidup hama tikus yang dapat merusak tanaman dan macan akar yang sering makan ayam peliharaan, yang tentunya akan mengganggu masyarakat. Jadi kalau lahan yang tidak dikerjakan kalau sampai terbakar ya dibiarkan saja biar aman tanaman kita."
(Foto wawancara pada Lampiran 4).

"Kebakaran yang terjadi di lahan kosong, lahan inilah yang sebenarnya banyak masalah di sini kalau sampai api masuk lahan tersebut biasanya kebakaran tidak dipadamkan tetapi dibiarkan saja. Karena lahan kosong merupakan sarang hama tanaman seperti sarang tikus, babi dan kera. Kalau sudah membakar lahan tersebut masyarakat malah senang karena lahan menjadi lapang dan hama akan menjauh, disamping itu lahan yang terbakar bisa juga ditanami jagung."

4.5.2. Penanggulangan Kebakaran di Lahan Tidur

Kebakaran di lahan tidur atau yang lebih dikenal dengan kebakaran "bawas" atau lahan bersemak menyebabkan kebakaran besar disertai asap yang tebal. Kebakaran semacam ini bagi masyarakat sekitar bukan merupakan bagian tugas untuk dipadamkan. Alasan ini terungkap karena pada lahan seperti itu tidak terdapat sesuatu yang perlu diselamatkan, karena biasanya hanya dibiarkan kosong tanpa ditanami. Lahan yang menjadi target pemadaman masyarakat adalah lahan yang memiliki potensi ekonomi saja. Disamping itu, lahan tidur juga merupakan sumber masalah bagi pertanian masyarakat sehingga apabila terjadi kebakaran di lahan tidur masyarakat cenderung membiarkan saja bahkan apabila lahan yang terbakar cukup luas dan bagus untuk ditanami, masyarakat memanfaatkannya untuk bertanam jagung.

Bagi pemerintah kebakaran lahan dimanapun lokasinya haruslah menjadi perhatian karena hal tersebut akan menyebabkan gangguan ekonomi, kesehatan dan hubungan antar negara. Melalui kebijakan sterilisasi Bandara Supadio dari kabut asap, pemerintah mengharap peran serta masyarakat guna membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan yang ada. Guna mengatasi kebakaran besar di lahan yang tidak mungkin ditangani secara manual akibat besarnya kobaran api, pemerintah provinsi selaku Koordinator Pusdalkarhutla meminta seluruh stakeholder yang memiliki sumberdaya baik peralatan maupun tenaga untuk membantu mengatasi segala jenis kebakaran yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat.

Terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya, pemerintah sangat terbantu dengan kehadiran Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) Manggala Agni bentukan Departemen Kehutanan. Brigdalkarhutla merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Di Kalimantan Barat telah terbentuk lima Daerah Operasi (Daop) Brigdalkarhutla, yaitu : Daop Pontianak, Daop Singkawang, Daop Sintang, Daop Semitau dan Daop Ketapang. Daop Pontianak inilah yang banyak membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya karena Brigdalkarhutla daop ini berkedudukan di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya.

Secara khusus bidang tugas Brigdalkarhutla adalah kawasan hutan konservasi dan hutan lainnya sesuai dasar pembentukannya, sedangkan dalam kegiatan penanggulangan kebakaran lahan Brigdalkarhutla lebih karena fungsi lain yaitu merupakan suatu komponen yang tergabung dalam Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorlak PB dan P) maupun Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) yang membantu pemerintah dalam menangani pengendalian kebakaran lahan.

Brigdalkarhutla di Kecamatan Rasau Jaya sangat banyak membantu kegiatan pemadaman kebakaran lahan, apalagi kalau

kebakaran lahan yang terjadi tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat karena peralatan yang dimiliki memang masih manual.

Masyarakat biasanya meminta bantuan apabila terjadi kebakaran lahan yang besar baik dilahan pertanian masyarakat maupun pada lahan tidur, karena bagaimanapun apabila dibiarkan terus menerus maka rembetan api juga akan mengenai lahan tanaman masyarakat itu sendiri. Hal tersebut sesuai informasi beberapa narasumber, sebagai berikut :

"Kalau kebakaran masih kecil ya kita matikan sendiri, tetapi kalau sudah meluas dan besar kita tidak mampu madamin sendiri paling-paling tinggal minta tolong regu pemadam kebakaran lahan saja." (Foto wawancara pada Lampiran 1).

"Dengan peralatan yang ada, masyarakat hanya dapat memadamkan kebakaran kecil-kecil saja. Kalau sudah menjadi kebakaran yang besar apalagi sudah sampai membakar bawas maka upaya yang dilakukan adalah melokalisir kebakaran di lahan yang mempunyai nilai ekonomi saja sementara yang membakar bawas ya dibiarkan saja, paling-paling juga minta bantu pemadam kebakaran yang ada di sekunder C."

"Untuk lahan masyarakat maka upaya yang dilakukan adalah memadamkan secara gotong-royong. Namun kalau yang terbakar jauh dan bukan pada lahan yang menghasilkan ya biasanya dibiarkan saja paling juga minta tolong Manggala Agni."

"Kalau kebakaran lahan dan kebetulan ada tanamannya maka bergotong-royong mematikan, namun kalau api sudah meluas biasanya kita minta bantuan regu pemadam Manggala Agni."

"Kalau ada kebakaran di lahan pertanain biasanya masyarakat ramai-ramai memadamkan api tidak perlu ada komando-komandoan, namun kalau apinya sudah besar ya tidak bisa ditangani. Kalau sudah gitu minta tolong pemadam Manggala Agni."

"Kalau kebakaran lahan dan kebetulan dekat lahan masyarakat yang ada tanamannya maka kita mematikan ramai-ramai, namun kalau api sudah meluas biasanya kita minta bantuan regu pemadam Manggala Agni."

" Jika ada kebakaran kecil-kecil yang bisa ditangani ya bersama-sama masyarakat menanganinya, namun jika sampai besar dan tidak bisa ditangani maka melaporkannya ke pihak Manggala Agni."

Hasil wawancara dengan salah satu narasumber dari anggota Pemadam Kebakaran Lahan Manggala Agni diperoleh informasi bahwa di wilayah Desa Rasau Jaya Umum kejadian kebakaran lahan terbanyak, disusul Desa Rasau Jaya 3, Desa Bintang Mas, Desa Rasau Jaya 2, Desa Pematang Tujuh dan Desa Rasau Jaya 1, secara lengkap informasi tersebut disajikan dalam tabel 4.16. dibawah ini.

Tabel 4.16.
Luas Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya

No.	Nama Desa	Tahun 2007		Tahun 2008	
		Frekuensi	Luas (Ha)	Frekuensi	Luas (Ha)
1.	Rasau Jaya Umum	20	30,00	7	82
2.	Rasau Jaya 3	12	25,00	4	20
3.	Bintang Mas	7	14,00	1	4
4.	Rasau Jaya 2	7	14,00	-	-
5.	Pematang Tujuh	4	10,00	-	-
6.	Rasau Jaya 1	1	3,00	-	-

Jumlah	51	96,00	12	106,00
--------	----	-------	----	--------

Sumber : Manggala Agni Daop Pontinak, Maret 2008

Saat pemadaman kebakaran lahan, Tim Pemadaman kebakaran Manggala Agni juga dibantu oleh masyarakat sekitar, hal tersebut sesuai informasi narasumber, sebagai berikut :

"kalau ada kebakaran dan melaporkannya ke Satgas pemadam Manggala Agni, disamping itu bersama-sama dengan masyarakat turut membantu Satgas Manggala Agni memadamkan api."

Namun demikian tidak semua lahan yang terbakar dapat dilakukan pemadaman, hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah yang perlu diamankan, lokasi kebakaran lahan sulit dijangkau, sumber air yang tidak tersedia serta tidak adanya sarana jalan yang dapat diakses hingga lokasi kebakaran.

4.6. Persepsi Masyarakat Kecamatan Rasau Jaya terhadap Asap, Pembakaran dan Kebakaran Lahan

Persepsi masyarakat Kecamatan Rasau Jaya terhadap asap, pembakaran dan kebakaran lahan tidak dapat dipisahkan secara serta merta dengan pola hidup dan kebiasaan masyarakat. Persepsi yang didefinisikan sebagai suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Informasi tersebut dapat melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Bagi sebagian besar masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya asap, pembakaran dan kebakaran lahan merupakan hal yang biasa. Masyarakat telah menggunakan cara bakar dalam setiap penyiapan lahanya sehingga asap dan kebakaran bagi mereka merupakan hal yang biasa, bahkan merasa ada hal yang aneh jika disaat musim kemarau tidak ada yang membakar dan asap. Asap dan pembakaran lahan sudah sangat akrab dengan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan salah seorang narasumber, sebagai berikut :

"Karena membakar sudah biasa sehingga kebakaran dan asap sudah tidak lagi heran, sudah biasa saja."

yang didukung oleh beberapa narasumber lain, sebagai berikut :

"Kalau ada kebakaran dan asap orang sini sudah biasa, asap tebalpun tidak ada yang memakai masker sudah biasa saja."

"Ya sudah biasa, kalau mau tanam memang harus dibakar jadi api dan asap itu sudah biasa."

"Kalau ada pembakaran dan asap sih biasa saja, habis kalau mau tanam memang harus dibakar jadi api dan asap itu sudah biasa."

"Bagi masyarakat ya sudah biasa jadi tidak lagi heran, paling-paling kita hanya bertanya-tanya lokasi mana yang kebakaran."

Namun demikian, sebageian kecil masyarakat memandang asap dan kebakaran lahan sebagai suatu yang merugikan. Hal tersebut dikarenakan terganggunya beraktifitas, berdampak terhadap kesehatan terutama batuk-batuk, pilek, sesak nafas dan mata pedih. tetapi mereka hanya dapat mengeluh dan menerima keadaan yang setiap tahun selalu terjadi dan berulang terus. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan salah seorang narasumber, sebagai berikut :

"Kalau bakaran biasa sih biasa saja, tetapi kalau sudah kebakaran besar dan banyak asapnya ya ngeluh juga sih tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa habis kalau kemarau semua membakar."

yang didukung oleh beberapa narasumber lain, sebagai berikut :

"Kita rugi kalau banyak asap tidak bisa kerja, sesak napas, mau bertani tidak bisa. Karenanya jika ada lahan bawas besar akan dibakar kami cegah, asapnya yang tidak mampu, mata pedih dan napas sesak."

"Kita rasa sih tidak enak, tetapi mau gimana lagi. Kalau musim kemarau, asap banyak dan masyarakat pun banyak juga yang sakit batuk, pilek kalau sudah seperti itu tahan-tahanlah mau gimana lagi."

"Kita rasa sih tidak enak, kalau musim asap banyak yang sakit batuk, pilek tetapi ya terpaksa, tahan-tahanlah mau gimana lagi masyarakat membakar semua kok."

4.7. Program Pemerintah Terkait dengan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan

Sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 267 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Action Plan Sterilisasi Kawasan Bandara Supadio Pontianak dari Asap Akibat Kebakaran Lahan, disebutkan bahwa diperlukan langkah-langkah nyata di lapangan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kabut asap di sekitar kawasan Bandara Supadio Pontianak. Langkah-langkah tersebut antara lain : (a) melakukan inventarisasi terhadap kepemilikan lahan, petani, jenis tanah dan tanaman, (b) melakukan pencegahan pembakaran melalui kegiatan penyuluhan/ sosialisasi oleh beberapa instansi teknis terkait, (c) memberikan bantuan sarana prasarana pertanian serta teknologi tepat guna sebagai kompensasi agar petani tidak melakukan pembakaran, (d) membuat model atau demplot pengelolaan lahan tanpa bakar, (e) melakukan pengawasan di sekitar Bandara Supadio agar tidak terjadi kebakaran dan pembakaran lahan, dan (f) apabila terjadi kebakaran lahan agar dilakukan upaya mobilisasi penanggulangan kebakaran lahan.

Langkah-langkah nyata sebagaimana disebutkan diatas, direspon oleh dinas/ instansi terkait dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan dinas/ instansi tersebut. Secara rinci program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing dinas/ instansi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.17.

Tabel 4.17.

Daftar Program Kerja/ Kegiatan Dinas/ Instansi Terkait Pengendalian Kebakaran Lahan.

Dinas/Instansi	Program Kerja/ Kegiatan
<u>Kabupaten Kubu Raya</u>	
Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	<p>Pengembangan Intensifikasi Pertanian</p> <p>a. Pengadaan bibit (padi, padi hibrida, jagung, kedelai) b. Pengadaan pupuk (urea, SP 36, KCl)</p> <p>Pengembangan Pertanian Lahan Kering</p> <p>a. Pengembangan sayuran dan buah tropis (nanas)</p>
Dinas Kehutanan, Perkebunan dan ESDM	<p>Bidang Perkebunan:</p> <p>a. Peremajaan tanaman karet b. Peremajaan tanaman pinang c. Peremajaan tanaman kakao d. Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar</p> <p>Bidang Kehutanan (belum ada)</p>
Kantor Lingkungan Hidup	<p>Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan</p> <p>Pengembangan produksi ramah lingkungan</p> <p>Pemetaan Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>Pengadaan alat pemadam kebakaran</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam KSDA</p>
<u>Prov Kalimantan Barat</u>	
Dinas Pertanian	Pengembangan nanas seluas 750 Ha di Kec. Rasau Jaya
Dinas Kehutanan	<p>Inventarisasi lokasi kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Inventarisasi potensi sumberdaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Pelatihan petugas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p>

	<p>Pelatihan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (90 orang : Rasau Jaya 1, Rasau Jaya Umum, PT)</p> <p>Penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Penanganan yustisi kebakaran hutan dan lahan</p>
Dinas Perkebunan	<p>Rintisan Model Pembukaan Lahan Tanpa Bakar/ PLTB 20 Ha</p> <p>a. Bantuan bibit karet</p> <p>b. Bantuan benih intercorp (IC)</p> <p>c. Pembuatan Kompos</p>
Bapedalda	<p>Apel siaga kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Pembinaan kelompok masyarakat di 9 Kec rawan kahutla</p> <p>Pengaktifan dan penguatan posko penanggulangan karhutla</p> <p>Koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Penyuluhan dalam rangka pengendalian asap</p>

Sumber : Hasil wawancara dengan narasumber (2008)

4.8. Pembentukan Kelompok Peduli Api (KPA) sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan yang setiap tahun terjadi terutama bersumber dari kegiatan penyiapan lahan pertanian khususnya di sekitar Bandara Supadio Pontianak, pemerintah melakukan upaya pencegahan melalui aksi nyata di lapangan. Upaya tersebut diwujudkan dengan membentuk Tim Action Plan Sterilisasi Kawasan Bandara Supadio dari asap melalui Keputusan Gubernur. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk menanggulangi kebakaran lahan di sekitar Bandara Supadio Pontianak adalah dengan melakukan mobilisasi penanggulangan kebakaran lahan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat sekitar kawasan.

4.8.1. Dasar Pembentukan Kelompok Peduli Api

Sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 267 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Action Plan Sterilisasi Kawasan Bandara Supadio dari Asap Akibat Kebakaran Lahan, dimana salah satu tugasnya adalah melakukan upaya mobilisasi penanggulangan kebakaran apabila terjadi kebakaran lahan di sekitar Bandara Supadio. Mengingat keterbatasan pemerintah baik dari pendanaan maupun sarana prasarana dalam penanganan kebakaran lahan tersebut maka salah satu langkah yang diambil adalah pelibatan masyarakat.

Pelibatan masyarakat diharapkan akan dapat membantu penanggulangan kebakaran lahan yang ada, hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena pemukiman masyarakat tersebar dan dekat dengan lokasi terjadinya kebakaran lahan.

4.8.2. Tujuan Pembentukan Kelompok Peduli Api

Tujuan pembentukan Kelompok Peduli Api adalah suatu upaya pelibatan masyarakat melalui bentuk pengorganisasian anggota masyarakat guna membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan. Pembentukan Kelompok Peduli Api melibatkan masyarakat di 9 kecamatan sekitar Bandara Supadio Pontianak yang berpotensi terjadi kebakaran lahan dan asap.

4.8.3. Tugas Pokok Kelompok Peduli Api

Tugas pokok Kelompok Peduli Api (KPA) adalah : membantu SATLAKDALKARHUTLA Kecamatan dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di Desa/Kelurahan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, mengadakan pengawasan dan pemantauan terhadap lahan di Desa/Kelurahan masing-masing pada musim kemarau, melaporkan kepada SATLAKDALKARHUTLA Kecamatan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan baik yang sudah dapat ditanggulangi maupun yang belum ditanggulangi, bersama-masa dengan masyarakat menanggulangi kebakaran kecil dan kebakaran besar, mengadakan pendataan lahan yang akan dilakukan pembakaran dan memantau serta memerintahkan kepada pemilik lahan untuk menjaga selama pembakaran berlangsung, dan membuat kesepakatan desa/ adat dan sanksi-sanksinya kepada pelaku pembakaran yang tidak mengindahkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan.

4.8.4. Pendanaan dan Pembinaan Kelompok Peduli Api

Kelompok Peduli Api merupakan upaya pelibatan masyarakat secara suka rela, tidak ada anggaran operasional dan insentif khusus. Berdasarkan susunan tim, maka pembinaan Kelompok Peduli Api dilakukan oleh instansi terkait seperti Bapedalda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan, pembinaan tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam upaya pemadaman kebakaran namun juga pembinaan agar masyarakat beralih untuk menerapkan sistem pertanian tanpa bakar.

Bedasarkan informasi yang disampaikan Bapak Rb Tjipto Raharjo (Kasubbid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Bapedalda Provinsi Kalimantan Barat) yang mengatakan bahwa pembentukan Kelompok Peduli Api itu bersifat sementara, intinya adalah bagaimana membawa masyarakat agar tidak menggunakan cara bakar dalam penyiapan lahan pertaniannya karena jika kelompok terus dipertahankan tanpa upaya meningkatkan atau mengalihkan masyarakat untuk beralih dari bertani dengan cara bakar ke pola bertani tanpa bakar maka hal tersebut akan sia-sia saja.

4.9. Kelompok Peduli Api (KPA) di Kecamatan Rasau Jaya

Atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 267 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Action Plan Sterilisasi Kawasan Bandara Supadio dari Asap Akibat Kebakaran Lahan dan atas petunjuk pembentukan kelompok masyarakat sadar bahaya kebakaran lahan maka di Kecamatan Rasau Jaya sampai saat ini telah terbentuk sepuluh kelompok peduli api di enam desa. Berikut kami sajikan proses pembentukan, keanggotaan, rencana kerja dan kegiatan yang telah dilakukan kelompok.

4.9.1. Proses pembentukan Kelompok Peduli Api

Dari hasil pengumpulan data lapangan terdapat sekitar 10 Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya, terdiri dari : empat kelompok di Desa Rasau Jaya Umum, satu kelompok di Desa Rasau Jaya 1, satu kelompok di Desa Rasau Jaya 2, satu kelompok di Desa Rasau Jaya 3, satu kelompok di Desa Bintang Mas dan dua kelompok di Desa Pematang Tujuh.

Bedasarkan hasil penelusuran terhadap kesepuluh kelompok dapat diklasifikasikan dalam empat proses pembentukannya :

Kelompok Pertama :

Pembentukan kelompok hanya bersifat formalitas tanpa melibatkan peran serta masyarakat selaku anggota, kelompok tersebut adalah KPA Tanjung Wangi di Desa Rasau Jaya Umum, KPA Bina Karya di Desa Rasau Jaya 1, KPA Desa Rasau Jaya 3, serta KPA Pemuda Peduli Api dan KPA Masyarakat Peduli Api di Desa Pematang Tujuh.

Dikategorikan dalam kelompok bersifat formalitas tanpa melibatkan peran serta masyarakat selaku anggota dalam pembentukannya dibuktikan dengan hasil wawancara dengan anggota kelompok yang memiliki posisi penting dalam kelompok seperti ketua, sekretaris ataupun bendahara dan di masyarakat seperti sebagai anggota atau Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RT ataupun Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa belum pernah ada rapat resmi ataupun pembentukan kelompok peduli api. Sesuai daftar yang ada yang bersangkutan mempunyai posisi penting dalam kelompok namun pada kenyataannya tidak mengetahui kalau namanya sendiri tercantum dalam kelompok tersebut.

Kelompok Kedua :

Pembentukan kelompok hanya bersifat formalitas namun masih melibatkan masyarakat selaku anggota dalam pembentukannya, kelompok tersebut adalah KPA Maju Jaya di Desa Rasau Jaya 2 dan KPA Bhakti Mandiri di Desa Bintang Mas.

Dikategorikan dalam kelompok bersifat formalitas namun masih melibatkan masyarakat selaku anggota dalam pembentukannya dibuktikan dengan hasil wawancara dengan anggota kelompok yang memiliki posisi penting dalam kelompok seperti sekretaris ataupun bendahara dan pihak aparat desa yang kebetulan sebagai salah satu anggotanya yang mengatakan bahwa pernah ada rapat resmi yaitu rapat pembentukan Kelompok Peduli Api berkaitan adanya permintaan agar setiap desa membentuk kelompok. Proses pembentukan kelompok di Desa Rasau Jaya 2, dilakukan di rumah Kepala Desa pada tanggal 6 Nopember 2006

dengan mengundang Kepala Dusun, Ketua RW atau RT dan tokoh masyarakat yang mudah dihubungi dengan menggunakan fasilitas *short message service* (sms). Pada pertemuan tersebut kemudian disampaikan maksud dikumpulkannya masyarakat dan selanjutnya dibentuk kelompok, setelah kelompok dibentuk masyarakat yang terlibat rapat tidak mengetahui apa dan bagaimana kegiatan selanjutnya karena sampai saat penelitian dilakukan belum pernah menjalankan aktifitas.

Sedangkan untuk masyarakat Desa Bintang Mas, proses pembentukan dilakukan dengan cara mengumpulkan ketua dan anggota kelompok tani di kantor desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pertemuan tersebut masyarakat diinformasikan maksud dan tujuan dikumpulkannya kelompok tani, dan untuk selanjutnya dibentuk kelompok namun setelah dibentuk sampai saat penelitian dilakukan belum pernah ada aktifitas apapun.

Kelompok Ketiga :

Pembentukan kelompok hanya bersifat formalitas bahkan masyarakat yang terlibat tidak mengetahui bahwa pertemuan mereka adalah rapat pembentukan kelompok, kelompok tersebut adalah KPA Setia Jaya di Desa Rasau Jaya Umum.

Dikategorikan dalam kelompok bersifat formalitas bahkan masyarakat yang terlibat tidak mengetahui bahwa pertemuan mereka adalah rapat pembentukan kelompok, dibuktikan dengan hasil wawancara dengan anggota kelompok yang memiliki posisi penting dalam kelompok yang mengatakan bahwa memang ada kegiatan pertemuan, namun masyarakat menganggap bahwa pertemuan waktu itu adalah suatu kegiatan penyuluhan semata. Mereka tidak mengetahui kalau pertemuan dan tanda-tangan mereka dalam daftar hadir kemudian dijadikan dasar pembentukan Kelompok Peduli Api.

Kelompok Keempat :

Pembentukan kelompok keempat dapat dikategorikan sebagai pembentukan kelompok yang menerapkan prinsip pelibatan masyarakat

yang akan terlibat sebagai anggota kelompok. Kelompok tersebut adalah KPA Karya Mandiri dan KPA Karya Muda di Desa Rasau Jaya Umum.

Dikategorikan dalam pembentukan kelompok yang menerapkan prinsip pelibatan masyarakat dikarenakan masyarakat yang hadir diajak untuk berfikir tentang kondisi lapang tentang kebakaran lahan yang ada saat ini dan upaya yang mungkin dilakukan masyarakat untuk menanganinya. Hal tersebut dibuktikan melalui wawancara dua level yaitu Ketua KPA dan dua orang anggota KPA yang ada. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masing-masing pihak tahu proses pembentukan, pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Termasuk kepada siapa saja mereka berkoordinasi jika terjadi kebakaran lahan.

4.9.2. Keanggotaan Kelompok Peduli Api

Keanggotaan Kelompok Peduli Api adalah masyarakat petani, yaitu masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas pertanian. Di Desa Bintang Mas keanggotaan lebih didasarkan pada kelompok tani, kelompok tani dijadikan dasar pemikiran karena mereka memiliki kesamaan kepentingan yang didasarkan pada kesatuan hamparan lahan pertanian yang berdekatan sehingga upaya pencegahan kebakaran lahan pertanian diharapkan lebih efektif. Di Desa Rasau Jaya 1, Desa Rasau Jaya 2 dan Desa Rasau Jaya 3 lebih didasarkan pada pemerataan berdasarkan dusun, RW dan RT karena dari ketiga desa hanya dibentuk satu kelompok dan kelompok tersebut mewakili dusun, RW dan RT yang ada di desa tersebut. Di Desa Pematang Tujuh kelompok lebih didasarkan pada pembagian kelompok umur yaitu Kelompok Pemuda dan Kelompok Dewasa, dimana kelompok tersebut juga disesuaikan berdasarkan pembagian pemerataan ditingkat dusun, RW dan RT. Sedangkan di Desa Rasau Jaya Umum keanggotaan kelompok didasarkan atas lokasi pemukiman, hal ini terbukti bahwa antara satu kelompok dengan lainnya letaknya saling berjauhan, harapan yang diinginkan adalah petani dapat mengamankan wilayah pertaniannya dari ancaman kebakaran lahan sesuai lokasi masing-masing.

4.9.3. Rencana Kerja dan Kegiatan Yang telah Dilakukan Kelompok Peduli Api

Rencana kerja dan kegiatan yang telah dilakukan kelompok baru dilakukan oleh dua kelompok peduli api di Desa Rasau Jaya Umum. Perencanaan kegiatan kelompok tidak dibuat dengan sistematis, berdasarkan informasi dari Ketua Kelompok diketahui bahwa sebelum melakukan kegiatan kelompok terlebih dahulu berbagi tugas.

Tugas ketua lebih pada kegiatan penyuluhan, yaitu kegiatan pemberitahuan informasi terkait pembukaan lahan dengan cara dibakar kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu yang masih menggunakan cara bakar yang dilakukan tanpa mengindahkan upaya pembakaran terkendali. Masyarakat target biasanya telah diketahui karena aktifitas dan perilaku masing-masing masyarakat telah dikenal oleh hampir semua warga, sehingga tugas ini akan lebih baik diemban oleh ketua yang kebetulan mereka adalah Kepala Dusun dan Ketua RT-nya sehingga masyarakat yang akan diberi pengertian lebih hormat jika dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh anggota kelompok yaitu masyarakat pada umumnya.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pembakaran terkendali. Sebagaimana diungkapkan diatas bahwa kegiatan penyuluhan biasanya dilaksanakan oleh tokoh atau ketua masyarakat sehingga masyarakat awam akan lebih menuruti saran dan himbauan. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah mengadakan pemantauan lahan-lahan mana yang siap dibakar, menginformasikan kepada petani apabila upaya pencegahan sebelum pembakaran belum dilaksanakan secara sempurna. Disamping melaporkan jika terjadi kejadian kebakaran yang tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat. Namun demikian hasil wawancara menunjukkan bahwa sampai saat ini kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pemantauan kebakaran lahan, itupun dilaksanakan setelah terjadi kebakaran besar.

4.10. Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya tidaklah dapat serta merta dipisahkan dengan sistem pertanian mereka. Berikut diuraikan analisis alasan mengapa masyarakat masih tetap menggunakan cara bakar dalam kegiatan pembukaan lahannya, peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lahan pertanian dan mengapa sampai masih terjadi kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya.

4.10.1. Penyiapan Lahan dengan Cara Bakar Masih Dilakukan dalam Bertani Tanaman Semusim di Kecamatan Rasau Jaya

Lahan pertanian yang diusahakan masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya adalah lahan gambut dan hanya sedikit yang mengusahakan pada lahan bergambut. Menurut Depnakertrans (2007) yang disebut dengan lahan gambut adalah lahan yang ketebalan gambutnya lebih dari 50 cm, sedangkan lahan yang ketebalan gambutnya kurang dari 50 cm disebut lahan bergambut.

Kegiatan pertanian pada lahan gambut tidaklah akan jauh dengan sistem pola bakar lahan, sebagaimana yang dilakukan masyarakat Kecamatan Rasau Jaya. Pengetahuan masyarakat untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah gambut yang mempunyai kesuburan rendah, masih terbatas dengan cara bakar. Penyebaran informasi dan contoh lapangan upaya perbaikan sifat fisik dan kimia tanah gambut dengan cara-cara yang ramah lingkungan seperti pemanfaatan serasah hasil tebasan gulma dan semak belukar menjadi pupuk bokasih masih belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Bedasarkan informasi lapangan yang diperoleh peneliti, upaya memperbaiki sifat fisik dan kimia lahan gambut di Kecamatan Rasau Jaya yang telah dilakukan masyarakat diupayakan melalui tiga cara yaitu: menambahkan kapur/ dolomit, mengolah tanah dengan dicampur dengan

pupuk kandang dan ditambah abu bakaran. Kapur diperoleh dengan cara membeli, pupuk kandang diperoleh dengan cara memanfaatkan kotoran ternak milik sendiri ataupun dengan cara membeli, sedangkan abu bakaran diperoleh dengan cara membakar serasah dilahan dan cara bakar inilah yang paling banyak diaplikasikan masyarakat, karena cara bakar merupakan cara yang cepat dan murah.

Menurut Depnakertrans (2007) untuk memperbaiki sifat fisik dan atau kimia tanah gambut perlu pemberian amelioran (ameliorasi). Ameliorasi adalah upaya pemberian masukan tertentu ke dalam tanah dengan tujuan untuk memperbaiki sifat fisik dan atau kimia tanah (Departemen Pertanian, 2008). Amelioran dapat berupa bahan organik dan anorganik. Secara teoritis bahan amelioran yang ideal mempunyai sifat-sifat kejenuhan basa tinggi, dapat meningkatkan pH gambut serta memiliki kandungan unsur hara yang lengkap, sehingga juga berfungsi sebagai pupuk dan mempunyai kemampuan memperbaiki struktur tanah gambut. Jenis amelioran yang telah diuji coba adalah : abu vulkanik, kapur, tanah mineral, abu hasil pembakaran, abu limbah pertanian dan pupuk kandang.

Memperbaiki sifat fisik dan kimia gambut di Kecamatan Rasau Jaya, yang memungkinkan adalah dengan pemberian kapur/ dolomit, abu hasil pembakaran dan pupuk kandang. Pemberian amelioran jenis abu vulkan dan tanah mineral sangat tidak mungkin perlu mendatangkannya dari tempat lain. Dari ketiga bahan amelioran yang mungkin tersebut, pemberian abu hasil pembakaran merupakan pilihan yang paling mungkin dan murah dilakukan masyarakat Kecamatan Rasau Jaya. Murah karena abu banyak terdapat dan disediakan oleh lokasi itu sendiri, hal tersebut mengingat masyarakat petani di Kecamatan Rasau Jaya masih banyak yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Menurut laporan tahunan Kecamatan Rasau Jaya tahun 2006, masyarakat Rasau Jaya yang tergolong miskin sehingga mendapatkan jatah Raskin sebanyak 1.573 KK, sedangkan berdasarkan data profil desa di Kecamatan Rasau Jaya tahun 2007 terdapat 1.806 KK petani di Kecamatan Rasau Jaya dikategorikan sebagai keluarga Pra-Sejahtera dan sebanyak 2.231 KK

dikategorikan sebagai keluarga Sejahtera I. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat lebih banyak yang memanfaatkan cara bakar sebagai alternatif untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia lahan gambut yang akan digarap.

Abu hasil pembakaran memiliki beberapa kelebihan, yaitu: mengandung unsur hara yang lengkap baik makro maupun mikro, mempunyai pH yang tinggi (8 – 10), kandungan kation K, Ca dan Mg tinggi. Abu bakar juga banyak mengandung silika (Si) dalam bentuk tersedia, sehingga berpengaruh positif terhadap produktifitas tanaman terutama padi.

Pemberian ameloran pupuk kandang dan kapur/dolomit di Kecamatan Rasau Jaya masih memungkinkan, namun hanya oleh sebagian kecil petani saja. Masih sedikitnya masyarakat yang mempunyai ternak sebagai penghasil pupuk kandang serta kapur yang masih harus didatangkan dari luar daerah memaksa petani mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkannya, yaitu dengan cara membeli. Harga 1 karung (20 kg) dolomit sebesar Rp. 25.000,- dan kotoran ternak ayam 1 karung (20 kg) sebesar Rp. 10.000,- sedangkan kotoran sapi 1 karung (20 kg) sebesar Rp. 4.000,-. Menurut Depnakertrans (2007) untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah diperlukan lebih kurang 3 – 5 ton per hektar kapur, sehingga diperlukan pendanaan untuk kebutuhan pemenuhan kapur lebih kurang Rp. 3.750.000 – Rp. 6.250.000 dan sekitar 20 ton pupuk kandang (kotoran sapi) per hektar sehingga diperlukan pendanaan untuk kebutuhan pupuk kandang sebesar Rp. 4.000.000 suatu angka yang besar bagi masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya. Pemberian ameloran kedua jenis ini paling banyak digunakan untuk menanam tanaman hortikultura, karena harga jual produk tinggi sehingga layak secara ekonomis. Pemberian kedua jenis ameloran ini untuk kegiatan pertanian tanaman pangan padi dan jagung secara ekonomi rugi.

Selain itu, dari segi waktu pemberian ameloran jenis abu yang diperoleh dengan cara membakar hanya membutuhkan waktu relatif

singkat sehingga petani dapat menggunakan waktu yang tersisa untuk melakukan pekerjaan lain guna menambah penghasilan. Pekerjaan sampingan yang biasa dilakukan masyarakat adalah menjadi buruh bangunan, buruh di perusahaan kayu maupun buruh kasar lain di kota. Akibatnya pola bakar lahan di Kecamatan Rasau Jaya tidak mungkin dapat dihilangkan secara serta merta, namun demikian perlu dukungan pemerintah melalui pola pertanian terintegrasi dengan peternakan.

Dilihat dari aspek lingkungan penyiapan lahan dengan cara bakar sangat tidak baik karena kegiatan tersebut menyebabkan terlepasnya karbon dioksida ke lingkungan, selain itu lahan yang dikerjakan dengan cara dibakar cenderung memiliki struktur tanah yang hampir sama dengan sebelumnya. Lain halnya jika tambahkan amelioran jenis pupuk kandang, jenis ini akan mempercepat proses pematangan gambut, sehingga dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia gambut. Disamping sebagai penambah unsur hara, pupuk kandang yang mengandung mikroorganisme juga dapat menguraikan gambut menjadi lebih matang sehingga beberapa unsur hara lainnya menjadi lebih tersedia bagi tanaman (Depnakertrans, 2007).

Bedasarkan ketersediaan dan kepentingannya untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia lahan gambut di Kecamatan Rasau Jaya maka pengembangan pertanian terpadu dengan peternakan haruslah mendapat perhatian pemerintah. Pertimbangan untuk memutuskan pemakaian bahan amelioran yang sesuai sebagai bahan penyubur lahan gambut, seyogyanya mempertimbangkan kemudahan dan ketersediaan bahan apabila dimanfaatkan secara terus-menerus. Hal yang paling aman bagi lingkungan dan memungkinkan untuk dikembangkan adalah pupuk kandang, memungkinkan dikembangkan karena selain dapat meningkatkan pendapatan petani, kotoran yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan amelioran juga pengembangan ternak dapat dilakukan karena melimpahnya ketersediaan pakan bagi ternak itu sendiri.

4.10.2. Analisis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya

Kebakaran lahan pertanian yang diusahakan masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya hampir dapat dipastikan saat ini sudah mulai jarang terjadi. Berdasarkan informasi dari regu pemadaman kebakaran lahan Manggala Agni, kebakaran lahan yang merembet dari areal pertanian hampir tidak ada lagi. Fenomena yang terjadi adalah adanya api loncat, yang apabila jatuh ke lahan bawas tentunya akan mengakibatkan kebakaran hebat dan asap tebal.

Antisipasi kebakaran di lahan pertanian telah diupayakan dilakukan pencegahan oleh masyarakat itu sendiri. Pencegahan dilakukan melalui suatu kesepakatan antar masyarakat petani maupun peraturan desa, suatu aturan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan masyarakat sangat takut dan menghormati kesepakatan dan aturan tersebut melebihi takutnya terhadap aturan yang dibuat pemerintah. Hal tersebut karena sanksi biasanya akan selalu bersangkut paut dengan hubungan sosial masyarakat itu sendiri. Penyiapan lahan dengan cara dibakar akhirnya benar-benar dilakukan dengan mengerahkan segenap sumberdaya yang ada.

Masyarakat melakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar karena masyarakat tidak mampu atau miskin, sehingga apabila karena kegiatan pembakarannya mengakibatkan merembetnya api ke lahan tetangganya maka sesungguhnya hal tersebut bukan memperkecil biaya namun justru menambah biaya karena harus memberi ganti kerugian. Oleh karenanya segenap upaya untuk mencegah merembetnya api ke lahan milik orang lain benar-benar dilakukan.

Dalam kegiatan penanggulangan kebakaran lahan, peran serta masyarakat juga sangat besar. Hal tersebut dilakukan karena kebakaran akan dapat menyebabkan musnahnya investasi yang telah mereka usahakan, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan yang diusahakan. Masyarakat sama-sama merasakan bagaimana jika

kehilangan barang yang berharga, sehingga penanggulangan kebakaran lahan merupakan suatu tanggung jawab bersama.

Semangat gotong-royong untuk melokalisir menjalarnya api ke lahan pertanian diupayakan secara bersama, semangat yang masih dijumpai pada komunitas petani Kecamatan Rasau Jaya. Berupaya bersama untuk menyelamatkan aset yang ada, namun demikian sikap masyarakat akan berbeda apabila yang terbakar adalah bawas atau lahan tidur. Upaya pemadaman hanya dilakukan pada lahan pertanian yang berpotensi saja sedangkan pada lahan tidur atau lahan yang tidak berpotensi masyarakat akan membiarkan saja.

Bedasarkan efektifitas dan efisiensi, penanggulangan kebakaran lahan di areal bawas tidak efektif karena kebakaran bawas menimbulkan kobaran api yang besar, besarnya api disebabkan karena bahan bakar tersedia dalam jumlah besar dan kering sehingga pemadaman langsung sulit dilakukan. Pemadaman dengan peralatan yang dimiliki petani hanya mungkin dilakukan dengan melokalisir api supaya tidak merembet ke tempat lain, terutama lokasi tanaman masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam rangka pencegahan dan pengendalian lahan di areal pertanian, masyarakat telah melakukan segenap upaya untuk berusaha mengendalikan pembakaran dan menanggulangi kebakaran yang ada.

4.11. Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan melalui Pembentukan Kelompok Peduli Api (KPA) di Kecamatan Rasau Jaya

Keinginan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan sebagai bagian pelaksanaan kebijakan Sterilisasi Bandara Supadio dari Asap Akibat Kebakaran Lahan memunculkan program pelibatan masyarakat yang bersifat *top-down* melalui pembentukan Kelompok Peduli Api, suatu kelompok masyarakat yang diharapkan menjadi bagian struktur penanganan penanggulangan kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan yang kemudian direspon semua pihak secara berjenjang terstruktur dan intruksional, mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Hasil wawancara di lapangan dengan masyarakat dan aparat pemerintahan desa, kelompok yang dibentuk benar-benar baru dan terlepas dari kelompok yang memang sudah ada. Proses pembentukan Kelompok Peduli Api (KPA) diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah desa, yang direspon berbeda antara desa satu dengan desa lainnya.

Berdasarkan hasil penggalian informasi lapangan, proses pembentukan kelompok peduli api lebih bersifat *top down*, yang penting melaporkan bahwa di desanya telah terbentuk kelompok, hal ini terlihat dengan masih dijumpainya pembentukan yang hanya bersifat formalitas yaitu karena adanya permintaan dari tim Sterilisasi Bandara Supadio sehingga kelompok yang dibentuk cenderung hanya untuk memenuhi instruksi saja. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat yang tercantum dalam kepengurusan kelompok masih banyak yang tidak mengetahui jika sebenarnya mereka tercantum menjadi anggota dalam kelompok tersebut.

Berdasarkan prosesnya, Kelompok Peduli Api terbentuk didasarkan atas keputusan hasil evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan Tahun 2003 yang mengakibatkan terganggunya transportasi udara khususnya di Bandara Supadio Pontianak dengan melibatkan seluruh anggota Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah (PUSDALKARHUTLADA). Hasil rapat memutuskan untuk membentuk Tim Action Plan Sterilisasi Bandara Supadio Pontianak dengan melibatkan para pihak yang terlibat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat. Atas dasar keputusan tersebut tim

kemudian melakukan rapat kecil untuk merespon tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Rapat kecil kemudian memutuskan mengusulkan pembentukan Kelompok Peduli Api sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan yang sering terjadi. Usulan tersebut kemudian diajukan ke PUSDALKARHUTLADA.

Atas usulan tersebut PUSDALKARHUTLADA kemudian menggelar rapat koordinasi dengan Pos Komando Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah (POSKOLAKDALKARHUTLADA) Kabupaten/ Kota yang diwakili instansi yang membidangi tugas pokok dan fungsi lingkungan hidup serta Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SATLAKDALKARHUTLA) yang diwakili oleh sembilan Camat daerah rawan kebakaran lahan di sekitar Bandara Supadio Pontianak. Rapat koordinasi membahas rencana upaya pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui pembentukan Kelompok Peduli Api. Para camat diminta untuk mendorong dan memfasilitasi para Kepala Desa yang berada di wilayahnya untuk membentuk Kelompok Peduli Api. Atas permintaan tersebut masing-masing Camat kemudian meminta para Kepala Desa untuk segera membentuk kelompok dan melaporkan nama-nama anggotanya ke pihak Kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan pada PUSDALKARHUTLADA.

Dilihat dari proses perencanaan pembentukan Kelompok Peduli Api yang ada saat ini sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dikatakan bahwa pembentukan Kelompok Peduli Api merujuk pada model perencanaan tunggal yaitu *state-based* yang cenderung *top-down* tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Oetomo dalam Budiarti (2006) pendekatan *state-based* yang cenderung *top-down* digunakan dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi yang dipandang akan membuat efisiensi sumberdaya manusia dan tenaga. Namun demikian, pada kenyataannya tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kebakaran lahan yang ada saat ini. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab dengan program dan kegiatan yang ada. Inilah mengapa pembentukan Kelompok Peduli Api gagal dalam pelaksanaannya, hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan

keputusan pengelolaan yang berimplikasi pada tidak adanya dukungan masyarakat lokal.

Merujuk pada tingkatan peran serta Arnstein maka pembentukan Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya sebagian besar dapat diklasifikasikan dalam tingkatan paling rendah yaitu manipulasi, dimana menurut Hadi (1999) pada tingkatan tersebut bukan merupakan peran serta.

Berdasarkan informasi lapangan, dari dua kelompok peduli api yaitu KPA Karya Muda dan KPA Karya Mandiri sebagai kelompok yang "dianggap" lebih baik dalam proses pembentukan Kelompok Peduli Api sampai dengan saat ini baru melaksanakan tiga tugas pokok dan fungsi KPA yaitu kegiatan penyuluhan dan pemantauan lahan-lahan yang siap dibakar serta melaporkan kejadian kebakaran yang tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat.

Kegiatan penyuluhan lebih banyak dilakukan oleh ketua kelompok yaitu Kepala Dusun untuk KPA Karya Mandiri dan Ketua RT untuk KPA Karya Muda karena masyarakat target yaitu masyarakat yang masih melakukan upaya penyiapan lahan tanpa mengindahkan upaya pembakaran terkendali akan lebih hormat apabila diberi peringatan oleh mereka dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh anggota kelompok. Sedangkan dua kegiatan lainnya, yaitu : kegiatan pemantauan dan melaporkan kejadian kebakaran "baru" dilaksanakan jika telah ada kejadian kebakaran lahan. Oleh karena itu, efektif kelompok peduli api baru melaksanakan satu kegiatan saja yaitu penyuluhan, itupun karena keberadaan ketua kelompok yang dipandang oleh masyarakat sebagai tokoh/ pemuka masyarakat bukan sebagai ketua kelompok peduli api.

Tugas kelompok peduli api yang lain seperti bersama-sama dengan masyarakat menanggulangi kebakaran kecil dan besar, mengadakan pendataan lahan yang akan dilakukan pembakaran dan memantau serta memerintahkan kepada pemilik lahan untuk menjaga api selama pembakaran berlangsung dan membuat kesepakatan desa/ adat dan sanksi-sanksinya kepada para pelaku yang tidak mengindahkan kesepakatan bersama sampai saat ini belum dilakukan.

Hasil analisis atas tugas pokok dan fungsi kelompok peduli api yang saat ini diberikan, sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat telah melakukan segenap upaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan. Kesamaan kepentingan antar anggota kelompok tani yang lahannya tergabung dalam satu hamparan mempunyai efektifitas tinggi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan terdahulu yang menyebutkan bahwa karena kepentingan investasi masyarakat akan bergotong royong memadamkan api yang berpotensi membakar lahan yang ada, sehingga upaya pencegahan kebakaran lahan lebih berkembang dibandingkan dengan kegiatan penanggulangan kebakaran lahan, aturan desa dan kesepakatan antar petani sebagai suatu aturan lokal tumbuh dengan sendirinya karena adanya kepentingan yang sama. Oleh karena itu, kelompok peduli api yang telah ada saat ini dapat dikatakan "tidak ada" gunanya dan cenderung akan menghabiskan anggaran saja karena tugas pokok dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan hampir kesemuanya telah dilakukan masyarakat itu sendiri.

Kepentingan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang ada saat ini masih lebih didominasi oleh keinginan pemerintah. Pencegahan di masyarakat sendiri telah tumbuh dan berkembang, tumbuh karena adanya kepentingan yang sama yaitu kepentingan agar tidak mengganggu milik orang lain. Pencegahan lebih efektif dilakukan masyarakat karena telah adanya kesepakatan dan aturan yang diterapkan oleh masyarakat petani itu sendiri. Fakta di lapangan, masyarakat lebih "takut" atau menghormati aturan lokal yang telah dibuat. Berkurangnya angka kejadian kebakaran lahan yang bersumber dari merembetnya api dari kegiatan pembukaan lahan dengan cara bakar adalah bukti nyata. Potensi inilah yang tidak mendapat perhatian pemerintah, yang digunakan sebagai dasar pembentukan Kelompok Peduli Api. Namun demikian hasil pengamatan peneliti, hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa masyarakat masih menganggap pembukaan lahan dengan cara di bakar belum menjadi masalah baik terhadap kesehatan maupun lingkungan hidup.

Masyarakat telah berupaya untuk melakukan pembakaran terkendali dan menghasilkan sedikit asap lebih dikarenakan aspek ekonomi, yaitu takut terhadap aturan terutama denda dan kecepatan waktu tanam saja. Menghindari

denda lebih dikarenakan ketidakmampuan finansial masyarakat, sehingga jika membakar yang dilakukan sampai menimbulkan merembetnya api ke lahan tetangganya hingga harus membayar denda maka pembakaran bukan lagi hal yang murah. Oleh karena itu, yang dilakukan petani saat membakar akhirnya sangat hati-hati dan menjaga lahan yang dibakar dan meninggalkan lahan setelah api benar-benar padam.

Sedangkan alasan membakar dengan sedikit asap lebih karena supaya pembakaran cepat sehingga cepat tanam. Pembakaran yang memerlukan waktu lama maka diperlukan sumberdaya yang banyak sehingga masyarakat akan membakar setelah bahan bakaran telah kering benar. Kondisi ini bukan dengan tujuan supaya menghasilkan sedikit asap namun lebih didasarkan supaya cepat selesai, sehingga cepat pula tanamnya.

Hasil pengamatan di lapangan, upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat lebih berkembang jika dibandingkan dengan upaya penanggulangan kebakaran lahan itu sendiri. Upaya pemerintah yang lebih menekankan penanggulangan kebakaran lahan melalui pembentukan kelompok peduli api sepertinya kurang dapat direspon masyarakat, hal tersebut dikarenakan pemadaman memerlukan biaya dan tenaga yang tidak sedikit, kegiatan pemadaman merupakan kegiatan yang tidak nyaman dan melelahkan serta kegiatan yang banyak menyita waktu serta bersifat sukarela atau kegiatan tanpa insentif.

Selain ketiga alasan tersebut, alasan lain yang perlu diperhatikan adalah adanya perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan pemerintah tentang kebakaran lahan itu sendiri. Pemerintah memandang bahwa kebakaran yang ada saat ini bersumber dari masyarakat sehingga masyarakat sendiri yang di"wajib"kan memadamkannya.

Sementara itu, berdasarkan sudut pandang masyarakat kebakaran yang banyak terjadi saat ini adalah kebakaran di lahan pertanian yang tidak produktif yaitu lahan yang secara ekonomi tidak menguntungkan seperti kejadian kebakaran di lahan pertanian yang dibiarkan terlantar/ kosong (sehingga menjadi bawas). Hal tersebut jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta maka faktor internal yang berpengaruh adalah status kepemilikan

lahan, persepsi dan ikatan psikologis. Status kepemilikan lahan lebih didasarkan pada lahan siapa yang perlu diamankan atau dipadamkan, lahan yang secara faktual bukan merupakan lahan masyarakat sendiri apalagi pada lahan tersebut tidak memiliki potensi maka kebakaran cenderung dibiarkan saja. Hal tersebut juga karena didukung oleh persepsi masyarakat yang masih memandang kebakaran dan asap yang ditimbulkan merupakan hal yang biasa saja. Ikatan psikologis lebih dititik beratkan pada adanya kesamaan kepentingan untuk sama-sama menyelamatkan lahan pertanian yang diusahakan, tidak adanya kepentingan untuk menyelamatkan lahan pertanian yang ditelantarkan/ kosong dari bahaya kebakaran menyebabkan tidak dilakukannya pemadaman api ketika lahan tersebut terbakar. Terlebih lagi munculnya pandangan bahwa lahan pertanian yang ditelantarkan/ kosong/ bawas merupakan sumber masalah bagi pertanian masyarakat yaitu sebagai tempat bersarangnya hama tanaman, faktor ini pulalah yang menyebabkan kebakaran pada lahan terlantar tetap dibiarkan oleh masyarakat. Upaya penanggulangan kebakaran di lahan terlantar/ bawas yang dilakukan masyarakat adalah dengan cara melokalisir api terutama pada lokasi lahan pertanian yang berpotensi ekonomi bukan pada upaya pemadaman langsung terhadap sumbernya. Pemadaman langsung kebakaran pada lahan terlantar/ kosong dilakukan setelah mendapat bantuan dari regu pemadam Manggala Agni dan ketika api sudah mulai mengecil maka barulah masyarakat turut serta secara gotong royong memadamkan api, karena bagaimana pun jika kebakaran pada lahan terlantar dibiarkan maka akan merembet ke lahan pertanian masyarakat juga.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya di Kecamatan Rasau Jaya telah dilaksanakan dua pendekatan pengelolaan lingkungan yaitu : pengelolaan lingkungan melalui pendekatan *state-based* dan *community-based*. Pendekatan *state-based* ditandai dengan diterapkannya program pembentukan Kelompok Peduli Api yang digagas pemerintah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan, sedangkan upaya pembakaran terkendali, penerapan aturan lokal dan upaya penanggulangan kebakaran yang selama ini dilakukan masyarakat merupakan pendekatan *community-based*, kedua pendekatan yang berbasis pada aktor-aktor tunggal. Atas kedua pendekatan pengelolaan lingkungan yang telah ada tersebut maka diperlukan kolaborasi

antara kedua pendekatan yang telah ada tersebut sehingga tujuan yang diinginkan bersama yaitu terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

4.12. Usulan Penanganan Kebakaran Lahan dan Dampak Asap melalui Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya

Mengingat keberhasilan pengelolaan lingkungan memerlukan keterpaduan antara peran pemerintah dan peran serta masyarakat khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan sebagai upaya meminimalisir kejadian kebakaran lahan dan dampak asap maka kedua potensi tersebut perlu dikembangkan sehingga tujuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dapat dicapai sesuai harapan. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang dilakukan masyarakat dalam kenyataannya telah berkembang sejak lama dan hal tersebut haruslah dijadikan potensi yang perlu dikembangkan, selain tentunya berbagai upaya pemerintah guna meminimalisir kejadian kebakaran lahan dan dampak asap telah dilaksanakan melalui berbagai program. Upaya yang diperlukan adalah memadukan keinginan, kepentingan dan tujuan masing-masing sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dapat terwujud.

Untuk itu perlu dikaji upaya-upaya yang mendukung keterpaduan upaya pengelolaan lingkungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui proses tujuh tahapan perencanaan yang sering disebut *the seven magic steps of planning*. Menurut Boothroyd (1992) dalam Hadi (2007) tujuh langkah perencanan itu adalah perumusan masalah, penetapan tujuan, analisis kondisi, identifikasi alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, kajian dampak dan keputusan. Tahapan ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan dan nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat. Ketujuh langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perumusan Masalah

Melihat masih sering terjadinya kebakaran lahan dan berbagai upaya penanganan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya yang hingga saat ini masih belum membuahkan hasil optimal disebabkan beberapa faktor. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan beberapa penyebab tersebut diantaranya, sebagai berikut :

- a. Pemerintah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam merencanakan kebijakan pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan khususnya pembentukan Kelompok Peduli Api masih berorientasi pada pendekatan *state-based* dan sama sekali tidak melibatkan peran serta masyarakat pada proses perencanaan yang dilakukannya ;
- b. Upaya pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui program pembentukan Kelompok Peduli Api yang diinstruksikan PUSDALKARHUTLA kepada pihak Kecamatan dan pihak Desa direspon sebagai tugas instruksional sehingga pembentukan Kelompok Peduli Api cenderung hanya untuk memenuhi instruksi, akibatnya Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya yang dibentuk hingga saat ini masih bersifat formalitas saja.
- c. Adanya upaya pengelolaan lingkungan yang selama ini dilakukan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan (*community-based*) masih belum direnspon dan diintegrasikan dalam program pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya ;
- d. Adanya komitmen pemerintah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota) dalam penanganan kebakaran lahan belum direspon oleh institusi teknis terkait (Dinas/Badan/institusi lainnya) yang terjabarkan melalui program kerja dan kegiatan yang ada hingga saat ini ;
- e. Belum adanya koordinasi antara instansi teknis terkait dalam menyikapi kebakaran lahan yang sering terjadi menyebabkan program dan kegiatan pemerintah yang dilakukan pemerintah saat ini belum efektif menekan kejadian kebakaran ;

- f. Masih terus dilakukannya penyiapan lahan dengan cara dibakar oleh masyarakat dengan alasan : cepat, murah dan abu bakaran dapat dijadikan pupuk untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah gambut ;
- g. Dinas Pertanian sebagai *leading sector* dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan karena pemicu kebakaran lahan adalah kegiatan penyiapan lahan pertanian dengan cara dibakar sampai dengan saat ini baru memfokuskan diri pada pemberian bantuan sarana pertanian sebagai kompensasi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dan belum memfokuskan diri pada pembangunan pertanian masyarakat tanpa bakar.

2. Penetapan Tujuan

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah mengurangi kejadian kebakaran lahan terutama yang bersumber dari kegiatan pertanian masyarakat maupun aktifitas masyarakat lainnya dan jika memungkinkan menghilangkannya melalui peran serta masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya.

3. Analisis Kondisi

Dalam penilaian kondisi, alat analisis yang digunakan adalah SWOT dengan menggambarkan kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sedangkan kondisi eksternal menggambarkan peluang dan ancaman yang ada. Kekuatan yang ada akan dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kelemahan dapat dikurangi, begitu pula dengan peluang yang ada dimanfaatkan dengan baik sementara ancaman dapat ditanggulangi.

Berdasarkan pengamatan lapangan, berikut uraian tentang kondisi internal dan eksternal yang dimiliki dan yang dihadapi pemerintah dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan dan dampak asap khususnya di Kecamatan Rasau Jaya :

a. Kekuatan (*Strength* – S)

- 1. Adanya komitmen pemerintah dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap termasuk didalamnya kebijakan pelibatan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Peduli Api (KPA).

2. Telah terbentuknya organisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan dari tingkat Provinsi (PUSDALKARHUTLADA), tingkat Kabupaten/ Kota (POSKOLAKDALKARHUTLADA) dan di tingkat Kecamatan (SATLAKDALKARHUTLA)
 3. Adanya institusi teknis (Bapedalda, Dinas Kehutanan, Dinas Perekebunan, Dinas Pertanian, Balai KSDA) dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap
 4. Adanya regu pemadam kebakaran hutan dan lahan Manggala Agni.
 5. Adanya upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan khususnya di lahan-lahan pertanian
 6. Munculnya kesadaran dalam masyarakat atas permasalahan kebakaran lahan dan dampak asap yaitu berkurangnya hari kerja dan dampaknya terhadap kesehatan
- b. Kelemahan (*Weakness* – W)
1. Perhatian pemerintah dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap masih bersifat temporer (kuratif).
 2. Terbatasnya fasilitas penanganan kebakaran lahan baik sarana (peralatan pemadaman kebakaran) maupun prasarana pendukungnya
 3. Kurangnya koordinasi antar instansi teknis terkait dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap sehingga masing-masing instansi hanya melakukan tugas pokok dan fungsinya saja
 4. Pelaksanaan program pemerintah belum menyentuh langsung penanganan kebakaran lahan dan dampak asap dari sumbernya yaitu pertanian tanpa bakar
 5. Belum adanya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kebakaran lahan dampak asap
- c. Peluang (*Opportunity* – O)
1. Telah adanya upaya saling mengingatkan apabila ada masyarakat yang akan melakukan pembakaran lahan untuk menghindari merembetnya api ke lahan milik orang lain
 2. Munculnya keinginan masyarakat untuk bertani tanpa bakar, namun terkendala karena belum adanya contoh dan pembelajaran langsung kepada masyarakat petani

3. Adanya potensi pengembangan tanaman hortikultura jenis nanas yang berpotensi mewujudkan kegiatan pertanian tanpa bakar sehubungan sedang dibangunnya pabrik konsentrat nanas di Kab Kubu Raya

d. Ancaman (*Threats* – T)

1. Belum adanya teknologi penyiapan lahan gambut yang murah dan secepat dengan cara bakar menyebabkan pilihan alternatif yang tidak menguntungkan cenderung ditinggalkan masyarakat
2. Persepsi masyarakat masih memandang kebakaran lahan dan asap sebagai sesuatu yang biasa

Berdasarkan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang dimiliki sebagai peluang dan ancaman terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dengan mengembangkan kekuatan yang ada, meminimalisir kelemahan, memanfaatkan peluang yang ada serta bagaimana mengatur ancaman menjadi peluang.

e. Strategi SO – strategi memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang sebesar-besarnya

1. Memadukan kebijakan dan kepentingan pemerintah dengan potensi yang ada pada masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui pengelolaan lingkungan secara partisipatif, termasuk melakukan revitalisasi terhadap Kelompok Peduli Api ($S_{1,2,4,5} - O_1$)
2. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan melalui pelatihan-pelatihan ($S_{1,2,3,4,5,6} - O_{1,2}$)

f. Strategi ST – strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman

1. Perlunya pengintegrasian antara pertanian dengan peternakan sebagai alternatif pengalihan penyiapan lahan tanpa bakar ($S_{1,3,5,6} - T_1$)
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak kebakaran dan asap terhadap kesehatan dan lingkungan melalui sosialisasi ($S_{1,2,3,4,5,6} - T_{1,2}$)

- g. Strategi WO – strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan yang diarahkan pada pertanian tanpa bakar melalui praktek lapangan secara langsung ($W_{1,4} - O_2$)
 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan bagi masyarakat ($W_2 - O_{1,2}$)
 3. Pengembangan komoditi pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan gambut ($W_{1,4,5} - O_3$)
 4. Membangun koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap ($W_6 - O_{1,2}$)
- h. Strategi WT – strategi mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman
1. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait dalam penanganan kebakaran lahan ($W_{1,3} - T_1$)
 2. Penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan budidaya pertanian ($W_5 - T_2$)

<p>EFAS</p> <p><i>(External Strategy Factors Summary)</i></p>		
<p>PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah adanya upaya saling mengingatkan apabila ada masyarakat yang akan melakukan pembakaran lahan untuk menghindari merembetnya api ke lahan milik orang lain 2. Munculnya keinginan masyarakat untuk bertani tanpa bakar, namun terkendala belum adanya contoh dan pembelajaran langsung kepada masyarakat petani 3. Adanya potensi pengembangan tanaman hortikultura jenis nenas yang berpotensi mewujudkan kegiatan pertanian tanpa bakar sehubungan sedang dibangunnya pabrik konsentrat nenas di Kab Kubu Raya 	<p><u>STRATEGI S – O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memadukan kebijakan dan kepentingan pemerintah dengan potensi yang ada pada masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui pengelolaan lingkungan secara partisipatif termasuk melakukan revitalisasi terhadap Kelompok Peduli Api (KPA) 2. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan melalui pelatihan-pelatihan 	<p><u>STRATEGI W – O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan yang diarahkan pada pertanian tanpa bakar melalui praktek lapangan secara langsung 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan bagi masyarakat 3. Pengembangan komoditi pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan gambut 4. Membangun koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan dan dampak asap
<p>ANCAMAN (<i>THREATS</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya teknologi penyiapan lahan gambut yang murah dan secepat dengan cara bakar menyebabkan alternatif penyiapan lahan yang tidak menguntungkan cenderung ditinggalkan masyarakat 2. Persepsi masyarakat masih memandang kebakaran lahan dan asap sesuatu yang biasa 	<p><u>STRATEGI S – T</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya pengintegrasian pertanian dan peternakan sebagai alternative pengolahan lahan tanpa bakar 2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak kebakaran dan asap thd kesehatan dan lingkungan melalui sosialisasi 	<p><u>STRATEGI W – T</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanganan kebakaran lahan 2. Penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan pertanian

4. Identifikasi Alternatif Kebijakan

Berdasarkan strategi-strategi tersebut maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi belum optimalnya pengelolaan lingkungan khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan sebagai upaya meminimalisir kejadian kebakaran lahan dan dampak asap guna mewujudkan tujuan yang diinginkan diantaranya adalah :

- a. Memadukan kebijakan dan kepentingan pemerintah dengan potensi yang ada pada masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui pengelolaan lingkungan secara partisipatif, termasuk melakukan revitalisasi terhadap Kelompok Peduli Api
- b. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan melalui pelatihan-pelatihan
- c. Perlunya pengintegrasian antara pertanian dengan peternakan sebagai alternatif pengalihan penyiapan lahan tanpa bakar
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak kebakaran dan asap terhadap kesehatan dan lingkungan melalui sosialisasi
- e. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan yang diarahkan pada pertanian tanpa bakar melalui praktek lapangan secara langsung
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan bagi masyarakat
- g. Pengembangan komoditi pertanian yang cocok dan sesuai dengan kondisi lahan gambut
- h. Membangun koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan dan dampak asap
- i. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait dalam penanganan kebakaran lahan
- j. Penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan budidaya pertanian

5. Pilihan Kebijakan

Mengingat penanganan kebakaran lahan dan dampak asap akibat kebakaran yang setiap tahun selalu terjadi dan berdasarkan identifikasi alternatif kebijakan yang telah disebutkan di atas maka, pilihan kebijakan dapat dikelompokkan berdasarkan waktunya, yaitu : kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Kebijakan jangka pendek dan menengah lebih difokuskan pada bagaimana upaya penanganan kebakaran lahan dan dampak kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun, kebijakan tersebut harus dilakukan secara beriringan, yaitu :

- a. Memadukan kebijakan dan kepentingan pemerintah dengan potensi yang ada pada masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui pengelolaan lingkungan secara partisipatif, termasuk melakukan revitalisasi terhadap Kelompok Peduli Api,
- b. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan melalui pelatihan-pelatihan,
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan bagi masyarakat,
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak kebakaran dan asap terhadap kesehatan dan lingkungan melalui sosialisasi,
- e. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan yang diarahkan pada pertanian tanpa bakar melalui praktek lapangan secara langsung di sekolah lapangan,
- f. Pengembangan komoditi pertanian yang cocok dan sesuai dengan kondisi lahan gambut, serta
- g. Membangun koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan dan dampak asap
- h. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait dalam penanganan kebakaran lahan.

Sedangkan kebijakan jangka panjang yang dapat dilakukan adalah pengintegrasian antara pertanian dengan peternakan sebagai alternatif pengalihan penyiapan lahan tanpa bakar dan menetapkan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan budidaya pertanian.

Pengintegrasian pertanian dengan peternakan perlu dilakukan karena kondisi tanah gambut yang mendominasi lahan di Kecamatan Rasau Jaya adalah lahan kurang subur sehingga memerlukan bahan pembenah tanah. Pengalaman lapangan beberapa petani menunjukkan bahwa bahan pembenah tanah gambut berupa pupuk kandang mampu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah sehingga tanah menjadi media yang baik bagi tanaman, selain tentunya peternakan sebagai penghasil pupuk kandang juga mampu meningkatkan pendapatan petani.

6. Kajian Dampak

Kajian dampak perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dipilihnya suatu kebijakan. Kajian dampak harus dilakukan secara terintegrasi satu dengan yang lainnya, meliputi dampak sosial ekonomi, budaya dan dampak lingkungan. Upaya penanganan kebakaran lahan dan dampak kabut asap yang melalui pelibatan peran serta masyarakat haruslah memberikan dampak positif bagi semua pihak, termasuk dampak terhadap perbaikan kualitas lingkungan seperti kelestarian sumberdaya lahan gambut itu sendiri. Namun demikian perlu dikaji pula dampak negatifnya sehingga keinginan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dapat diwujudkan secara optimal.

Upaya penanganan kebakaran lahan dan dampak kabut asap melalui berbagai alternatif diatas, diharapkan mempunyai dampak positif terhadap sosial, ekonomi dan budaya sebagai berikut : masyarakat lebih mempunyai kepedulian terhadap kebakaran lahan karena mereka yang dilibatkan adalah masyarakat petani yang benar-benar sangat terkait dengan kegiatan pertanian, meningkatkan pengetahuan masyarakat akan dampak kesehatan yang diakibatkan asap yang selama ini akrab dengan mereka, diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat akibat adanya integrasi kegiatan pertanian dan peternakan dan akan menjadi penopang perekonomian masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya.

Sedangkan dampak positif terhadap lingkungan melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan adalah : lahan gambut dapat dimanfaatkan lebih baik sesuai dengan peruntukannya sehingga lahan gambut yang

selama ini banyak menghasilkan gas karbondioksida akibat kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar akan lestari.

7. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan setelah pengkajian dampak terhadap suatu pilihan kebijakan. Keputusan ini harus merupakan kesepakatan pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan langkah-langkah perencanaan diatas maka penanganan kebakaran lahan dan dampak asap melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang juga dapat menjadi rekomendasi penelitian ini adalah :

Penanganan dalam Jangka Pendek dan Menengah

Penanganan kebakaran lahan dan dampak asap melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam jangka pendek dan menengah dilakukan dengan cara :

- a. Memadukan kebijakan dan kepentingan pemerintah dengan potensi yang ada pada masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui pengelolaan lingkungan secara partisipatif, dalam hal ini adalah melakukan revitalisasi terhadap Kelompok Peduli Api yang ada saat ini dengan cara :
 - Melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pengelolaan lingkungan khususnya dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap, sehingga diharapkan pengelolaan lingkungan akan memberikan hasil yang optimal.
 - Pembentukan kelompok hendaknya melibatkan para pihak yang berkepentingan seperti : tokoh masyarakat/ tokoh informal dan tokoh formal (kepala dusun, ketua RW dan RT) karena tokoh tersebut terbukti mempunyai pengaruh di masyarakat termasuk masyarakat petani yang mengusahakan lahan pertanian dalam suatu hamparan dengan harapan antar mereka timbul keterkaitan dan hubungan saling kepentingan sehingga kelompok yang dibentuk nantinya selain

mempunyai fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan juga merupakan *entri point* bagi program pemerintah untuk menerapkan sistem pertanian tanpa bakar.

- Proses pembentukan Kelompok Peduli Api perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga diharapkan keterlibatan masyarakat dalam kelompok yang dibentuk akan berdampak positif dan tujuan pengelolaan lingkungan secara partisipatif dapat terwujud sesuai dengan harapan yang diinginkan.
 - Kelompok yang telah terbentuk supaya ditetapkan melalui Keputusan Desa, Keputusan Camat dan jika diperlukan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Keputusan ini diharapkan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program pemerintah baik dalam pembinaan kelompok, peningkatan keterampilan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran lahan serta program terkait lainnya.
 - Perlu diperhatikan juga bahwa pembentukan kelompok ditingkat desa harus mendapat pendampingan sehingga tujuan pembentukan sesuai dengan yang diinginkan.
 - Dalam hal luasnya hamparan lahan yang perlu diamankan maka kelompok yang dibentuk dapat dibagi menjadi sub-sub kelompok yang lebih kecil.
- b. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan melalui pelatihan-pelatihan.
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan bagi masyarakat.
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak kebakaran dan asap terhadap kesehatan dan lingkungan melalui sosialisasi,
 - e. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan yang diarahkan pada pertanian tanpa bakar melalui praktek lapangan secara langsung di sekolah lapangan,

- f. Pengembangan komoditi pertanian yang cocok dan sesuai dengan kondisi lahan gambut yang ada sehingga diharapkan intervensi teknologi pertanian terhadap lahan gambut seminimal mungkin dilakukan, serta
- g. Membangun koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan dan dampak asap melalui upaya pembinaan, penyuluhan dan kerjasama program/ kegiatan antara pemerintah dan Kelompok Peduli Api serta kelompok masyarakat lain.
- h. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait dalam penanganan kebakaran lahan, terutama dalam membangun komitmen bersama terkait penanganan kebakaran lahan dan dampak asap melalui pelaksanaan program masing-masing sektor yang saling mendukung.

Penanganan dalam Jangka Panjang

Sedangkan untuk penanganan dalam jangka panjang maka upaya yang perlu dilakukan adalah : (1) pengintegrasian antara pertanian dengan peternakan sebagai alternatif pengalihan penyiapan lahan tanpa bakar dan (2) penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan budidaya pertanian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai temuan penelitian sebagai berikut :

1. Penyebab masih sering terjadinya kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya, adalah :
 - a. Setiap musim kemarau sebagian besar masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya masih melakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar, khususnya dalam kegiatan penyiapan lahan pertanian tanaman pangan semusim. Penyiapan lahan dengan cara dibakar berpotensi menimbulkan api loncat yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan pertanian baik yang diusahakan maupun yang dibiarkan terlantar/ kosong.
 - b. Kebakaran lahan yang sering terjadi di Kecamatan Rasau Jaya adalah kebakaran pada lahan terlantar/ kosong. Hal tersebut dikarenakan kebakaran pada lahan terlantar/ kosong bagi masyarakat bukan merupakan prioritas untuk dipadamkan sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran besar.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya, adalah :
 - a. Upaya pencegahan kebakaran lahan khususnya yang berasal dari aktifitas pertanian dilakukan masyarakat dengan melakukan pembakaran terkendali dan penerapan aturan lokal berupa aturan desa dan kesepakatan masyarakat.
 - b. Upaya penanggulangan kebakaran pada lahan pertanian selama ini dilakukan oleh petani sendiri dan bergotong royong, dilakukan secara spontan dengan memprioritaskan penyelamatan lahan pertanian yang memiliki potensi ekonomi.

- c. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya sampai saat ini baru dilaksanakan oleh masyarakat, sedangkan upaya pencegahan dan penanggulangan yang diharapkan pemerintah melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam bentuk organisasi Kelompok Peduli Api hingga saat ini belum berjalan karena kelompok yang dibentuk masih bersifat formalitas dan cenderung hanya untuk memenuhi instruksi sehingga belum pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya.
 3.
 - a. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya baru sebatas pada pencegahan dan penanggulangan pada lahan-lahan pertanian yang berpotensi ekonomi saja, sedangkan kebakaran pada lahan pertanian yang dibiarkan kosong/ terlantar belum menjadi fokus penanganan masyarakat dikarenakan : tidak adanya potensi ekonomi yang perlu diselamatkan, status kepemilikan lahan (biasanya dimiliki masyarakat kota/ bukan masyarakat sekitar), persepsi dan ikatan psikologis. Selain itu, adanya pandangan masyarakat bahwa lahan kosong merupakan tempat bersarangnya hama tanaman pertanian seperti : tempat bersarang tikus, belalang, burung, babi hutan, kera (monyet) dan macam akar mengakibatkan kebakaran lahan yang terjadinya di lahan tidur cenderung dibiarkan yang menyebabkan kebakaran besar dan menimbulkan asap tebal.
 - b. Peran serta masyarakat dalam bentuk Kelompok Peduli Api dalam pencegahan dan penanggulangan pemerintah yang diharapkan pemerintah sampai saat ini belum dilakukan karena kelompok yang telah dibentuk hingga saat ini masih bersifat formalitas, tidak melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembentukannya dan cenderung hanya untuk memenuhi instruksi. Oleh karena itu kelompok yang dibentuk dan masyarakat yang dilibatkan kurang memiliki tanggung jawab dan kepentingan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang ada.
4. Penanganan kebakaran lahan dan dampak asap melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam jangka pendek dan menengah dilakukan dengan cara :

melakukan revitalisasi terhadap Kelompok Peduli Api yang ada saat ini, peningkatan keterampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak kebakaran lahan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan, pengembangan komoditi pertanian yang cocok dengan lahan gambut, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap. Sedangkan untuk jangka panjang perlu pengintegrasian antara pertanian dengan sektor peternakan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan budidaya pertanian.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, perlu dikemukakan saran untuk pemerintah yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, yaitu :

1. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan diperlukan suatu komitmen dan koordinasi yang solid dari pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan akhir yang diinginkan yaitu berkurangnya kejadian kebakaran lahan atau jika memungkinkan dihilangkan sama sekali.
2. Menyelesaikan permasalahan kebakaran lahan hendaknya dilakukan dengan melakukan pemecahan masalah pada sumbernya melalui : peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak kebakaran lahan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan, peningkatan ketrampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan, serta pengembangan komoditi pertanian yang cocok dengan lahan gambut.
3. Pemanfaatan lahan gambut khususnya untuk lokasi pemukiman dan kegiatan pertanian tanaman pangan semusim kiranya perlu dipertimbangkan kembali. Upaya penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan budidaya pertanian merupakan alternatif penyelesaian masalah, lahan gambut yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan semusim maka dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya sedangkan lahan gambut yang secara teknis lebih mempunyai manfaat konservasi maka diarahkan agar diusahakan untuk tanaman budidaya yang bernilai konservasi seperti misalnya mengalihkan untuk perkebunan karet rakyat.
4. Upaya pengelolaan lingkungan khususnya dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap perlu melibatkan peran serta masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan termasuk mensinergikan kebijakan dan program pemerintah dengan potensi yang ada dalam masyarakat sehingga program dan kegiatan yang direncanakan

benar-benar relevan sesuai aspirasi dan keadaan masyarakat yang diharapkan memberikan hasil optimal dan mengurangi resiko kegagalan.

Sedangkan saran yang dapat disampaikan untuk peneliti lain guna menambah khasanah pengetahuan tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan, adalah : Melakukan penelitian dengan topik yang sama pada lokasi lain terutama pada lokasi selain lahan gambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, Andri, 2004, Hubungan Sentralisasi dengan Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Proyek P2MPD di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Andrianto, T, 2007. Fenomena Spasial Pembakaran Lahan : Studi Kasus di Desa Lingga dan Desa Rasau Jaya II Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Tesis Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah Jurusan Ilmu-Ilmu Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Arikunto, S. 1990. Manajemen Penelitian. Penerbit Rieka Cipta. Jakarta.
- Budiarti, L, 2006. Penerapan Co-Management dalam Pengelolaan Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Tengah. Disertasi. Sekolah Pasca sarjana UGM. Yogyakarta.
- Departemen Pertanian. 2007. Kebijakan Dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan Bencana Asap, Makalah Seminar Lokakarya Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan serta Penanggulangan Bencana Asap. Banjarmasin 30 Mei 2007.
- Dharmawan, U. 2003. Pengaruh Penggunaan Api dalam Penyiapan Lahan Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca : Studi Kasus Pada Penerapan Teknik Pembakaran Dengan Sedikit Asap di Areal Gambut Kabupaten Pelalawan Riau. Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hadi, Sudharto P. 1999. Peranserta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal. Makalah pada Seminar Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal. Jakarta 3 – 4 Pebruari 1999.
- , 2005. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- , 2007. Bahan Kuliah Matrikulasi Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Semarang.

- Hardiati, E. S, 2007. Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Kebersihan dan Keteduhan Kota Pati. Tesis. Program Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip. Semarang.
- Harthayasa, I. M. D. 2002, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Sungai Badung sebagai Obyek Wisata Air "City Tour" di Kota Denpasar. Tesis. Magister Ilmu Lingkungan Undip, Semarang.
- Hikmat, H., 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Hinger, J. D., dan Thomas L Wheelen, 2003, Manajemen Strategis (Terjemahan), Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Irawan, Dicky, 2003, Peran Serta Masyarakat dalam Penyediaan Sarana Perkotaan melalui Community Contact di Kota Pontianak, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wlayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Keraf, AS., 2002. Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Kurniawan, Bernanda, 2004, Evaluasi Program Bangun Paraja dengan Studi Kasus Kota Semarang Jawa Tengah, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wlayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Limin, Suwiti H. 2006. Pemanfaatan Lahan Gambut dan Permasalahannya. Makalah Workshop Gambut dengan Tema : Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Pertanian, Tepatkah? Jakarta 22 November 2006.
- Mitchell, B., Setiawan B., Rahmi D. H., 2007. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexi, J., 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nakertrans, 2007. Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Trasmigrasi. Diakses dari http://www.nakertrans.go.id/hasil_penelitiantrans/pemanfaatan%20Lahan%20Gambut.pdf. pada tanggal 3 September 2007.
- Purba, J. 2002, Pengelolaan Lingkungan Sosial. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

- Purwanto. 2008. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Gundih Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rangkuti, F., 2006, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sihono, 2003, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Prasarana Pasca Peremajaan Lingkungan Pemukiman di Mojosongo Surakarta, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syam, H Nur, 2005. Model-model Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- Suparjan dan Suyatno H, 2003. Pengembangan Masyarakat : Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Aditya Media. Yogyakarta.
- Thoha, Miftah, 2002, Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamijyo, B, 1998. Kebijakan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan, Teori dan Penerapan). LP3ES. Jakarta.

Sumber Lain :

- Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

